



Laporan Studi

Analisis Konteks Lokal dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Kelas Rangkap

Juli 2019



INOVASI – Innovation for Indonesia’s School Children

Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270

Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304

Fax : (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Juli 2019

Foto sampul diambil dari Palladium

Pemerintah Australia dan Indonesia bermitra melalui program Innovation for Indonesia’s School Children (INOVASI). INOVASI berupaya memahami bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran siswa dalam bidang literasi dan numerasi di berbagai sekolah dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fase pertama program ini (AUD49 juta) dimulai pada Januari 2016, dan akan berlanjut hingga Desember 2019. Bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, INOVASI telah membentuk kemitraan dengan 17 kabupaten/kota di: Nusa Tenggara Barat; Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Utara; dan Jawa Timur.

INOVASI adalah Program Kemitraan antara Pemerintah Australia–Indonesia – Dikelola oleh Palladium.



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

Laporan Studi

Analisis Konteks Lokal dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Kelas Rangkap

Study Kasus Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Juli 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	5
DAFTAR SINGKATAN.....	6
1. PENDAHULUAN.....	8
1.1 LATAR BELAKANG	8
1.2 TUJUAN	9
1.3 METODOLOGI.....	10
2. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	12
2.1 KONDISI GEOGRAFI	12
2.2 KONDISI DEMOGRAFI.....	14
2.3 KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.....	15
2.4 AKSES TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN	21
2.5 PERSEPSI DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK	23
2.6 PROGRAM INOVASI YANG DIJALANKAN	26
3. KONTEKS MUNCULNYA PKR.....	27
3.1 JUMLAH SISWA.....	27
3.2 JUMLAH DAN KEHADIRAN GURU	31
3.3 KETERSEDIAAN RUANG KELAS	33
4. PRAKTEK PELAKSANAAN PKR.....	33
4.1 PEMAHAMAN MENGENAI PKR	34
4.2 IMPLEMENTASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	36
4.3 DUKUNGAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH	41
5. KONTEKS KEBERLANJUTAN PKR	43
5.1 DINAMIKA FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PKR	43
5.2 FAKTOR PENDUKUNG KEBERLANJUTAN PKR.....	45
5.3 TANTANGAN BAGI KEBERLANJUTAN PKR	47
6. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN LAIN	50
6.1 ALOKASI APBD DI KABUPATEN PASURUAN	50
6.2 KEBERLANJUTAN PROGRAM DI KABUPATEN BLITAR.....	50
7. PENUTUP	53
7.1 KESIMPULAN	53
7.2 REKOMENDASI	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Kategori dan Jumlah Informan	10
Tabel 2 Luas Wilayah Desa dan Jumlah Dusun di Kecamatan Sukapura (2017)	13
Tabel 3 Kepadatan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Sukapura (2017)	14
Tabel 4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukapura	14
Tabel 5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Sukapura (2017)	17
Tabel 6 Jumlah Sekolah Tiap Desa di Kecamatan Sukapura (2017)	21
Tabel 7 Jumlah Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Sukapura	28
Tabel 8 Jumlah Anak Usia Sekolah Tiap Desa di Kecamatan Sukapura (2017)	29
Tabel 9 Jumlah Guru Kelas di Kecamatan Sukapura	31
Tabel 10 Jumlah Siswa dalam Tiga Tahun Terakhir	44
Tabel 11 Jumlah Guru dalam Tiga Tahun Terakhir	45
Gambar 1 Peta Kecamatan Sukapura	12
Gambar 2 Ilustrasi Pelaksanaan PKR Sebelum Pelatihan	37
Gambar 3 Ilustrasi Pelaksanaan PKR Setelah Pelatihan	38

DAFTAR SINGKATAN

3T	Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
AMK	Angka Mengulang Kelas
APBD	Anggaran Pembangunan Daerah
Bappeda	Badan Perencana Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencana Pembangunan Nasional
BOS	Biaya Operasional Sekolah
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
Dapodikdasmen	Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
Diknas	Dinas Pendidikan Nasional
Disporbudpar	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasda	Fasilitator Daerah
FGD	<i>Focused Group Discussion</i>
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
GPK	Guru Pendamping Khusus
GTT	Guru Tidak Tetap
KB	Keluarga Berencana
KD	Kompetensi Dasar
KI	Kompetensi Inti
KKG	Kelompok Kerja Guru
KLK	Kelas Layanan Khusus
Km	Kilometer
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LKS	Lembar Kerja Siswa
Mdpl	Meter di Atas Permukaan Laut
MI	Madrasah Ibtidaiyah
Musrembang	Musyawaharah Perencanaan dan Pembangunan
NIEP	<i>National Indicators for Education Planning</i>
OASE	Ojek untuk Anak Sekolah
PAKEM	Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PDIA	<i>Problem Driven Iterative Adaptation</i>
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Perdes	Peraturan Desa
Permendes	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PGSD	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKR	Pembelajaran Kelas Rangkap
PLPG	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PMD	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPKB	Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Rombel	Rombongan Belajar
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
SD	Sekolah Dasar
SDI	Sekolah Dasar Islam
SDN	Sekolah Dasar Negeri
SEPAKAT	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu
SK	Surat Keputusan
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPM	Standar Pelayanan Minimum
TK	Taman Kanak-kanak
ToT	<i>Training of Trainer</i>

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam hal ini berarti negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dasar yang bermutu.

Namun demikian, faktor geografis Indonesia merupakan tantangan tersendiri untuk bisa menyediakan layanan pendidikan yang merata. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.499 pulau dengan bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang sangat beragam. Wilayah tempat tinggal masyarakat Indonesia mencakup daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kondisi geografis yang sulit seperti umumnya di wilayah timur Indonesia, menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam peningkatan akses terhadap pendidikan¹. Selain lingkungan fisik, perbedaan juga kemudian tercermin dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Kemajemukan yang ada menyebabkan kebutuhan akan layanan pendidikan menjadi berbeda-beda (Hadi, 2014; Khoiriyah & Maghfiroh, 2018; Rahim, 2012).

Program INOVASI mendukung pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah masih ditemukan adanya kondisi-kondisi spesifik yang membuat kelompok anak tertentu menjadi rentan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu kondisi spesifik tersebut terdapat di Kabupaten Probolinggo yang memiliki beberapa 'wilayah sulit' karena letaknya yang berada di dataran tinggi dengan akses transportasi yang masih sangat terbatas, seperti di Kecamatan Sukapura, Gading, Tiris, Kuripan, Krucil, Lumbang, dan Sumber. Di wilayah-wilayah tersebut terdapat sekolah kecil dengan jumlah murid kurang dari 16 orang per rombongan belajar (rombel)², dan jumlah guru yang juga sedikit. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam paparannya di *District Planning Meeting* INOVASI tahun 2018 mengatakan bahwa 41,2% sekolah dasar yang terdiri dari 232 SD Negeri dan 29 SD Swasta di wilayahnya merupakan sekolah dasar kecil di mana dalam satu rombel siswanya kurang dari ½ SPM³. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa kekurangan guru kelas di sekolah-sekolah kecil dalam Kabupaten Probolinggo tersebut mencapai 191 orang. Di lain sisi, Bank Dunia (2011) mengungkapkan bahwa kebijakan mengalokasikan satu guru untuk satu kelas, seperti yang digunakan dalam penghitungan tersebut, tidaklah tepat jika diterapkan di sekolah-sekolah kecil dikarenakan rendahnya beban mengajar guru. Profil pendidikan di Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan masih tingginya Angka Mengulang Kelas (AMK) pada kelas awal, yaitu 6,9% untuk kelas 1; 1,9% untuk kelas 2; dan 1,7% untuk kelas 3⁴. Meskipun data tersebut merupakan data Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan, namun dapat ditengarai bahwa AMK yang tinggi bisa terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi penyediaan layanan pendidikan, termasuk kondisi di wilayah-wilayah sulit yang ada.

Dengan kondisi tersebut kemudian Program INOVASI merekomendasikan pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) atau *multigrade* untuk mengatasi kekurangefisienan pengelolaan pembelajaran di sekolah.

¹

https://www.academia.edu/10466407/Perbedaan_Pelaksanaan_Pendidikan_di_Indonesia_Bagian_Barat_dan_Bagian_Timur

² Menurut Permendikbud No. 17/2017 pasal 24, jumlah siswa minimal per rombel untuk tingkat SD adalah 20 siswa

³ Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permendikbud No. 23/2013 mengatakan bahwa jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk SD/MI adalah tidak lebih dari 32 siswa

⁴ Data diambil dari NIEP, 2018

Analisis rasio guru dan siswa menjadi penting untuk dapat memahami kondisi yang ada. Kecamatan Sukapura dipilih sebagai *pilot* pelaksanaan PKR dengan pertimbangan banyaknya jumlah sekolah dasar kecil dengan jumlah murid kurang dari 50 orang per sekolah dan masih tingginya AMK.

Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat Tengger yang menjadi mayoritas penduduk dari desa-desa di Kecamatan Sukapura ini memiliki tradisi dan nilai-nilai budaya khas, yang mungkin berpengaruh terhadap persepsi dan pemenuhan hak pendidikan anak (Hadi, 2014; Khoiriyah & Maghfiroh, 2018; Setiawan, 2008; Suhartono & Hadi, 2016). Bjork (2005) dalam studinya terkait desentralisasi pendidikan di Indonesia menyimpulkan pentingnya pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, peraturan dan sejarah di wilayah-wilayah di mana kebijakan pendidikan akan diimplementasikan dikarenakan faktor-faktor tersebut lebih cenderung menghambat perubahan dibandingkan faktor teknis seperti kurikulum, pembiayaan, dan lainnya (dalam Cannon, 2006). Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah kajian khusus untuk memahami konteks geografis dan kehidupan masyarakat di Kecamatan Sukapura, khususnya di desa-desa tempat dilaksanakannya PKR, termasuk menggali persepsi masyarakat setempat terhadap hak pendidikan anak.

1.2 TUJUAN

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) telah dilaksanakan di berbagai negara. Little (2006) menunjukkan bahwa praktek PKR di negara berkembang umumnya muncul karena adanya ketidakseimbangan jumlah guru dan siswa dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang didasarkan pada tingkatan (*grade*). Berbeda halnya dengan di negara maju, khususnya di Inggris, PKR justru lebih banyak dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dengan populasi yang besar dan tetap. PKR dalam hal ini didasarkan pada pilihan pedagogis sejalan dengan upaya untuk mempromosikan pendidikan yang aktif dan mandiri.

Di Indonesia, seperti di negara berkembang lainnya, PKR umumnya muncul karena adanya kondisi spesifik geografis yang menyebabkan jumlah murid dan terkadang juga guru menjadi terbatas. Menurut perkiraan, ada sekitar 24.000 sekolah dasar di Indonesia dengan jumlah siswa kurang dari 90 orang, dan lebih dari 5.000 sekolah dasar dengan jumlah siswa kurang dari 50 orang (Bank Dunia, 2011). Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan juga bervariasinya akses terhadap pendidikan yang tersedia sejauh ini menyebabkan pendekatan PKR yang diterapkan bisa sangat beragam. Sayangnya, data serta dokumentasi terkait pelaksanaan PKR yang sebenarnya masih sangat minim. Beberapa studi yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan PKR umumnya belum dilaksanakan secara terencana sehingga belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan (Bank Dunia, 2011; Luschei & Zubaidah, 2012). Selain itu, dukungan dari pemerintah setempat juga masih terbatas sehingga pelaksanaan PKR di kabupaten/kota yang didukung oleh lembaga donor belum dapat berjalan secara berkelanjutan (Bank Dunia, 2011).

Berangkat dari kondisi tersebut, studi ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara konteks lokal dan kebutuhan akan alternatif pembelajaran, dalam hal ini adalah PKR di Kecamatan Sukapura yang menjadi sasaran Program INOVASI. Lebih lanjut, studi ini akan melihat sejauh mana PKR kemudian dipahami dan dilaksanakan, serta dalam konteks apakah pelaksanaan PKR akan tetap dibutuhkan. Berbagai faktor pendorong dan tantangan pelaksanaan PKR akan diidentifikasi sebagai landasan dalam perumusan rekomendasi, termasuk juga kebijakan-kebijakan lokal dan nasional yang sudah ada atau diperlukan.

Tujuan-tujuan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah kondisi geografi, demografi serta ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di desa-desa tempat program PKR dilaksanakan?
- b. Bagaimanakah kondisi tersebut mempengaruhi akses, persepsi, dan pemenuhan hak anak, terutama di bidang pendidikan?
- c. Di bidang pendidikan, apakah terdapat perbedaan pengaruh kepada kelompok anak laki-laki dan perempuan, serta bagaimana dengan anak penyandang disabilitas?

- d. Faktor apa saja yang kemudian mendorong munculnya PKR?
- e. Bagaimanakah pemahaman mengenai PKR, baik dari literatur maupun praktik-praktik yang dijalankan?
- f. Sejauh mana PKR merespon kebutuhan lokal di bidang pendidikan terkait dengan kondisi yang ada?
- g. Bagaimanakah pengaruh dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi PKR terhadap keberlanjutan kegiatan?
- h. Apa saja faktor pendukung dan tantangan dalam pelaksanaan PKR?
- i. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kunci untuk pelaksanaan PKR?
- j. Selain PKR, apakah ada metode lain yang sekiranya tepat untuk diterapkan dalam konteks atau kondisi lokal yang serupa?

Secara strategis, studi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan berbasis bukti untuk mendorong adanya kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang memberi ruang bagi adanya inisiatif-inisiatif lokal di bidang pendidikan serta merespon kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai konteks lokal.

1.3 METODOLOGI

Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan selama bulan April-Mei 2019 di Kabupaten Probolinggo yang mencakup Kecamatan Sukapura, Lumbang, dan Krucil; Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Blitar. Di Kecamatan Sukapura diambil enam desa sebagai fokus studi yang merupakan lokasi dari sekolah-sekolah pelaksana *pilot* PKR dalam Program INOVASI, yaitu; Desa Ngadisari, Wonokerto, Sukapura, Ngepung, Sapikerep, dan Sariwani. Di Kecamatan Lumbang dan Krucil dipilih salah satu desa lokasi sekolah pelaksana PKR sebagai perwakilan. Sementara itu, fokus studi di Kabupaten Pasuruan dan Blitar lebih ditujukan kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, *Focused Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi literatur. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria informan yaitu siswa, orangtua siswa dan komite sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas, pemimpin dan tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, meliputi Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dewan Pendidikan dan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berikut adalah rangkuman kategori dan jumlah informan dari tiap lokasi penelitian.

Tabel 1 Kategori dan Jumlah Informan

Lokasi	Kategori	Jumlah Informan		
		Laki-laki	Perempuan	Total
Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo	Siswa	4	7	11
	Orangtua siswa	4	3	7
	Guru	8	7	15
	Kepala sekolah	6	2	8
	Pengawas	2	0	2
	Tokoh masyarakat	7	1	8
Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo	Siswa	5	7	12
	Orangtua siswa	4	5	9
	Guru	5	1	6
	Kepala sekolah	2	1	3
	Pengawas	1	0	1
	Tokoh masyarakat	1	0	1

Kec. Krucil, Kab. Sukapura	Siswa	3	5	8
	Orangtua siswa	0	5	5
	Guru	5	2	7
	Kepala sekolah	3	0	3
	Pengawas	2	0	2
	Tokoh masyarakat	2	0	2
Kab. Probolinggo	Dinas Pendidikan	1	0	1
	Dinas PMD	1	0	1
	Dinas PPKB	0	1	1
	Dinas Porbudpar	1	0	1
	DPRD	1	0	1
	Bappeda	2	0	2
Kab. Pasuruan	Dinas Pendidikan	2	0	2
Kab. Blitar	Dinas Pendidikan	1	2	3
	Pengawas/Ex Fasda <i>Multigrade</i>	4	3	7
	Kepala sekolah	0	1	1
	Guru	2	0	2
	Ex Pelaksana Program <i>Multigrade</i>	1	0	1
Total Informan		80	53	133

Observasi dan wawancara sambil lalu dilakukan untuk mendapatkan serta mengkonfirmasi informasi terkait kondisi desa, sekolah dan proses belajar mengajar di dalam kelas. Sejumlah referensi dan dokumen dikumpulkan untuk triangulasi dan analisis data, seperti profil kabupaten, kecamatan, dan desa, serta profil pendidikan di tingkat kecamatan.

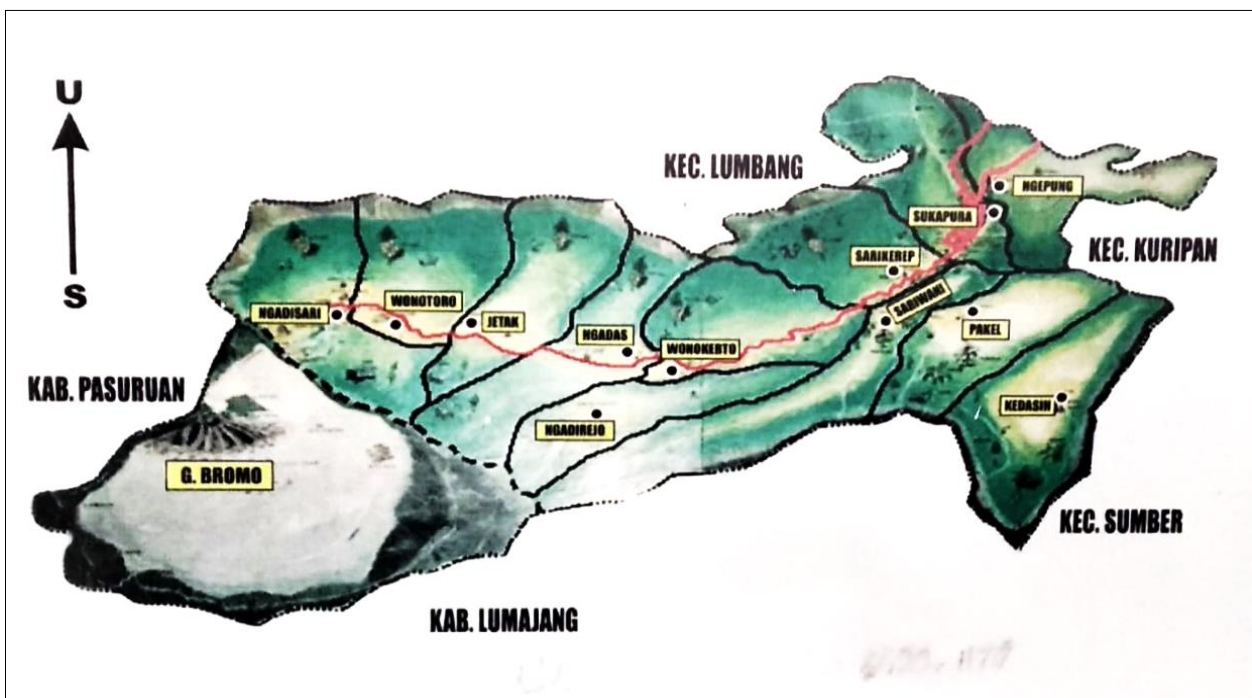
Analisis data kualitatif dilakukan sepanjang waktu studi dengan memproses informasi selama wawancara, melakukan interpretasi serta klasifikasi pada catatan lapangan dan transkripsi hasil wawancara (Skovdal & Cornish, 2015). Hasil klasifikasi kemudian distrukturkan dan dikembangkan, serta dianalisis lebih lanjut dalam proses penulisan laporan. Untuk mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil studi ini, pengecekan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumen. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui sejumlah informan yang relevan dalam rangka mencari kesamaan informasi.

2. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dan salah satunya adalah Kabupaten Probolinggo. Secara administratif, Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di utara, Kabupaten Situbondo di timur, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember di selatan, serta Kabupaten Pasuruan di barat. Kabupaten ini terletak di lereng pegunungan yang membujur dari barat ke timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lemongan, dan Pegunungan Bromo-Tengger. Kabupaten Probolinggo bersama dengan Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi masuk sebagai wilayah Tapal Kuda. Wilayah yang dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda ini banyak dihuni oleh suku Madura yang melakukan migrasi besar-besaran pada sekitar abad 18. Selain dihuni suku Madura, wilayah ini juga banyak dihuni oleh suku Jawa yang hidup berdampingan. Seiring waktu, akulturasi terjadi antara kebudayaan Jawa Timuran, Madura dan Islam di wilayah ini. Selain suku-suku tersebut, terdapat juga Suku Osing di Banyuwangi dan Suku Tengger di Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru yang memiliki kebudayaan sendiri. Kecamatan Sukapura sebagai bagian dari Kabupaten Probolinggo merefleksikan berbagai perbedaan tersebut.

2.1 KONDISI GEOGRAFI

Gambar 1 Peta Kecamatan Sukapura



Sumber: Kecamatan Sukapura

Kecamatan Sukapura merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Luas wilayah Kecamatan Sukapura adalah 10.208,53 hektar atau 6,02% dari total wilayah Kabupaten Probolinggo. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten adalah 42 Km dengan sarana jalan yang cukup bagus untuk dilalui kendaraan bermotor roda dua maupun empat. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Lumbang di utara, Kecamatan Kuripan dan Sumber di timur, Kabupaten Lumajang di selatan, dan Kabupaten Pasuruan di barat. Kecamatan Sukapura terdiri dari 12 desa yang mencakup total 40 dusun seperti terlihat dalam tabel 2. Luas wilayah desa terbesar secara berurutan dimiliki oleh Desa Sapikerep, Ngepung, dan Sukapura.

Tabel 2 Luas Wilayah Desa dan Jumlah Dusun di Kecamatan Sukapura (2017)

Nama Desa	Luas Wilayah (hektar)	Jumlah Dusun
Ngadisari	775,30	3
Sariwani	629,70	5
Kedasih	974,92	4
Pakel	862,10	5
Ngepung	1.367,54	3
Sukapura	1.312,63	5
Sapikerep	1.527,37	3
Wonokerto	377,23	3
Ngadirejo	853,70	3
Ngadas	905,10	2
Jetak	162,34	2
Wonotono	460,60	2
TOTAL	10.208,53	40

Sumber: Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Sukapura merupakan bagian dari Pegunungan Bromo-Tengger dengan ketinggian wilayah antara 650 sampai 1.800 mdpl dan suhu udara relatif dingin. Topografi wilayah ini berbukit-bukit dengan beberapa bagian yang cukup terjal. Akses transportasi menuju pusat-pusat desa sudah dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun demikian, masih ada beberapa dusun yang letaknya cukup terpencil atau berada di ketinggian dengan jalur terjal, seperti Dusun Ngelosari di Desa Sapikerep dan Dusun Gedong di Desa Sariwani. Untuk mencapai dusun-dusun tersebut harus menggunakan kendaraan roda empat khusus atau sepeda motor.

Secara umum, wilayah di Kecamatan Sukapura dapat dibagi berdasarkan ketinggiannya, yaitu wilayah atas yang mencakup Desa Ngadisari, Wonotono, Jetak, Ngadas, Ngadirejo, dan Wonokerto; dan wilayah bawah yang mencakup Desa Sapikerep, Sariwani, Pakel, Kedasih, Sukapura, dan Ngepung. Namun demikian batasan pembagian wilayah tersebut juga seringkali dihubungkan dengan keberadaan masyarakat Tengger sehingga desa-desa di wilayah bawah dengan mayoritas penduduk keturunan Tengger, yaitu Desa Sapikerep, Sariwani, Pakel, dan Kedasih, juga dianggap masuk sebagai wilayah atas. Hal ini teridentifikasi dengan keberadaan *pandita* atau *dukun gede* yang merupakan tokoh adat masyarakat Tengger di desa-desa tersebut. Hanya Desa Sukapura dan Ngepung yang kemudian dianggap sebagai wilayah bawah.

Kondisi tanah di kecamatan ini merupakan tanah mekanis dengan kandungan mineral yang tinggi berasal dari ledakan gunung berapi. Tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi sehingga sangat cocok untuk pertanian sayur-sayuran. Hanya sedikit dari wilayah kecamatan yang memiliki tanah sawah, yaitu sebagian kecil di Desa Ngepung dan Sukapura. Wilayah hutan negara masih cukup luas terutama di Desa Sapikerep, Ngadas dan Sukapura, serta sedikit di Desa Ngadisari, Sariwani, Kedasih, Pakel, Ngadirejo, dan Wonotono. Wilayah hutan negara tersebut banyak dimanfaatkan juga sebagai lahan pertanian oleh warga setempat.

Kecamatan Sukapura seperti umumnya wilayah lain di Indonesia, memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan di bulan November sampai Mei dan musim kemarau di bulan Juni sampai Oktober. Pertanian di Kecamatan Sukapura menggunakan sistem tadah hujan. Curah hujan terbesar di wilayah ini adalah 196 mmHg dan terkecil adalah 32 mmHg. Selain air hujan, pengairan di desa-desa sangat bergantung pada keberadaan mata air dikarenakan tidak ada aliran sungai dengan debit air yang tersedia sepanjang tahun. Desa yang tidak memiliki mata air, seperti Desa Sukapura, memiliki ketersediaan air bersih yang lebih terbatas terutama di musim kemarau. Di samping kesuburan lahan, keberadaan sumber air juga mempengaruhi jenis pertanian yang digarap. Desa-desa di wilayah atas yang umumnya memiliki cukup banyak sumber air bisa menggarap lahan pertanian sepanjang tahun sehingga bisa menanam berbagai

macam sayuran dengan waktu panen hingga tiga kali dalam setahun. Sementara desa-desa di wilayah bawah lebih banyak menggarap lahan untuk perkebunan yang tidak terlalu banyak memerlukan air, yaitu tanaman keras dengan waktu panen rata-rata sekali dalam setahun.

2.2 KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukapura pada tahun 2017 adalah 19.405 jiwa, dengan jumlah laki-laki 9.967 jiwa dan perempuan 10.245 jiwa. Tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap desa. Hal ini tercermin dari rasio jenis kelamin yang berkisar antara 98-109 jiwa.

Distribusi penduduk di setiap desa relatif merata, seperti terlihat dalam tabel 3. Hanya di Desa Sukapura dan Ngadisari yang tingkat kepadatannya cukup tinggi, sementara di Desa Kedasih dan Ngadirejo sedikit lebih rendah dibanding desa lainnya.

Tabel 3 Kepadatan Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Sukapura (2017)

Nama Desa	Jumlah (Jiwa)	Penduduk	Kepadatan
Ngadisari	1.505		301
Sariwani	1.384		368
Kedasih	1.610		242
Pakel	1.728		290
Ngepung	2.089		155
Sukapura	3.786		601
Sapikerep	2.670		438
Wonokerto	1.334		354
Ngadirejo	1.404		239
Ngadas	665		327
Jetak	576		355
Wonotoro	654		355
TOTAL	19.405		311

Sumber: Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018

Dinamika jumlah penduduk dari tahun ke tahun sangat rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2015, jumlah penduduk kecamatan ini adalah 20.402 jiwa, kemudian di tahun 2016 turun menjadi 20.270 jiwa dan di tahun 2017 turun kembali menjadi 19.405 jiwa. Perbandingan jumlah kelahiran dan kematian, serta migrasi penduduk juga sangat rendah di setiap tahunnya. Selain adanya ikatan adat yang cukup kuat, kondisi alam yang subur dan mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup membuat minimnya faktor pendorong ataupun penarik bagi masyarakat untuk melakukan perpindahan (Subagiarta, 2015).

Tabel 4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukapura

Tahun	Kelahiran	Kematian	Datang	Pergi	Juml. Penduduk
2015	142	170	49	48	20.402
2016	106	171	104	119	20.270
2017	108	61	62	135	19.405

Sumber: Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018

Rendahnya jumlah penduduk tersebut juga tercermin dalam jumlah rumah tangga di Kecamatan Sukapura, yaitu 6.202 rumah tangga pada tahun 2017 dengan rata-rata jumlah anggota dalam setiap rumah tangga adalah 3,1 jiwa. Angka tertinggi berada di Desa Pakel dengan jumlah 3,9 jiwa. Dengan data tersebut dapat

diasumsikan bahwa umumnya rumahtangga di kecamatan ini hanya terdiri dari seorang bapak, ibu dan satu anak. Akibatnya, penambahan anggota keluarga tidak berlangsung dengan cepat.

Hal ini terkonfirmasi dalam wawancara bersama beberapa informan yang mengatakan bahwa umumnya masyarakat di Kecamatan Sukapura hanya ingin memiliki satu orang anak. Keinginan ini didasari atas pertimbangan tingginya biaya adat yang harus ditanggung setiap orangtua, mulai dari kelahiran hingga pernikahan anak nantinya, khususnya terjadi pada masyarakat keturunan suku Tengger. Di luar masyarakat Tengger, keinginan untuk memiliki hanya satu anak lebih banyak didasari atas pertimbangan ekonomi dimana orangtua dengan pendapatan yang terbatas merasa terlalu berat jika harus menanggung biaya hidup banyak anak.

2.3 KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Mata pencaharian dan kemampuan ekonomi masyarakat

Sesuai dengan kondisi geografisnya, mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Sukapura berasal dari sektor pertanian. Namun demikian, data penduduk dan mata pencaharian Kecamatan Sukapura tahun 2017 menunjukkan bahwa komposisi antara petani dan buruh tani tidak sama antardesa.

Di Desa Ngadisari yang masuk dalam wilayah atas dengan ketinggian wilayah 1.800 mdpl, hampir seluruh angkatan kerjanya merupakan petani yang memiliki dan juga menggarap lahannya sendiri. Sebagai perbandingan, jumlah petani di desa ini adalah 1.059 orang sementara buruh tani hanya 21 orang. Sebagian kecil warga desa bekerja di bidang pariwisata sebagai pemilik penginapan atau penyedia jasa, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kondisi tanah yang subur, serta curah hujan dan keberadaan sumber air yang cukup banyak maka pertanian di Desa Ngadisari dapat dilangsungkan sepanjang tahun. Hasil utama pertanian dari desa ini adalah sayur-sayuran seperti kubis, wortel, tomat, bawang prei, jagung dan kentang. Kepemilikan lahan di desa ini cukup tinggi dikarenakan adanya peraturan yang melarang warga desa untuk menjual lahan kepada pihak di luar masyarakat keturunan suku Tengger. Desa dengan pengaruh adat yang cukup kuat ini membagi kepemilikan lahan secara merata kepada keturunan laki-laki ataupun perempuan. Jika ada warga yang menikah dengan orang di luar keturunan suku Tengger maka orang yang dinikahi tersebut tetap tidak dapat memiliki lahan dan hanya keturunan mereka nantinya yang berhak mendapatkan lahan tersebut. Siklus pertanian yang cukup baik dan sistem kepemilikan lahan yang terjaga membuat lapangan kerja yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan warganya, dan umumnya warga desa juga memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik.

Desa Wonokerto yang berada pada ketinggian 1.700 mdpl juga mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Jumlah petani masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan buruh tani, yaitu 837 petani dan 53 buruh tani. Namun, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa berbeda dengan Desa Ngadisari, penduduk di desa ini umumnya tidak memiliki lahan dalam jumlah besar dan hasil tani lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sendiri. Walaupun kepemilikan lahan masih dijaga untuk keturunan sendiri namun tidak ada peraturan adat yang mengikat. Selain tanah warisan, sebagian warga menggunakan tanah milik negara sebagai tempat tinggal dengan membayar hak guna pakai kepada petugas setempat. Dengan luas lahan yang terbatas maka banyak warga yang selain menjadi petani untuk lahannya sendiri juga bekerja sebagai buruh tani, baik di desa sendiri maupun di Desa Ngadisari. Mata pencaharian warga desa lainnya sama seperti di Desa Ngadisari, yaitu pemilik penginapan, penyedia jasa transportasi, pedagang, dan PNS. Selain itu, banyak juga warga yang bekerja di sektor pariwisata sebagai pegawai di Desa Ngadisari. Kondisi ekonomi warga umumnya masih belum mencukupi, terlebih lagi jika terjadi peristiwa gagal panen yang disebabkan oleh erupsi gunung dan lainnya.

Penduduk Desa Sariwani juga sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan jumlah 919 petani dan 250 buruh tani. Berdasarkan informasi kepala desa, hampir seluruh warga masih memiliki lahan sendiri dengan luas yang cukup besar. Penghasilan dari pertanian dianggap dapat mencukupi kebutuhan warga sehingga kondisi ekonomi warga umumnya sudah cukup baik. Sebagian warga lainnya bekerja sebagai

penyedia jasa transportasi, pedagang, PNS, serta sedikit buruh industri dan buruh bangunan. Meski masuk dalam wilayah atas namun tidak banyak warga yang menyediakan jasa penginapan dikarenakan letak desa yang menjauh dari jalan utama pariwisata. Jalur pariwisata melalui desa ini baru mulai dibuka tahun 2018.

Desa Sapikerep juga masih memiliki jumlah pekerja di bidang pertanian yang cukup signifikan, yaitu 1.350 petani dan 705 buruh tani. Sisanya bekerja sebagai pedagang, penyedia jasa transportasi, pemilik penginapan, PNS, buruh bangunan, dan buruh industri. Desa ini dilewati jalur utama pariwisata sehingga sektor perdagangan dan jasa cukup berkembang. Warga yang bekerja di bidang pertanian ada yang menggarap lahan sendiri dan banyak juga yang menggarap lahan milik Perhutani. Dilihat dari luasnya, desa ini memiliki wilayah hutan negara yang paling luas dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Sukapura. Petani penggarap lahan Perhutani tersebut sebagian besar tinggal di dusun-dusun yang cukup jauh dari pusat desa, yaitu Dusun Ngelosari dan Pusung Malang. Dengan model kepemilikan lahan tersebut, beberapa informan mengatakan bahwa kondisi ekonomi warga di kedua dusun lebih rendah dibanding dusun-dusun lainnya. Di kedua dusun tersebut juga belum ada jaringan telekomunikasi dan sebagian besar belum memiliki aliran listrik.

Perbedaan jenis pertanian mulai terlihat di Desa Sukapura yang masuk dalam wilayah bawah. Pertanian di desa ini umumnya adalah tanaman keras serta padi tadah hujan dengan waktu panen tahunan. Sumber air di desa ini sangat terbatas sehingga pada musim kemarau tidak banyak kegiatan pertanian yang bisa dilakukan. Kondisi tersebut mendorong warga untuk bekerja sebagai buruh tani di wilayah atas yang memiliki masa produktif pertanian sepanjang tahun. Jumlah petani di desa ini adalah 409 orang, sedangkan buruh tani berjumlah 283 orang. Sisanya banyak juga warga yang bekerja sebagai PNS, pedagang, penyedia jasa transportasi, pemilik penginapan, buruh industri, buruh bangunan, dan industri rumah tangga. Kepemilikan lahan di desa ini juga tidak terikat oleh peraturan adat dan bisa diperjualbelikan kepada pihak di luar penduduk desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, meskipun ada yang cukup baik namun kondisi ekonomi warga umumnya masuk dalam kategori menengah ke bawah. Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di desa ini adalah 287 rumahtangga atau sekitar 24% dari jumlah rumahtangga yang ada. RTSM tersebut sebagian besar berada di Dusun Curahwangi dan Watulumpang yang letaknya cukup terpencil.

Desa Ngepung juga berada di wilayah bawah, namun keberadaan sumber air dan pengaturan sistem pengairan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa membuat pertanian di wilayah ini lebih bisa diandalkan sebagai mata pencaharian warga. Hasil utama pertanian dari desa ini adalah padi, buah-buahan dan kayu. Umumnya warga memiliki lahan sendiri walaupun dengan luas terbatas. Jumlah petani di desa ini adalah 299 orang, hampir sama dengan jumlah buruh tani yaitu 265 orang yang bekerja di dalam desa atau wilayah atas. Selain pertanian, sebagian warga juga memelihara hewan ternak untuk menambah penghasilan. Sebagian besar warga lainnya bekerja sebagai PNS, pedagang, buruh industri, buruh bangunan, dan penyedia jasa angkutan. Dengan berbagai mata pencaharian tersebut maka menurut penilaian kepala desa setempat, kondisi ekonomi warga umumnya sudah cukup baik.

Organisasi dan kepemimpinan

Masyarakat Tengger memiliki nilai *catur guru bekti* yang terdiri dari empat ajaran: *bekti* kepada Yang Maha Kuasa, *bekti* kepada orang tua, *bekti* kepada guru, dan *bekti* kepada pemerintah. *Bekti* kepada Yang Maha Kuasa dan leluhur dituangkan dalam bentuk pelaksanaan berbagai upacara adat. *Bekti* kepada orang tua diterjemahkan melalui kewajiban anak untuk membahagiakan orangtua. *Bekti* kepada guru diwujudkan dengan kesetiaan kepada pemangku adat yang menjadi panutan bagi masyarakat Tengger, namun demikian ada juga informan yang menerjemahkannya sebagai penghormatan kepada guru di sekolah. *Bekti* terhadap pemerintah mengharuskan masyarakat Tengger untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh penguasa negara selayaknya pada kerajaan di zaman Majapahit.

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh warga dengan calon-calon yang diseleksi terlebih dahulu di tingkat kecamatan. Kepala desa yang merupakan pimpinan formal bertugas untuk memimpin pelaksanaan pembangunan desa serta berbagai urusan administratif pemerintahan. Kepala desa

yang dikenal dengan sebutan *petinggi* (*ki petinggi* untuk laki-laki dan *ni petinggi* untuk perempuan) dibantu oleh perangkat desa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Khusus untuk desa-desa dengan mayoritas penduduk keturunan Tengger, dikenal juga pemangku adat yang memiliki kedudukan sejajar dan menjadi mitra kepala desa. Dalam pelaksanaan ritual, pemangku adat tersebut disebut *pandita* atau *dukun gede*. Berbeda dengan kepala desa, *dukun gede* diuji dan diangkat melalui suatu upacara pengukuhan yang dilaksanakan bersamaan pada Upacara *Yadnya Kasada* dan tidak didasarkan pada keturunan. Tugas *dukun gede* adalah melayani umat untuk menyelenggarakan ritual yang berlangsung selama siklus hidup manusia. *Dukun gede* secara khusus dibantu oleh *wong sepuh* untuk upacara terkait kematian dan *legen* untuk upacara terkait pernikahan. Selain itu masih ada lagi beberapa *dukun cilik* yang membantu dalam upacara kelahiran, sunatan, dan lainnya.

Pemimpin masyarakat lainnya didasarkan pada masalah keagamaan. Mayoritas penduduk di beberapa desa, khususnya desa-desa di wilayah atas, memeluk agama Hindu. Sementara di desa-desa lainnya pemeluk agama Islam menjadi mayoritas, seperti terlihat dalam tabel 5. Menurut Suyitno & Sapari (1999), pembinaan dan pengembangan agama Hindu di Tengger mulai dilakukan pada sekitar tahun 1970 yaitu ketika banyak orang Tengger dikirim untuk belajar Hindu di Bali dan kemudian didatangkan juga beberapa guru agama Hindu ke Tengger. Dalam praktiknya, agama Hindu yang ada di Tengger berbeda dengan di Bali karena adanya pengaruh budaya lokal Tengger. Misalnya, masyarakat Hindu di Tengger tidak mengenal pembagian kasta. Namun demikian, pemimpin agama Hindu mereka tetap mengacu pada organisasi nasional, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sementara untuk masyarakat Islam, pemimpin agama umumnya bersifat informal dan ada di tingkat desa, seperti kiai atau ustadz. Penganut agama lainnya tidak banyak, seperti Katolik, Protestan, dan Budha yang juga memiliki pemimpin agama masing-masing. Sama halnya dengan pemangku adat, pemimpin agama juga menjadi mitra kepala desa dalam memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan di desa.

Tabel 5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Sukapura (2017)

Nama Desa	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
Ngadisari	14	0	0	1.491	0
Sariwani	653	0	3	731	0
Kedasih	1.139	0	1	470	0
Pakel	1.361	0	0	367	0
Ngepung	2.059	0	28	1	1
Sukapura	3.701	7	76	2	0
Sapikerep	1.204	7	21	1.438	0
Wonokerto	1.320	4	0	0	0
Ngadirejo	52	0	0	1.352	0
Ngadas	6	0	0	659	0
Jetak	8	0	0	568	0
Wonotoro	6	1	0	647	0
TOTAL	11.523	19	129	7.726	1

Sumber: Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018

Organisasi masyarakat yang ada juga berkaitan dengan pemerintahan, adat dan agama. Organisasi yang berada di bawah pemerintah desa diantaranya adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Karang Taruna. Terkait dengan adat, tidak ditemukan organisasi yang dibentuk secara khusus namun biasanya ada pihak-pihak tertentu yang sudah terbiasa membentuk kepanitiaan untuk membantu penyelenggaraan upacara adat jika diperlukan. Organisasi yang terkait dengan agama terutama bisa dilihat di desa-desa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti Desa Wonokerto, yaitu perkumpulan mengaji.

Agama dan budaya

Adat dan agama merupakan dua hal yang terpisah bagi masyarakat Sukapura. Jika ditarik garis keturunan maka sebagian besar masyarakat Sukapura sebenarnya masih memiliki hubungan atau merupakan keturunan suku Tengger. Namun demikian, seperti dikatakan oleh beberapa informan, yang dimaksud dengan masyarakat Tengger saat ini adalah masyarakat yang memiliki keturunan langsung dari leluhur suku Tengger dan tinggal di desa adat, yaitu Desa Ngadisari, serta beberapa desa sekitarnya. Di desa-desa lainnya, keturunan suku Tengger yang ada umumnya sudah menikah dengan suku lain, terutama Jawa. Jika dilihat dari agamanya maka di desa-desa dengan mayoritas suku Tengger tersebut tidak semua memeluk agama yang sama. Sebagian besar desa memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu namun ada juga desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Desa Ngadisari merupakan desa adat yang masih kuat memegang tradisi Tengger. Masyarakat Tengger mempunyai kepercayaan terhadap roh alam ghaib. Upacara adat masih dilaksanakan secara rutin dan melibatkan seluruh penduduk, baik yang beragama Hindu ataupun Islam. Upacara adat tersebut ada yang dilakukan rutin setiap bulan atau disebut *bujan*, dan ada juga upacara *selametan* yang dilakukan berdasarkan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Kalender masyarakat Tengger didasarkan pada pergerakan bulan-matahari dengan perhitungan matematis tertentu. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan yang berbeda dari kalender masehi. Setiap bulannya, upacara *bujan* dilakukan terutama oleh para pemimpin di desa, seperti kepala desa dan perangkatnya, *pandita*, *legen* dan *wong sepuh*. Dari seluruh *pujan* tersebut, upacara besar dilakukan pada bulan kedua (*Sasi Karo*) dan kesepuluh (*Sasi Kasada*).

Upacara *Karo* merupakan hari raya terbesar bagi masyarakat Tengger yang dilakukan dengan tujuan untuk memuja *Sang Hyang Widi*, menghormati leluhur, memperingati asal-usul manusia, serta mengembalikan manusia kepada *satya yoga* atau kesucian (Suyitno & Sapari, 1999). Peringatan hari raya ini berlangsung selama satu hingga dua minggu dengan melibatkan seluruh masyarakat Tengger dari seluruh desa. Masyarakat yang sudah tidak lagi mempraktikkan tradisi Tengger, terutama dari wilayah bawah, tetap datang ke rumah-rumah di wilayah atas untuk bersilaturahmi. Hal sebaliknya juga terjadi pada saat Idul Fitri dimana masyarakat Tengger berkunjung ke rumah-rumah warga yang merayakannya. Selain ikut bersilaturahmi, sebagian anak juga ikut terlibat dalam tarian tradisional yang dipentaskan sebagai rangkaian perayaan. Sekolah-sekolah di desa adat, yaitu Desa Ngadisari, sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah desa untuk meliburkan kegiatan belajar selama 2-3 hari pada saat perayaan hari raya *Karo*. Sementara di desa lain umumnya anak-anak tidak masuk sekolah. Rangkaian upacara *karo* ditutup dengan bersih desa yang jadwalnya ditentukan bersama antar *dukun gede*.

Upacara *Kasada* adalah hari raya kurban orang Tengger yang diselenggarakan pada saat purnama bulan *Kasada*. Dalam upacara ini, masyarakat Tengger melemparkan hewan ternak dan juga hasil panen mereka ke kawah Gunung Bromo sebagai persembahan bagi Sang Hyang Widi. Upacara ini berlangsung sekitar satu minggu. Beberapa pertunjukan digelar sebelum acara dimulai, seperti pertunjukan tari, pacuan kuda, dan lainnya. Di luar masyarakat Tengger, umumnya penduduk Kecamatan Sukapura datang untuk meramalkan. Ada yang sekedar menonton, ikut melempar persembahan, dan ada juga yang berjualan dikarenakan pada saat tersebut biasanya banyak wisatawan yang datang. Anak-anak dari desa-desa dengan penduduk mayoritas keturunan Tengger ikut berpartisipasi dalam pawai atau pertunjukan kesenian. Sama halnya dengan upacara *Karo*, sekolah-sekolah di desa adat meliburkan muridnya selama beberapa hari.

Di luar *Karo* dan *Kasada*, ada juga upacara besar yang dilakukan sekali dalam lima tahun di masing-masing desa, yaitu *Unan-unan*. Upacara ini ditujukan untuk membersihkan desa dari gangguan makhluk halus dan menyucikan para arwah yang belum sempurna agar dapat kembali ke alam asal yang sempurna, yaitu nirwana (Sutarto, 2006). Dalam upacara ini, masyarakat Tengger menyembelih kerbau sebagai kurban.

Upacara *selametan* dilaksanakan di luar upacara rutin dan terkait erat dengan siklus hidup manusia, mulai dari lahir hingga kematian. *Selametan* tersebut antara lain:

- Kelahiran, terdiri dari enam rangkaian: mulai dari bayi dalam kandungan berumur tujuh bulan (*sesayut*), menyimpan ari-ari bayi (*sekul brokohan*), bayi berumur 5-7 hari atau ketika pusar kering dan akan lepas (*cuplak puser*), memberi nama pada bayi (*jenang abang-jenang putih*), setelah bayi berumur 40 hari (*kekerik*), dan setelah bayi berumur 44 hari dan sudah mampu tengkurap (*among-among*).
- *Tugel kuncung*, diselenggarakan ketika anak berusia 4 tahun dengan memotong rambut bagian depan agar senantiasa mendapat keselamatan.
- *Walagara*, akad nikah yang dilaksanakan oleh dukun dan berdasarkan perhitungan waktu yang ditentukan oleh dukun juga.
- *Entas-entas*, merupakan salah satu dari rangkaian upacara kematian yang dilaksanakan pada hari ke-seribu setelah kematian dengan menyembelih kerbau.

Selain upacara-upacara di atas, masih banyak lagi upacara lain yang dilaksanakan, seperti ketika anak disunat, membangun rumah, awal masa tanam dan panen, dan lainnya. Dalam upacara *selametan* diadakan jamuan serta pembagian makanan kepada kerabat sehingga memerlukan dana cukup besar, contohnya dalam rangkaian upacara kelahiran dimana keluarga harus menyiapkan *panggangan* berupa ayam sejumlah nenek dari leluhur yang ada. Bagi keluarga yang mampu, upacara-upacara tersebut juga diadakan dengan memanggil pertunjukan seni sebagai hiburan untuk warga, contohnya *tarub* atau *kepangan*. Di lain sisi, beredar anggapan bahwa keluarga-keluarga keturunan suku Tengger banyak yang kemudian memutuskan pindah keluar dari desa adat atau ke wilayah bawah untuk menghindari tuntutan upacara-upacara adat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, saat ini kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sudah cukup baik sehingga keikutsertaan anak dalam upacara adat tidak berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi siswa. Ketidakhadiran siswa biasanya hanya pada saat upacara besar, yaitu *Karo* dan *Kasada* selama masing-masing 2-3 hari. Untuk upacara lainnya serta hajatan, umumnya anak baru diajak setelah pulang sekolah, walaupun terkadang masih ada juga yang membolos. Dengan demikian, rata-rata anak tidak masuk sekolah karena upacara adat adalah 4-6 hari per tahun.

Keberadaan Desa Wonokerto bisa dibilang cukup unik karena hampir seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam (tabel 5) sementara desa-desa sekitarnya memiliki penduduk mayoritas Hindu. Walaupun berbeda agama, sebagian besar penduduk desa ini masih merupakan keturunan masyarakat Tengger. Ada yang menikah dengan sesama keturunan Tengger namun ada juga yang menikah dengan penduduk luar, umumnya suku Jawa. Meski memeluk agama Islam namun budaya Tengger termasuk beberapa upacara dan kebiasaan adat masih dilaksanakan oleh warga desa dengan beberapa pengaruh dari agama Islam dan budaya Jawa. Misalnya pada saat kelahiran bayi, meskipun tidak lagi menyiapkan *panggangan* namun mereka tetap melaksanakan *selametan* dengan menerima tamu serta menyiapkan makanan di rumah hingga tali pusar bayi tersebut copot. Begitu juga halnya dengan sunatan, umumnya warga memotong sapi untuk merayakannya. Biaya *selametan* seperti ini bagi sebagian besar warga dianggap cukup membebani namun tetap harus dilaksanakan karena telah menjadi bagian dari tradisi. Partisipasi dalam upacara *kasodo* juga masih tinggi dan sebagian warga ikut melemparkan persembahan ke dalam kawah Gunung Bromo. Dalam upacara *Karo*, warga ikut meramaikan dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah kerabat keturunan suku Tengger.

Tradisi Tengger yang dilakukan di Desa Sariwani hampir sama dengan Desa Wonokerto. Dengan jumlah warga mayoritas Hindu yang hanya sedikit lebih banyak dari Islam (tabel 5), seluruh warga masih merayakan *karo* dan juga *kasodo*. Umumnya warga masih menikah dengan sesama keturunan suku Tengger. Dalam *selametan* kelahiran bayi, *panggangan* tidak lagi disiapkan untuk seluruh keturunan leluhur melainkan hanya diberikan kepada *dukun gede*. Jika ada pendatang yang kemudian tinggal di desa karena menikah maka orang tersebut diwajibkan untuk mengikuti tradisi Tengger.

Mayoritas penduduk di Desa Sapikerep hampir sama antara Hindu dan Islam (tabel 5). Tanpa memandang agama, seluruh warga merasa menjadi bagian dari suku Tengger sehingga tradisi Tengger masih terus dijalankan, terutama upacara-upacara besar seperti *Karo* dan *Kasada*.

Pengaruh adat Tengger semakin berkurang di desa-desa wilayah bawah, misalnya di Desa Sukapura dengan mayoritas penduduk suku Jawa yang umumnya menikah dengan keturunan Tengger. Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, sisanya ada yang memeluk agama Protestan dan sedikit Katolik serta Hindu (tabel 5). Praktek budaya Tengger sudah tidak banyak dilakukan dan partisipasi dalam upacara besar lebih terbatas, misalnya dalam upacara *Kasada* umumnya warga hanya menjadi penonton dan begitu juga dalam upacara *Karo* hanya ikut bersilaturahmi.

Kondisi yang hampir sama terlihat di Desa Ngepung yang juga berada di dalam wilayah bawah. Mayoritas penduduk di desa ini adalah suku Madura dan hampir tidak ada keturunan Tengger. Mayoritas agama penduduk adalah Islam dan ada juga yang memeluk agama Protestan serta sedikit Hindu dan Budha (tabel 5). Praktek budaya Tengger sudah tidak banyak dilakukan dan keterlibatan dalam perayaan hari besar masyarakat Tengger terbatas pada silaturahmi. Upacara dan tradisi yang dilaksanakan lebih banyak mengacu pada ajaran agama, khususnya Islam. Dalam masyarakat Madura, peran pemimpin agama tidak terbatas untuk menuntun masalah keagamaan namun juga menjadi panutan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Rochana, 2012). Terkait dengan partisipasi siswa di sekolah, jumlah ketidakhadiran siswa karena ikut bersilaturahmi selama berlangsungnya upacara adat Tengger sama dengan siswa yang melaksanakan upacara adat tersebut.

Bahasa

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tengger adalah bahasa Jawa Tengger, yaitu bahasa Jawa Kuno yang diyakini sebagai dialek asli orang-orang Majapahit. Bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat di desa-desa wilayah atas. Selain bahasa, identitas masyarakat Tengger juga dapat ditunjukkan dari cara berpakaian. Siswa di sekolah-sekolah di wilayah atas menggunakan baju adat mereka pada hari-hari yang telah ditentukan. Di desa-desa dengan mayoritas penduduk suku Jawa digunakan bahasa Jawa Timur untuk berkomunikasi sehari-hari, begitupun halnya di desa-desa dengan mayoritas suku Madura juga digunakan bahasa Madura yang sudah menjadi ciri khas keturunan Madura di wilayah Tapal Kuda. Berdasarkan hasil pengamatan, meski bahasa daerah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam pembelajaran di sekolah umumnya digunakan Bahasa Indonesia dan sesekali guru menjelaskan dalam bahasa daerah setempat jika siswa menghadapi kesulitan.

Relasi sosial

Meskipun masyarakat Kecamatan Sukapura terdiri dari suku dan agama yang berbeda-beda namun hubungan antarmasyarakat sangat harmonis. Masyarakat di Kecamatan Sukapura secara kultural disatukan oleh adat Tengger yang sudah menjadi bagian hidup mereka secara turun temurun. Nurcahyono & Astutik (2018) dalam studinya menemukan sistem nilai atau norma sosial yang berpengaruh dalam pembentukan kehidupan yang harmonis pada masyarakat Tengger, yaitu nilai *anteng-seger* yang berarti damai dan makmur, serta sikap hidup *sesanti panca setia* yang mencakup *guyub rukun* (hidup bersama), *sanjan sinanjan* (saling mengunjungi), *sayan* (gotong royong, saling bantu membantu), dan *genten kuat* (saling tolong menolong). Sistem nilai tersebut menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan hubungan antarmanusia. Kuatnya adat Tengger juga mendorong para pendatang untuk ikut menjalani dan menghormati nilai-nilai yang dipegang. Sebagai hasilnya, wilayah Tengger dianggap sebagai wilayah yang hampir tanpa konflik (Sutarto, 2006; Setiawan, 2008). Permasalahan yang ada biasanya diselesaikan secara musyawarah. Pemerintah desa dalam hal ini memegang peranan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau di sini masyarakat hidup rukun, enggak ada konflik, agama beda-beda... Pendatang yang masuk ya harus jadi warga Tengger juga.. Saling menghormati, begitu...” (Tokoh Agama, Desa Wonokerto)

Perempuan memiliki peran penting di dalam ranah domestik ataupun publik, namun demikian masih ada *stereotyping*, terutama dalam hal pembagian peran. Sebuah studi mengenai masyarakat Tengger menyimpulkan bahwa perempuan Tengger memiliki peran yang signifikan dalam menemukan keseimbangan hidup keluarganya yang didasari oleh motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosio-kultural (Setiawan, 2008). Lebih lanjut, hampir seluruh informan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan serta hak yang diterima oleh laki-laki ataupun perempuan, contohnya dalam hak waris dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi selama orangtua masih mampu membiayainya. Perempuan dimungkinkan untuk menjadi pemimpin, seperti terlihat di Desa Ngadisari dengan kepala desa seorang perempuan. Namun demikian, masih terdapat *stereotyping* dalam hal pengasuhan anak yaitu perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengurus anak di rumah, sementara laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal pendampingan anak untuk belajar, baik ibu maupun bapak memiliki tanggung jawab yang sama. Pada sore atau malam hari, anak-anak mengulang pelajaran bersama ibu atau bapak dengan pembagian umumnya bapak membantu anak untuk belajar matematika sementara ibu untuk belajar lainnya.

2.4 AKSES TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN

Ketersediaan layanan pendidikan formal belum tersedia di semua desa (tabel 6). Umumnya ada dua sekolah dasar di setiap desa, kecuali di Desa Sukapura dan Sapikerep yang memiliki jumlah penduduk serta luas wilayah cukup besar maka jumlah sekolah dasar yang tersedia juga lebih banyak. Di Desa Ngadas dan Wonotoro, belum ada sekolah dasar yang tersedia sehingga anak-anak di sana pergi ke sekolah-sekolah di desa tetangga. Selain dari desa setempat, sekolah-sekolah juga menerima murid dari desa tetangga sesuai dengan zona yang ditetapkan⁵. Dari 21 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sukapura, 20 diantaranya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan hanya satu Sekolah Dasar Islam (SDI) milik swasta, yaitu di Desa Ngepung.

Tabel 6 Jumlah Sekolah Tiap Desa di Kecamatan Sukapura (2017)

Nama Desa	SDN/SDI	SMP	SMA
Ngadisari	2	1	1
Sariwani	2	1	0
Kedasih	2	1	0
Pakel	2	1	0
Ngepung	2	2	0
Sukapura	4	3	1
Sapikerep	3	0	0
Wonokerto	2	0	0
Ngadirejo	1	1	0
Ngadas	0	0	0
Jetak	1	0	0
Wonotoro	0	0	0
TOTAL	21	10	2

Sumber: Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018

Dalam hal jarak, sekolah-sekolah dasar yang ada sebagian besar dapat dicapai oleh warga desa. Beberapa sekolah sudah didirikan di wilayah-wilayah yang dianggap sulit, seperti di Desa Sapikerep, Sariwani, dan Ngepung walaupun dengan jumlah murid yang terbatas. Di wilayah-wilayah sulit tersebut kondisi cuaca turut mempengaruhi akses menuju sekolah. Di Desa Sapikerep dan Sariwani, jalanan terjal dan licin sangat sulit

⁵ Pelaksanaan sistem zonasi mengacu pada Permendikbud No. 14 tahun 2018 dengan radius zona yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

dilalui ketika hujan, sementara di Desa Ngepung terdapat sungai yang sulit dilewati ketika hujan deras karena tidak adanya jembatan yang menghubungkan sekolah dengan tempat tinggal para siswa.

“... enggak bisa konsentrasi [mengajar], semaksimal apapun gurunya [berusaha], karena [ada] 3 sungai besar, 2 sungai kecil... Nah, itu kemarin kami berusaha untuk namanya KBM [Kegiatan Belajar Mengajar] masih jam 10 waktu itu, [murid-murid] minta pulang, gimana enggak bisa terus-terusan diturutin, jam 11 minta pulang... Kalau [jalan] yang dari arah Desa Palangbesi ini memang mengkhawatirkan. Kalau hujannya enggak begitu [ditakutkan]. Orang tua itu enggak begitu [takut] kalau hujannya, khawatir ada pohon tumbang tidak, enggak begitu. Banjir itu yang bahaya...” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, tidak ada biaya yang dikenakan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kebijakan ini terbukti telah membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat. Faktor biaya tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat Kecamatan Sukapura untuk mengirim anak ke sekolah dasar. Meskipun tidak didapatkan data yang pasti, namun berdasarkan wawancara disampaikan bahwa hampir seluruh penduduk usia sekolah dasar di kecamatan ini sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah-sekolah dasar setempat.

Masalah biaya untuk mendapatkan pendidikan baru muncul ketika anak akan melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi. SMP belum tersedia di Desa Sapikerep, Wonokerto, Ngadas, Jetak, dan Wonotopo sehingga siswa lulusan SD harus memilih sekolah terdekat dengan desa atau rumah mereka untuk melanjutkan sekolah. Umumnya sekolah-sekolah tersebut masih bisa dicapai dengan berjalan kaki atau sepeda motor namun ada juga yang masih sulit mencapainya karena jarak yang jauh dan kondisi jalan yang sulit. Hambatan tersebut terutama dialami oleh anak-anak dari wilayah terpencil seperti Dusun Ngelosari di Desa Sapikerep. Sebagian besar siswa di dusun tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus SD. Siswa lulusan SD di Desa Wonokerto bisa melanjutkan SMP ke Desa Sukapura namun demikian biaya transportasi cukup besar, yaitu sekitar Rp 30.000/hari untuk ojek sehingga banyak juga yang kemudian memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ada yang ikut bekerja bersama orangtua dan ada juga yang masuk dalam kelompok kesenian seperti *kepancan*. Menurut salah seorang guru di Desa Wonokerto, dari 14 siswa lulusan SD di sekolahnya ada 5 siswa yang tidak melanjutkan SMP, dan di tahun sebelumnya dari 10 siswa lulusan SD ada 3 siswa yang tidak melanjutkan SMP.⁶

SMA hanya tersedia di Desa Ngadisari untuk anak-anak di wilayah atas serta di Desa Sukapura untuk anak-anak di wilayah bawah. Untuk mencapai sekolah tersebut, siswa dari beberapa desa harus menggunakan sepeda motor dengan biaya yang cukup besar. Hal ini masih menjadi hambatan bagi sebagian keluarga untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang lebih tinggi.

Secara khusus, sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas belum ada di Kecamatan Sukapura. Sekolah Luar Biasa (SLB) pernah didirikan di Desa Ngepung namun kemudian ditutup kemungkinan karena tidak banyak siswa yang mendaftar. Anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas yang ada di kecamatan ini umumnya tidak bersekolah karena sekolah yang tersedia cukup jauh jaraknya, yaitu di luar kecamatan, sehingga memerlukan biaya yang cukup banyak. Ada sebagian kecil anak berkebutuhan khusus yang ikut belajar di sekolah umum namun belum ada penanganan khusus yang diberikan sekolah. Sejauh ini hanya ada satu Guru Pendamping Khusus (GPK) yang tersedia di Kecamatan Sukapura, yaitu di SDN Sukapura 1. Namun demikian, belum tersedia pendataan yang menyeluruh terkait anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas.

⁶ Menurut para informan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan pendidikan SMP/SMA, terlebih lagi karena umumnya warga Tengger hanya memiliki satu anak.

2.5 PERSEPSI DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat Tengger dan masyarakat di Kecamatan Sukapura secara umum. Walaupun dengan tujuan yang beragam namun sudah muncul kesadaran di orangtua akan pentingnya pendidikan dasar.

“Sangat penting. Istilahnya kalau orang di sini itu supaya, apa, pendidikan itu ya itu sebagai, ya, nanti kan enggak bisa dibodohin orang kan gitu tujuannya.” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

“Soalnya gini, pandangan masyarakat yang ada disini, selama anak itu menempuh jenjang pendidikan, mereka harus berpendidikan, gitu. Nanti meskipun dia sudah sarjana ingin kembali ke rumah, dia bekerja, bertani, monggo silakan itu orang tuh punya jalan sendiri-sendiri. Jadi, enggak ditekankan kamu harus kuliah nanti harus apa, kamu harus bekerja di sini, tidak.” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

“Karena kan di sini tempat kita [Desa Ngadisari], ya merupakan tempat wisata juga. Jadi, banyak pengunjung dari luar daerah yang datang ke sini juga tamu mancanegara juga yang datang ke sini. Jadi, sedikit banyak kalau mereka sudah ini, pendidikannya mencapai SMA, sedikit banyak dia bertatap muka, berkomunikasi, ya, berpapasan dengan para wisatawan atau pengunjung itu mereka SDM-nya lebih setara gitu. Bisa memahami apa yang mereka harapkan.” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

“Orang tua atau wali murid di sini itu orangnya kebanyakan antusias untuk putra-putrinya itu sekolah yang lebih tinggi. Mengapa demikian, karena beliau-beliaunya itu melihat mungkin dengan secara pendidikan itu bisa mengubah nasib.” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

Orang tua menginginkan anak mereka mendapatkan pendidikan agar bisa mempunyai masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi orangtua saat ini. Tidak ada harapan spesifik bagi anak untuk bekerja di bidang tertentu. Namun demikian, secara khusus di Desa Ngadisari yang merupakan desa wisata, diskusi bersama orangtua menunjukkan bahwa mereka menginginkan anak memiliki pendidikan tinggi agar sumber daya manusia di desa tersebut meningkat dan bisa menunjang pariwisata. Orang tua berharap dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung maka anak-anak serta warga desa pada umumnya bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan setara bersama para wisatawan. Selain itu ada juga yang mengatakan pendidikan tinggi bisa menjadi cara untuk mengantisipasi agar anak tidak ‘dibodohi’ oleh orang lain. Bagi masyarakat yang beragama Hindu, keberadaan Dewi Saraswati sebagai panutan yang melambangkan dewi ilmu pengetahuan juga telah memberikan dorongan untuk memenuhi hak pendidikan anak.

Dari sisi anak, mereka sadar bahwa sekolah merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan sebagai bekal masa depan. Di dalam diskusi terfokus, anak-anak di kelas tinggi bahkan sudah bisa menyebutkan secara spesifik jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Hal yang menarik dalam diskusi di Desa Ngadisari adalah anak-anak umumnya memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang berhasil dan bisa kembali membangun desa. Contohnya, beberapa anak perempuan mengatakan ingin menjadi petani yang berhasil di desanya, yaitu petani yang bisa memiliki banyak uang, menanam dengan baik dan memiliki varietas tanaman yang unggul. Keinginan kembali ke desa ini merupakan cerminan dari ikatan yang kuat terhadap tanah kelahiran yang dibangun dalam adat masyarakat Tengger. Anak perempuan lainnya mengatakan ingin menjadi *chef* atau dokter. Sementara itu, anak laki-laki dalam diskusi yang sama mengatakan bahwa mereka ingin menjadi tentara, polisi atau dokter. Untuk mencapai-cita-cita tersebut, mereka juga mengatakan harus bersekolah hingga perguruan tinggi.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh orangtua untuk memastikan bahwa hak pendidikan anak dapat terpenuhi, mulai dari mendaftarkan anak ke sekolah, mengantarkan anak ke sekolah, sampai secara khusus menabung untuk pendidikan anak. Secara umum orangtua berharap anak mereka bisa bersekolah hingga

jenjang perguruan tinggi, namun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi maka ada juga yang hanya berani berharap hingga ke jenjang SMA.

Perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Terlepas dari adanya relasi gender yang setara dalam masyarakat Tengger, keberadaan anak tunggal yang umum pada masyarakat Tengger dan masyarakat Kecamatan Sukapura membuat mereka tidak perlu menentukan prioritas apakah anak laki-laki atau perempuan yang perlu mendapatkan pendidikan lebih tinggi.

Di Desa Ngadisari dengan mayoritas suku Tengger, pendidikan dalam keluarga tercermin dalam penerapan pola asuh anak. Menurut sebuah studi, pengasuhan yang dilakukan oleh masyarakat Tengger terhadap anak-anak mereka mengedepankan penyelesaian masalah yang harmonis (Suhartono & Hadi, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa nilai-nilai yang selalu diturunkan dalam pengasuhan anak diantaranya adalah kerjasama, kesabaran, ketaatan pada pihak yang lebih tua atau pemimpin, hidup damai berdampingan, menjaga keharmonisan, dan saling menghargai. Orangtua juga aktif mendampingi anak belajar di rumah terutama pada sore atau malam hari setelah pekerjaan di ladang selesai. Dari hasil wawancara ditemukan adanya kecenderungan pembagian jenis pelajaran, yaitu bapak mengajarkan matematika sementara ibu mengajarkan lainnya. Kecenderungan ini terjadi karena baik anak maupun orangtua merasa bapak lebih pandai di bidang matematika.

Di luar keluarga, sekolah menjadi lembaga pendidikan yang penting bagi masyarakat Tengger. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir banyak warga yang setelah menyelesaikan pendidikan tinggi kembali ke desa untuk mengembangkan pertanian ataupun pariwisata setempat. Selain karena ikatan adat, kembalinya mereka juga disebabkan karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di desa. Keberhasilan mengembangkan usaha di desa kemudian menjadikan mereka sebagai *role model* bagi generasi yang lebih muda.

Pentingnya pendidikan juga tercermin dari penghargaan yang diberikan warga dan pemerintah desa kepada para sarjana yang kembali ke desa. Sejak tahun 2010, atas inisiatif kepala desa saat itu yang dianggap warga memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan, diadakan upacara *mayu ilmu*. Upacara yang kemudian dilaksanakan lagi setelah 5 tahun ini merupakan *selamatan* bagi warga desa yang telah lulus perguruan tinggi dan diharapkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Upacara dilaksanakan di rumah adat di desa dengan mengumpulkan dan mendoakan para sarjana tersebut.

Selain berinisiatif melaksanakan upacara *mayu ilmu*, kepala desa yang sama juga mengeluarkan peraturan terkait pendidikan. Pada sekitar tahun 2010, untuk mencegah praktek pernikahan dini maka kepala desa mulai mensosialisasikan aturan dimana warga desa yang hendak menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, harus menyelesaikan pendidikan minimal SMA. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka desa tidak akan mengeluarkan dokumen pernikahan yang diperlukan. Dalam kasus terjadinya kehamilan di luar pernikahan maka dokumen pernikahan bisa dikeluarkan asalkan kedua pihak menandatangani surat pernyataan akan meneruskan sekolah melalui program Kejar Paket C yang telah disiapkan oleh pemerintah desa. Menurut kepala desa saat ini, aturan tersebut sebenarnya belum secara resmi dituliskan menjadi Peraturan Desa (Perdes) namun warga desa sangat patuh melaksanakan. Hal ini dimungkinkan jika dikaitkan kembali kepada nilai *catur guru bekti* yang telah menjadi norma sosial, dimana salah satunya adalah *bekti* kepada pemerintah, termasuk pemerintah desa.

Aturan serupa juga diterapkan di beberapa desa lainnya, seperti Desa Wonokerto, Sapikerep, Sariwani dan Ngepung. Namun demikian, di desa-desa tersebut persyaratan diturunkan menjadi minimal tingkat SMP dikarenakan pemerintah desa merasa warga belum siap untuk mengejar pendidikan hingga SMA dan layanan pendidikan yang tersedia di dalam atau desa terdekat juga belum ada hingga SMA. Di Desa Ngepung, aturan ini pernah dituliskan menjadi Perdes pada tahun 1995 tetapi karena banyak warga yang melanggar dengan melakukan *nikah siri* maka Perdes tersebut tidak diperhatikan kembali. Selain untuk mencegah pernikahan dini, aturan seperti ini juga diberlakukan untuk mencegah anak putus sekolah karena

banyaknya lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan di desa. Godaan untuk bekerja dan mendapatkan uang dikhawatirkan akan menurunkan motivasi anak untuk terus bersekolah.

“Anaknya kayak ini [perlu] ditekankan sampai anak itu harus selesai SMA, apa, karena ini lapangan pekerjaan [di desa] itu mudah. Jadi, orang yang di sini pun [contohnya] di Wonokerto, meskipun dia lulusannya cuma SMP, [asal] dia mau bekerja keras [maka bisa mendapat pekerjaan]. Maksudnya itu rata-rata [masyarakat] kan bertani, juga mau ngojek, jadi kadang dia tidak [berpikir], saya harus sampai kuliah, saya nanti bekerja ini, enggak, mereka [tidak berpikir] soalnya lapangan pekerjaan sudah ada di tempat kita. Makanya kalau kita dari pemerintah desa, dari upaya kita ada penekanan harus sampai lulus....” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

Berbeda dari Desa Ngadisari, kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah ada dalam masyarakat Desa Wonokerto namun menurut beberapa informan, partisipasi orangtua dirasa masih terbatas. Kesibukan orangtua dalam bekerja mengolah lahan sendiri maupun bekerja sebagai buruh tani ditengarai sebagai penyebab sulitnya meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar. Hal ini diperburuk dengan latar belakang pendidikan orangtua yang umumnya lulusan SD sehingga merasa kesulitan untuk memahami pelajaran dan mengajarkan anak. Permasalahan yang sama juga diungkapkan dalam pertemuan orangtua murid yang dilaksanakan Program INOVASI pada bulan Maret tahun 2019.

“Ya, masih kurang begitu... Kan sibuk, capai, dari pagi sampai sore di ladang. Pulang enggak bisa temani anak lagi... Peduli, ya, peduli, hanya partisipasinya aja yang masih kurang... Kemampuan orangtua kan juga berbeda jauh dari pelajaran anak...” (Tokoh Agama, Desa Wonokerto)

Kondisi yang hampir sama juga terjadi sebelumnya di Desa Sariwani. Dahulu, sekolah dianggap sebagai tempat menitipkan anak selama orangtua bekerja di ladang. Pada saat kembali ke rumah, orangtua tidak mendampingi anak belajar. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan juga partisipasi orangtua mulai meningkat ketika sekolah mulai memperbaiki diri dalam dua tahun terakhir dengan cara aktif berkomunikasi dan mengundang orangtua ke pertemuan sekolah, serta memberikan pemahaman satu per satu mulai dari kepala dusun sampai ke rumah-rumah orangtua. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kemudian ditunjukkan juga dengan diberikannya dukungan melalui komite dalam hal bantuan pembangunan toilet. Hal ini dimungkinkan mengingat kondisi ekonomi orangtua di desa ini yang cukup baik.

Berbeda halnya dengan kondisi di Desa Sapikerep, khususnya di Dusun Ngelosari dan Pusung Malang, dimana kesadaran akan pentingnya pendidikan masih cukup rendah. Menurut pengamatan para guru dan kepala sekolah, meski anak-anak terlihat antusias datang ke sekolah namun orangtua masih menganggap sekolah sebagai suatu hal yang merepotkan. Partisipasi orangtua dalam pertemuan sekolah sangat rendah, begitupun halnya dalam mendampingi anak di rumah. Selain kelelahan setelah bekerja dan ketidakmampuan mengikuti pelajaran anak karena latar belakang pendidikan yang rendah, tidak tersedianya penerangan yang memadai karena aliran listrik belum masuk menjadi alasan untuk tidak meminta atau menemani anak belajar di rumah. Anak-anak dikirim ke sekolah dasar agar ada kegiatan selama orangtua bekerja di ladang. Setelah lulus, selain karena tidak adanya sekolah menengah di dalam dusun, orangtua lebih memilih anaknya untuk ikut bekerja di ladang atau usaha ojek sehingga bisa memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Kondisi ini selaras dengan temuan sebuah studi kasus pada masyarakat Tengger di Kabupaten Lumajang yang menunjukkan tingginya angka putus sekolah dikarenakan kondisi ekonomi orangtua lemah, akses yang sulit menuju sekolah, dan persepsi orangtua yang menganggap anak tidak perlu bersekolah tinggi karena akan berakhir bekerja di ladang (Pertiwi, Ruja & Budijanto, 2019).

Kesadaran akan pentingnya pendidikan serta partisipasi orangtua dalam pendidikan anak di Desa Sukapura cukup beragam. Kondisi ekonomi keluarga serta latar belakang pendidikan orangtua dianggap sebagai penyebab perbedaan tersebut. Di dua dusun yang dianggap masih tertinggal, yaitu Dusun Curahwangi dan Watulumpang, kesadaran dan partisipasi tersebut masih cukup rendah. Anak-anak di dusun ini masih ada yang terkadang tidak hadir di sekolah karena harus membantu orangtua bekerja di ladang atau berjualan. Pada saat upacara *kasodo*, banyak anak yang membolos sekolah karena ikut berjualan souvenir atau lainnya

di sekitar kawah Gunung Bromo. Rendahnya latar belakang pendidikan orangtua tidak hanya berpengaruh terhadap kesadaran untuk mengirim anak ke sekolah namun juga kemampuan untuk mendampingi anak belajar.

Di Desa Ngepung, selain kemampuan ekonomi masyarakat serta akses terhadap lembaga pendidikan sudah cukup baik, peran pemerintah desa ikut mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Jika ada siswa yang tidak datang ke sekolah dalam jangka waktu lama dan terancam putus sekolah maka pihak sekolah akan melakukan pendekatan ke rumah. Ketika pihak sekolah tidak berhasil menarik kembali siswa ke sekolah maka pemerintah desa dapat ikut serta melakukan pendekatan kepada orangtua. Permasalahan pendidikan di sekolah dikomunikasikan juga kepada pemerintah desa. Anggapan bahwa tanpa pendidikan tinggi anak bisa tetap kerja dan menikah masih ada di dusun-dusun terpencil.

Persepsi dan pemenuhan hak pendidikan anak di Kecamatan Sukapura berbeda-beda. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut terutama dipengaruhi dari dalam keluarga, yaitu kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikan orangtua; dari sekolah, yaitu peran aktif kepala sekolah dan guru untuk melakukan pendekatan kepada orangtua siswa; serta dari masyarakat, yaitu sistem nilai yang diyakini masyarakat dan aturan serta upaya yang dilakukan pemerintah desa. Selain itu lokasi desa dan khususnya dusun juga ikut menentukan keterbukaan pandangan masyarakat. Masyarakat di wilayah-wilayah terpencil umumnya memiliki kesadaran pendidikan yang lebih rendah. Hal ini dibenarkan oleh pengawas dan para kepala sekolah dalam diskusi terfokus. Lebih lanjut, kepala sekolah dari Desa Sariwani dan Ngepung mengatakan bahwa adanya sentuhan dari pihak luar juga ikut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sejak adanya Program INOVASI yang kerap membawa tamu untuk berkunjung dan mengadakan acara di sekolah-sekolah pelaksana *pilot* PKR, terlihat bahwa perhatian masyarakat terhadap sekolah dan pendidikan pada umumnya meningkat. Tingkat kehadiran orangtua di acara-acara sekolah juga dirasa meningkat.

2.6 PROGRAM INOVASI YANG DIJALANKAN

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Sukapura banyak yang merupakan sekolah kecil dalam arti memiliki jumlah murid kurang dari 50 orang (Dopodikdasmen, 2018). Program INOVASI melaksanakan *pilot* Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam menyelenggarakan kelas rangkap yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah kecil di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Lebih lanjut, PKR juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi manajemen sekolah dengan memanfaatkan jumlah guru yang terbatas untuk melayani jumlah siswa yang relatif sedikit.

Dari pemerintah daerah, pembuatan nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) menjadi wujud dari komitmen pelaksanaan *pilot* yang kemudian dituangkan juga dalam bentuk alokasi anggaran kegiatan.

Pelaksanaan *pilot* PKR dimulai dengan pemilihan sekolah dan pembentukan gugus khusus *multigrade*. Ada delapan sekolah yang terpilih dengan pertimbangan jumlah siswa antara 40-50 orang per sekolah, yaitu: SDN Ngadisari I, SDN Ngadisari II, SDN Sukapura III, SDN Sukapura IV, SDN Sapikerep III, SDN Sariwani II, SDN Wonokerto II, dan SDI Nurul Hikmah As Sholeh. Seluruh sekolah tersebut kemudian dijadikan satu gugus khusus di luar gugus yang ada menjadi Gugus *Multigrade*. Selain gugus, dipilih juga beberapa Fasilitator Daerah (Fasda) yang merupakan gabungan dari guru, kepala sekolah, pengawas, serta *stakeholder* di tingkat kabupaten. Pembentukan gugus dan pengangkatan Fasda didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Modul PKR disusun bersama-sama antara perwakilan Program INOVASI dengan pemerintah daerah dan konsultan. Modul tersebut digunakan sebagai bahan pelatihan di kabupaten dan gugus yang telah ditunjuk, dan juga sebagai acuan pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) serta pendampingan implementasi PKR

di sekolah-sekolah pelaksana *pilot*. Seluruh Fasda menjalani *Training of Trainer* (ToT) dengan menggunakan modul yang sudah siap. ToT tersebut juga mengikutsertakan pengawas, guru dan kepala sekolah dari sekitar Kecamatan Sukapura yang memiliki jumlah peserta didik kecil dan berpotensi menerapkan pengajaran kelas rangkap, seperti Kecamatan Gading, Lumbang, Tiris, Kuripan, Krucil, dan Sumber.

Pelatihan PKR mencakup delapan unit, yaitu: (1) apa dan mengapa pembelajaran *multigrade*, (2) karakteristik pembelajaran *multigrade*, (3) pengelolaan *multigrade*, (4) *scanning curriculum* dan analisis kompetensi dasar, (5) merancang ide kegiatan pembelajaran *multigrade*, (6) strategi pembelajaran *multigrade*, (7) asesmen dan praktik pembelajaran kelas rangkap, dan (8) praktik mengajar *multigrade*. Di Kecamatan Sukapura, ToT ditindaklanjuti dengan pelatihan di Gugus *Multigrade* yang sudah dibentuk dengan frekuensi dua pertemuan dalam satu bulan. Fasda yang sudah dilatih dalam ToT bertugas untuk melatih guru-guru dari delapan sekolah terpilih dengan pendanaan dan pendampingan dari Program INOVASI. Setelah 8 topik selesai, maka gugus tersebut dapat melanjutkan pembahasan dan praktek melalui forum KKG dengan inisiatif dan pendanaan mandiri. Pada saat studi berlangsung, KKG mandiri tersebut sudah dilaksanakan selama satu kali. Walaupun belum rutin, implementasi PKR juga sudah dilaksanakan oleh delapan sekolah *pilot* dengan pendampingan dari Fasda. Selain itu sekolah berinisiatif melaksanakan KKG Mini yang dilaksanakan di masing-masing sekolah. Fokus bahasannya adalah kelanjutan dan pendalaman materi pelatihan.

Selain kepada tenaga pendidik, Program INOVASI juga melakukan penguatan kepada orang tua melalui kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di masing-masing sekolah pada bulan Maret 2019. Pertemuan yang melibatkan semua orang tua murid di tiap sekolah dalam satu kesempatan ini terbagi menjadi tiga sesi yang mencakup: perlindungan anak, pembagian kerja dalam keluarga dan pengasuhan anak, serta *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA). Sesi PDIA dimulai dengan menunjukkan fakta tingkat kehadiran anak di sekolah selama satu tahun dan dilanjutkan dengan mendiskusikan dampak, penyebab, serta solusi konkrit untuk meningkatkan tingkat kehadiran anak tersebut. Hasil dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran dan komitmen dari pihak orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah dan memastikan kehadiran anak di sekolah. Pada saat studi berlangsung, pertemuan orang tua seperti ini baru dilakukan di sebagian sekolah, yaitu di SDN Wonokerto II, SDN Sariwani II, SDN Ngadisari II, dan SDN Sukapura III.

3. KONTEKS MUNCULNYA PKR

Menurut Little (2004), Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) muncul karena adanya kebutuhan (*necessity*) atau berdasarkan pilihan (*choice*). Lebih lanjut dikatakan bahwa PKR yang muncul karena adanya kebutuhan dilatarbelakangi oleh kondisi siswa, seperti jumlah siswa yang sedikit di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, dan kondisi guru, misalnya jumlah guru yang terbatas atau tingkat kehadiran rendah sehingga seorang guru harus mengajar beberapa tingkatan kelas sekaligus. Sementara itu, PKR yang muncul karena pilihan dilakukan secara khusus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pedagogi. Misalnya, PKR yang dilaksanakan khusus bagi peserta didik beda kelas dengan kemampuan membaca yang sama. Di Indonesia, seperti juga terjadi di banyak negara, PKR lebih sering muncul karena adanya kebutuhan dan tidak direncanakan, terutama karena ketidakhadiran guru (Bank Dunia, 2011; Luschei & Zubaidah, 2011). Faktor-faktor ini juga terlihat dalam konteks munculnya PKR di Kecamatan Sukapura yang dipengaruhi oleh kondisi geografi, demografi, maupun ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.

3.1 JUMLAH SISWA

Salah satu faktor yang mendorong munculnya PKR adalah jumlah siswa yang sedikit di tiap sekolah sehingga dianggap kurang efisien jika masing-masing kelas dengan jumlah siswa kurang dari 20 orang

diajar tersendiri oleh satu guru. Dalam praktiknya, pelaksanaan PKR baru akan terjadi ketika jumlah murid yang sedikit diiringi dengan jumlah guru dan/atau ruang kelas yang juga terbatas. Tabel 7 menunjukkan jumlah siswa di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sukapura dalam tiga tahun terakhir. Mengacu pada Permendikbud No. 17 Tahun 2017 pasal 24 yang menyebutkan bahwa jumlah siswa minimal per rombongan untuk tingkat SD adalah 20 siswa maka masih banyak sekolah-sekolah tersebut yang belum memenuhi standar minimal atau disebut sebagai sekolah kecil, terutama delapan sekolah pelaksana *pilot* PKR Program INOVASI.

Tabel 7 Jumlah Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Sukapura

SD/MI	Jumlah Siswa		
	Oktober 2016	Oktober 2017	November 2018
SDN Sukapura I	196	189	191
SDN Sukapura II	117	126	128
SDN Sukapura III	54	51	51
SDN Sukapura IV	42	44	43
SDN Sapikerep I	87	86	86
SDN Sapikerep II	115	102	98
SDN Sapikerep III	45	44	40
SDN Jetak	104	111	111
SDN Wonokerto I	88	86	84
SDN Wonokerto II	64	62	61
SDN Ngadirejo	81	82	79
SDN Sariwani I	84	76	74
SDN Sariwani II	51	55	39
SDN Pakel I	80	80	80
SDN Pakel II	106	97	92
SDN Kedasih I	114	111	110
SDN Kedasih II	87	86	94
SDN Ngepung	183	160	175
SDN Ngadisari I	57	60	51
SDN Ngadisari II	41	39	39
SDI Nurul Hikmah As Sholeh	55	52	53
TOTAL	1.831	1.799	1.787

Sumber: Laporan Bulanan Pengawas

Sedikitnya jumlah siswa dapat terjadi karena berbagai hal. Di wilayah perkotaan atau wilayah dengan jumlah penduduk padat, kekurangan jumlah siswa bisa terjadi akibat persaingan antarsekolah dan juga keberadaan sekolah favorit. Sementara di wilayah yang cukup terpencil dengan faktor kepadatan penduduk rendah, kekurangan siswa hampir bisa dipastikan akan terjadi. Begitu juga halnya di Kecamatan Sukapura dengan tingkat kepadatan penduduk cenderung rendah, yaitu rata-rata 311 (tabel 3). Bahkan di Desa Ngepung tingkat kepadatannya hanya 155. Tingkat kepadatan tertinggi ada di Desa Sukapura, yaitu 601, namun demikian jika dilihat lebih jauh dalam tingkatan dusun maka terdapat dua dusun terpencil dengan jumlah penduduk masing-masing sekitar 11% dari total penduduk desa. Kedua dusun tersebut adalah Dusun Curahwangi dan Dusun Watulumpang.

Selain tingkat kepadatan, jumlah penduduk dengan usia sekolah dasar, khususnya kelas awal dengan rentang usia 5-9 tahun dan kelas atas serta SMP usia 10-14 tahun, juga menunjukkan angka yang rendah. Dalam tabel 8 terlihat bahwa jumlah anak usia sekolah di Desa Ngadisari dan Wonokerto adalah kurang dari 200 orang, sementara di kedua desa tersebut terdapat dua sekolah dasar. Dengan demikian, jumlah siswa di masing-masing sekolah menjadi sangat sedikit.

Tabel 8 Jumlah Anak Usia Sekolah Tiap Desa di Kecamatan Sukapura (2017)

Nama Desa	Jumlah Anak Usia 5-9 tahun	Jumlah Anak Usia 10-14 tahun
Ngadisari	94	111
Sariwani	153	116
Kedasih	174	153
Pakel	137	129
Ngepung	164	176
Sukapura	329	315
Sapikerep	218	220
Wonokerto	88	85
Ngadirejo	80	76
Ngadas	37	52
Jetak	40	42
Wonotoro	49	53
TOTAL	1.563	1.527

Sumber: Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018

Di Desa Sariwani, Sapikerep, Sukapura, dan Ngepung kondisinya sedikit berbeda. Walaupun jumlah anak usia sekolah sedikit lebih banyak dari Desa Ngadisari dan Wonokerto namun sebaran penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Seperti disampaikan di atas, Dusun Curahwangi dan Watulumpang di Desa Sukapura memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dikarenakan akses transportasi menuju kedua dusun masih dianggap sulit. Jalan konkrit menuju kedua dusun baru dibangun pada awal tahun 2019. Di Desa Sariwani, Sapikerep, dan Ngepung juga ada beberapa dusun dengan akses transportasi yang masih sangat sulit untuk dilalui sehingga tidak banyak penduduk yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut. Dalam kondisi seperti itu maka jumlah anak usia sekolah juga otomatis menjadi terbatas. Di lain sisi ada kewajiban bagi pemerintah untuk tetap memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warganya, termasuk salah satunya adalah membangun sekolah di lokasi-lokasi sulit semacam itu. Penggabungan sekolah untuk mengatasi kekurangan jumlah siswa tidak mungkin dilakukan mengingat jarak yang jauh dan medan yang cukup sulit antarsekolah yang ada. Kondisi semacam ini juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Probolinggo, seperti di Desa Sapih, Kecamatan Lumbang dan Desa Plaosan, Kecamatan Krucil.

Jumlah anak usia sekolah yang rendah di hampir seluruh desa di Kecamatan Sukapura dapat dilihat dari dua hal. Hal pertama terkait dengan adat-istiadat masyarakat Tengger. Upacara *selamatan* yang harus dilakukan dalam siklus hidup manusia serta berbagai hal lainnya dikatakan oleh sebagian besar informan sebagai beban yang cukup besar. Bagi orangtua, upacara yang menjadi tanggungan terberat mereka adalah *selamatan* kelahiran yang mencakup enam tahapan. Dalam setiap tahapan *selamatan* kelahiran tersebut sedikitnya orangtua harus menyiapkan uang Rp 50-100 juta. Di luar itu ada juga upacara sunatan dan pernikahan. Beban tersebut kemudian menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan jumlah anak yang ingin dimiliki. Hal kedua terkait dengan kondisi ekonomi keluarga, khususnya di luar desa adat. Biaya hidup yang tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan yang didapat orangtua sebagai buruh tani atau lainnya membuat mereka tidak ingin memiliki banyak anak. Semakin banyak anak yang dimiliki maka akan semakin besar tanggung jawab mereka untuk membiayai kehidupan anak-anak.

“Ya, ada upacaranya anak dari lahir sampai besar.... Banyak anak, banyak masalah, hahaha... ” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

“Karena kalau di sini melahirkan itu biayanya sangat mahal. Tidak terbebani itu karena sudah terencana, waktu sudah mau melahirkan, aku butuh duit iki-iki-iki [ini-ini-ini]. Anak setelah lahir, anak saya laki-laki, saya ngatur program lagi, saya harus 10 tahun lagi harus sudah punya ini-ini-ini untuk selamatan sunatan. Jadi

[punya anak 1 saja] bukan karena program pemerintah KB itu..” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

“Karena biaya kehidupan kita cukup besar. Mungkin bisa dipikir ke depan, itu pun kalau sudah punya anak 2 lebih dari itu pun biayanya akan lebih besar lagi. Sedangkan kadang punya, yang punya 1 saja ini sudah biayanya besar, apa lagi punya 2, ke depannya saya harus kerja keras lagi. Nah, seperti itu kan...” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

Selain jumlah siswa yang sedikit, khusus untuk wilayah-wilayah dengan kondisi ekonomi lemah maka partisipasi siswa di sekolah juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, anak-anak sangat rentan untuk ikut bekerja bersama orangtua, baik secara reguler ataupun di waktu-waktu tertentu seperti upacara *kasodo*, dan pada akhirnya juga menjadi rentan untuk putus sekolah. Sebagai gambaran, kerentanan semacam ini sudah menjadi suatu permasalahan umum di Desa Tandonsentul, Kecamatan Lumbang. Dalam diskusi bersama orangtua siswa dikatakan bahwa rata-rata penduduk di desa tersebut memiliki kondisi ekonomi yang sangat lemah sehingga banyak anak-anak yang diajak bekerja bersama orangtua. Anak-anak lulus SD banyak yang tidak melanjutkan ke SMP karena memilih untuk bekerja (biasanya anak laki-laki) atau menikah muda (biasanya anak perempuan). Jika kerentanan yang ada di desa-desa di Kecamatan Sukapura dibiarkan terus terjadi maka dikhawatirkan tingkat putus sekolah akan meningkat.

Kehadiran siswa di beberapa wilayah di Kecamatan Sukapura juga dipengaruhi oleh keikutsertaan anak dalam perayaan upacara adat, seperti menonton *kepangan* hingga larut malam di Desa Wonokerto, atau diajak orangtua untuk ikut ke pasar, namun jumlahnya sudah semakin menurun seiring dengan meningkatnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan. Di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit, ketidakhadiran seorang siswa akan sangat berpengaruh terhadap kehadiran siswa lainnya. Secara psikologis, siswa menjadi tidak bersemangat ketika jumlah teman belajar semakin sedikit dan terkadang orangtua pun menjadi memiliki alasan untuk membiarkan anak tidak datang ke sekolah.

“Muridnya cuma 3 kalau yang 2 sudah enggak masuk, sendiri ya kan kasihan... Pas rundingan sesuk [ketika berunding besok] sekolah, nek ora yo wes ora [kalau tidak mau sekolah, ya sudah tidak sekolah], haha...” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

Sedikitnya jumlah siswa di sekolah di wilayah-wilayah padat dapat terjadi karena tingginya persaingan antarsekolah untuk mendapatkan siswa. Kondisi ini tampak jelas terjadi di desa-desa di Kecamatan Lumbang dan Krucil. Maraknya pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang juga didorong oleh kentalnya kehidupan agama Islam di wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk suku Madura tersebut membuat SDN banyak kehilangan murid, seperti diakui oleh para guru dan kepala sekolah setempat. Belum adanya pengaturan jarak antarsekolah yang dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab SD dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penanggungjawab MI merupakan salah satu akar permasalahan. Selain itu, dilakukannya berbagai cara oleh pengurus MI untuk menarik siswa, misal pendekatan kepada keluarga secara personal, mengangkat guru-guru dari lingkungan setempat, menyediakan perlengkapan sekolah secara gratis, dan lainnya, dikatakan para informan telah membuat siswa yang mendaftar ke SDN semakin sedikit. Kecenderungan ini tidak ditemukan di Kecamatan Sukapura dikarenakan mayoritas warga yang beragam suku dan agama, adanya ikatan budaya yang kuat, serta penghormatan yang tinggi terhadap keberagaman. Pada saat studi ini dilakukan tidak ditemukan adanya sekolah yang berafiliasi kepada salah satu agama tertentu, kecuali SDI di Desa Ngepung yang berada di wilayah bawah dan berbatasan langsung dengan kecamatan lain. Dengan penduduk mayoritas suku Madura yang sangat menghormati lembaga agama (Rochana, 2012) maka ada kemungkinan pembangunan MI akan dilakukan juga di desa ini, dan permasalahan kekurangan murid karena persaingan antarsekolah juga akan dimungkinkan terjadi.

3.2 JUMLAH DAN KEHADIRAN GURU

Ketersediaan jumlah guru, terutama guru kelas, merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya praktek-praktek PKR. Ketika jumlah guru tidak mencukupi maka guru yang ada akan mendapatkan tanggungjawab untuk mengajar lebih dari satu kelas, baik di dalam satu ruang kelas yang sama ataupun di ruang kelas yang berbeda-beda. Menurut praktek umum, idealnya dalam setiap sekolah dasar terdapat 6 guru kelas, serta 1 guru agama dan 1 guru olahraga. Di dalam Permen Pendidikan Nasional No. 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal dikatakan bahwa sekolah dasar harus memiliki minimal satu orang guru untuk 32 siswa (satu rombongan belajar) dan minimal 6 guru per sekolah, serta minimal 4 guru per sekolah di daerah khusus. Dalam tabel 9 terlihat bahwa jumlah guru kelas yang ada di sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Sukapura dalam tiga tahun terakhir masih ada yang belum memenuhi kondisi ideal tersebut meskipun sudah ditambahkan dengan sejumlah guru honorer.

Tabel 9 Jumlah Guru Kelas di Kecamatan Sukapura

SD/MI	Oktober 2016		Oktober 2017		November 2018	
	PNS	GTT*	PNS	GTT	PNS	GTT
SDN Sukapura I	4	1	5	1	5	1
SDN Sukapura II	3	3	3	2	3	3
SDN Sukapura III	2	3	2	2	2	2
SDN Sukapura IV	2	3	2	2	2	3
SDN Sapikerep I	3	3	3	2	3	3
SDN Sapikerep II	5	2	4	2	4	2
SDN Sapikerep III	4	1	4	1	5	1
SDN Jetak	5	4	4	2	4	4
SDN Wonokerto I	3	3	3	2	3	2
SDN Wonokerto II	2	4	1	1	2	4
SDN Ngadirejo	2	3	1	1	1	4
SDN Sariwani I	2	5	2	2	2	4
SDN Sariwani II	1	3	2	0	2	3
SDN Pakel I	3	2	3	2	3	3
SDN Pakel II	4	3	3	2	3	3
SDN Kedasih I	3	2	4	0	4	1
SDN Kedasih II	2	3	3	0	3	3
SDN Ngepung	5	1	4	1	5	1
SDN Ngadisari I	2	6	2	3	2	5
SDN Ngadisari II	1	3	2	2	2	3
SDI Nurul Hikmah As Sholeh	0	6	0	6	0	6
*Data tidak dipisah antara guru kelas dan mata pelajaran						

Sumber: Laporan Bulanan Pengawas

Distribusi guru yang belum merata merupakan salah satu permasalahan yang muncul baik dalam konteks Kecamatan Sukapura maupun di tingkat kabupaten dan nasional. Sebagai contoh, di wilayah urban di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ditemukan bahwa rasio rata-rata jumlah guru terhadap siswa adalah 1:10 sementara di wilayah rural Kecamatan Nias Selatan, Sumatera Utara rasio rata-ratanya adalah 1:25 (Rosser & Fahmi, 2016). Selain itu ada juga anggapan yang berkembang bahwa guru-guru yang ditempatkan di wilayah terpencil adalah guru-guru yang karena berbagai hal masih memiliki kapasitas rendah.⁷ Di Kabupaten Probolinggo, kekurangan jumlah guru kelas pada akhir tahun 2018 mencapai 191 orang seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam pertemuan dengan tim INOVASI.

⁷ <https://www.jpnn.com/news/kompetensi-guru-di-wilayah-terpencil-masih-rendah>

Permasalahan ini diduga akan semakin tajam jika dilihat dari kecenderungan tingginya jumlah guru yang mendekati waktu pensiun dan rendahnya angka pengangkatan tenaga guru baru. Selain pensiun, mutasi guru dan kepala sekolah juga turut mempengaruhi dinamika ketersediaan jumlah guru di sekolah-sekolah. Mutasi guru tanpa adanya pengganti dalam waktu cepat menyebabkan kekosongan tenaga pengajar yang kemudian harus dirangkap oleh guru lainnya yang masih ada.

“Di Kabupaten Probolinggo ada masalah guru kelas kurang. Pemenuhan guru sulit, CPNS sulit, GTT dibatasi. Kemudian juga wilayah sulit, guru yang diangkat banyak yang berhenti.” (Pengawas Kecamatan Lumbang)

Di lain sisi, sebuah studi yang dilakukan Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa kebijakan mengalokasikan satu guru untuk satu kelas sebenarnya tidak efisien jika diberlakukan di sekolah-sekolah kecil karena dengan beban mengajar yang minim, pemerintah tetap harus membayarkan gaji mereka secara penuh. Dengan demikian dirasa perlu untuk mengatur kembali pendistribusian guru ke wilayah-wilayah di Indonesia sehingga sekolah-sekolah kecil mendapatkan guru yang lebih sedikit dan kelebihan tenaga guru bisa dialokasikan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan. Kondisi ini semakin mendorong dilaksanakannya PKR di sekolah-sekolah kecil.

Selain jumlah guru, kehadiran guru juga berpengaruh terhadap pelaksanaan PKR selama ini. Di wilayah-wilayah terpencil, berdasarkan hasil sebuah studi, ada sekitar 17% guru yang tidak hadir pada waktu sekolah (SMERU, 2000). Dari hasil diskusi bersama para guru dan juga kepala sekolah di Kecamatan Sukapura serta Kecamatan Lumbang dan Krucil diakui bahwa tingkat kehadiran guru dalam kenyataannya mendapatkan banyak tantangan. Jarak yang jauh antara lokasi sekolah dengan tempat tinggal guru merupakan tantangan terbesar untuk bisa hadir setiap hari dan tepat waktu. Ada sebagian guru yang kemudian memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke dekat sekolah namun ada juga yang tidak bisa melakukannya karena berbagai pertimbangan. Dalam beberapa kasus, guru terpaksa datang terlambat dan memulai kelas sekitar setengah sampai satu jam setelah jam sekolah dimulai. Ada juga yang memiliki kesepakatan bersama kepala sekolah dan guru-guru lainnya untuk tidak datang setiap hari. Pengecualian-pengecualian tersebut terutama diberikan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer. Tidak hanya pihak sekolah, orangtuapun seringkali memaklumi keterlambatan atau ketidakhadiran GTT tersebut dengan pertimbangan rendahnya bayaran yang diterima mereka dibandingkan dengan upaya yang harus dikeluarkan. Selain jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi untuk mencapai lokasi sekolah merupakan permasalahan lainnya. Sebagai gambaran, seorang guru di Desa Sapikerep harus menggunakan ojek setiap harinya dengan biaya Rp 50.000/hari, sementara honor GTT saat ini adalah Rp 800.000-1.000.000/bulan. Permasalahan ini semakin mencuat di sekolah-sekolah dengan jumlah guru GTT lebih banyak dibandingkan PNS, seperti di SDN Ngadisari I, SDN Wonokerto II, dan SDI Nurul Hikmah As Sholeh (tabel 9).

“Nah, saya selaku penanggung jawab, orang tua juga bagaimana kita sudah sama-sama tahu, itupun saya tidak bisa melarang, karena apa, gaji GTT tidak mencukupi. Nah, silakan [tidak masuk] enggak apa-apa, tetapi harus bisa atur. Lah, itu kebiasaan saya, setiap hari Jumat, Sabtu, atau Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah tinggal 2 atau 3 guru. Kadang saya merangkap kelas 1 sampai kelas 6, mau tak apakan anak-anak ini, oh, saya ajak Pramuka saja sudah di lapangan.” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

Pada sekolah-sekolah tertentu, medan yang berat serta cuaca yang buruk seringkali menghambat kehadiran para guru di sekolah. Jalanan yang terjal dan licin menuju sekolah di Desa Sapikerep misalnya, tidak dapat dilalui ketika hujan lebat sehingga guru-guru yang tidak tinggal di wilayah setempat akan sulit mencapai sekolah. Untuk mencari guru dari wilayah setempat juga cukup sulit dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada serta adanya pengaturan dari Dinas Pendidikan setempat untuk distribusi guru. Dalam banyak kasus, seperti diungkapkan oleh pengawas maupun kepala sekolah dan guru, distribusi guru yang dilakukan Dinas Pendidikan setempat seringkali dianggap tidak sesuai dikarenakan lokasi sekolah penugasan guru berada jauh dari domisili atau tempat tinggal mereka.

Jumlah siswa yang sedikit juga bisa berpengaruh terhadap tingkat kehadiran guru. Walaupun jumlah guru cukup, namun seperti dikatakan kepala sekolah di Desa Ngadisari, motivasi untuk hadir dan mengajar menjadi rendah karena tidak banyak siswa yang ada di dalam kelas. Dengan kondisi seperti itu maka kelas seringkali digabungkan dan guru mengajar secara bersama. Dalam studi Bank Dunia (2011) metode mengajar *team teaching* tersebut pada prakteknya berisiko besar menjadi *turn teaching* dimana guru bergantian mengajar, yaitu salah seorang guru bertanggung jawab memberikan materi sementara guru lainnya hanya mengamati atau bahkan tidak hadir.

Dinamika guru yang cukup tinggi serta berbagai masalah teknis yang menghambat kehadiran guru telah menjadi dorongan bagi pelaksanaan PKR di sekolah-sekolah di Kecamatan Sukapura dimana guru mengajar lebih dari satu kelas. Perangkapan kelas semakin dimungkinkan dengan adanya jumlah siswa yang sedikit. Namun demikian, terlihat pola bahwa perangkapan kelas cenderung dilakukan dengan lebih permanen pada sekolah-sekolah kecil dengan jumlah guru kelas minim, baik karena alokasi jumlah guru yang memang sedikit ataupun karena adanya pensiun dan mutasi, seperti terjadi di Kecamatan Sukapura. Perangkapan kelas pada sekolah-sekolah dengan jumlah guru relatif mencukupi namun terjadi kekurangan hanya di saat-saat guru tidak hadir dilakukan secara temporer berdasarkan kebutuhan sesaat, seperti banyak terjadi di Kecamatan Lumbang.

3.3 KETERSEDIAAN RUANG KELAS

Faktor lain yang mendorong dilaksanakannya PKR adalah ketersediaan ruang kelas yang minim sehingga tidak semua tingkatan memiliki ruang kelas sendiri. Dalam kondisi tersebut, siswa-siswa dari tingkatan yang berbeda kemudian dikumpulkan dalam satu ruang kelas dan diajarkan oleh satu guru secara bersama ataupun oleh guru yang berbeda-beda, tergantung ketersediaan jumlah guru. PKR semacam ini juga dimungkinkan ketika jumlah murid sedikit.

Perangkapan kelas yang didorong oleh kurangnya jumlah ruang kelas tidak banyak terjadi di Kecamatan Sukapura. Umumnya sekolah-sekolah di kecamatan ini memiliki ruang kelas yang cukup, kecuali di SDN Sariwani II dan SDN Sapikerep III yang hanya memiliki 5 ruang kelas. Satu dari lima ruang kelas tersebut digunakan untuk ruang kepala sekolah, guru dan perpustakaan. Penggabungan yang dilakukan adalah kelas 1 dan 2, kemudian kelas 3 dan 4, sementara kelas 5 dan 6 menggunakan ruang kelas masing-masing karena banyaknya kegiatan kelas 6 yang memerlukan ruangan sendiri.

Kekurangan ruang kelas menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan PKR di Kecamatan Krucil. Sistem pembangunan ruang kelas yang dilakukan secara bertahap terkadang belum mampu memenuhi kebutuhan untuk setiap tingkatan. Selain itu, kerusakan ruang kelas yang terjadi karena pemakaian yang sudah lama, bencana alam dan lainnya tidak selalu mendapat penanganan yang cepat sehingga pembelajaran antarkelas hanya bisa menggunakan ruang yang tersisa. Kondisi kekurangan ruang kelas semakin menguat dengan adanya persaingan yang tinggi untuk mendapatkan murid. Di Desa Seneng, Kecamatan Krucil, dari 4 ruang kelas yang tersedia, ada 1 ruang kelas yang kemudian 'dikorbankan' sebagai ruang belajar PAUD/TK. Tiga ruang yang tersedia sisanya digunakan dengan pengaturan satu ruang untuk kepala sekolah dan guru, satu ruang untuk pembelajaran kelas 1 dan 5, serta satu ruang lainnya untuk pembelajaran kelas 2, 3, 4 dan 6. Pembentukan PAUD/TK di sekolah tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya siswa yang akan mendaftar ke sekolah sebagai respon dari persaingan yang ketat dengan keberadaan beberapa MI di sekitar sekolah.

4. PRAKTEK PELAKSANAAN PKR

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) bukanlah suatu konsep yang baru. Pelaksanaan PKR sudah banyak dilakukan di negara-negara maju seperti ditunjukkan dalam beberapa studi, namun demikian pemahaman mengenai PKR masih sangat minim mengingat lebih banyak PKR yang dilakukan berdasarkan kebutuhan

dan tidak terencana, serta terjebak dalam kerangka pembelajaran tunggal atau monograde (Little, 2004, 2006; Bank Dunia, 2011).

Menurut Djalil (2019) PKR adalah “satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih, dalam saat yang sama, dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda” atau dengan makna yang sama PKR dilakukan dengan cara “seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda.” Definisi yang hampir sama juga disebutkan dalam modul ToT PKR yang diselenggarakan oleh Program INOVASI, yaitu “satu bentuk pembelajaran di mana seorang guru mengajar dua kelas atau lebih dalam satu ruang kelas. Model pembelajaran kelas rangkap ini melayani peserta didik dengan kemampuan yang berbeda.” Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa selain mengajar murid dari tingkatan kelas yang berbeda, PKR juga menjembatani murid-murid dengan kemampuan yang berbeda.

Little (2006) menunjukkan adanya pola pelaksanaan PKR yang sangat beragam, mulai dari satu guru mengajar dua kelas berurutan (misal kelas 1 dan 2) dalam ruang yang sama atau berbeda hingga menggabungkan siswa dari tingkatan yang berbeda (misal kelas 3 dan 6) dalam ruang kelas yang sama. Dalam prakteknya, PKR juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan peserta didik dari tingkat kelas yang berbeda tetapi dengan kemampuan yang sama dalam satu ruang kelas yang sama, diajar oleh guru yang sama dengan materi belajar yang sama pula. Misalnya beberapa peserta didik kelas 1 dan 2 atau 3 dengan kemampuan yang sama, yakni sama-sama kurang lancar membaca, diampu oleh satu guru kelas untuk mengajarkan membaca. Di Indonesia, praktek PKR sebenarnya sudah lama diterapkan oleh para guru mengaji dimana anak-anak yang berbeda usia dikumpulkan menjadi satu dan diajari membaca Iqra' I. Bagi peserta didik yang sudah lancar membaca pada Iqra' I bisa dilanjutkan ke Iqra' II dan bergabung dengan kelompok yang ada, dan seterusnya.

4.1 PEMAHAMAN MENGENAI PKR

Program Wajib Belajar 12 Tahun dicanangkan oleh pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan dasar seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dengan perhatian utama pada wilayah-wilayah yang belum tuntas melaksanakan Program Wajib Belajar 9 tahun. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, di dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan adalah meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru melalui pelaksanaan *multigrade*. Dengan demikian, *multigrade* atau PKR telah menjadi suatu konsep yang penting untuk dipahami dalam menyediakan layanan pendidikan dasar di Indonesia.

Pemahaman mengenai PKR di Kecamatan Sukapura berkembang seiring dengan diselenggarakannya pelatihan oleh Program INOVASI. Sebelumnya, meskipun praktik PKR sudah dilaksanakan namun seperti diakui oleh beberapa informan, mereka tidak mengetahui konsep PKR dan hanya menjalankan sesuai kebutuhan. Mengajar rangkap untuk beberapa kelas merupakan hal yang terjadi begitu saja dikarenakan kurangnya jumlah guru dan juga sedikitnya jumlah murid.

“Karena gak adanya guru, kurangnya guru sehingga kelas 1 dirangkap kelas 2. Kadang di kelas masing-masing hanya gurunya yang pindah-pindah, tapi kalau capek ya itu akhirnya ambil inisiatif, satu kelas digabung tapi dengan pembelajaran sendiri. Kadang gurunya berdiri di pintu tembusan. Rangkapnya karena terpaksa kekurangan guru saja waktu itu.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

“Ya tujuannya satu, materi tersampaikan. Yang kedua mungkin ya bisa mengelola dua kelas, pengelolaan kelas dua kelas ini hanya supaya anak-anak dapat belajar dan tidak ramai atau tidak bertengkar, seperti itu. Jadi dijaga dua-duanya.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

Pemahaman mengenai PKR yang dimiliki guru, kepala sekolah dan juga pengawas di Kecamatan Sukapura sebelum didapatkannya pelatihan sama dengan pemahaman guru, kepala sekolah dan juga pengawas di kecamatan lain yang saat ini belum mendapatkan pelatihan atau belum menerapkan hasil pelatihan, seperti

di Kecamatan Lumbang dan Krucil. Tidak hanya definisi, istilah PKR atau *multigrade* juga belum pernah didengar sebelumnya. Hanya sedikit guru yang mengatakan pernah mendapatkan pelatihan mengenai PKR namun tidak intensif dan tidak ada tindak lanjut untuk implementasinya. Pelatihan PKR yang pernah didapatkan di antaranya pada salah satu materi pembelajaran pendidikan guru di Universitas Terbuka, pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo di tahun 2008, dan pada salah satu materi dalam pelatihan Kelas Layanan Khusus (KLK) yang juga diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo kepada tenaga pengajar di beberapa sekolah tertentu. Selain itu ada juga beberapa guru yang mencari sendiri informasi mengenai PKR lewat situs internet. Dari sumber-sumber informasi tersebut, informan mengatakan mereka sekadar mengetahui bahwa pembelajaran bisa digabungkan antartingkat kelas namun tidak mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya.

“Ketika mendengar tentang *multigrade* bayangan saya itu menggabungkan dua kelas dan tentu tugas guru tambah lagi gitu.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

“Ya awalnya saya itu merasa bingung saja. Duh kelas siji campur kelas loro, kan gitu ya [duh kelas satu dicampur dengan kelas dua, begitu kan ya]. Ya opo, gitu [ya bagaimana, begitu]. Kalau kemarin-kemarin kita sudah, waktu kita pernah kekurangan guru kita juga sudah pernah menggabungkan kelas 1 dan kelas 2 dalam satu kelas. Tapi waktu itu pembelajarannya sendiri-sendiri. Kelas 1 yo dikasih tugas kelas 1, kelas 2 juga dikasih kelas 2. Jadi ada *multigrade* oh mosok koyok ngono yang sudah pernah saya lakukan, gitu. Awalnya pandangan kita seperti itu. Tapi setelah kita belajar ke sini, kita sudah paham dengan *multigrade*, oh ternyata yang dimaui *multigrade* seperti ini, gitu. Monggo ditambah [silahkan ditambah]...” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

Setelah mendapatkan pelatihan dari Program INOVASI, diakui oleh para informan di Kecamatan Sukapura telah terjadi pergeseran terhadap pemahaman mereka mengenai PKR. Walaupun masih terlihat adanya sedikit perbedaan pemahaman antar informan namun konsep yang dimaksud sudah mengarah pada satu hal yang sama, yaitu seorang guru mengajar untuk dua kelas atau lebih dalam satu ruang kelas yang sama dan waktu yang sama dengan materi pembelajaran yang sudah direncanakan dan disinergikan sebelumnya. Perbedaan pemahaman terlihat dalam hal arah keberlanjutan dari program PKR. Misalnya di salah satu sekolah di Desa Wonokerto diprediksi bahwa jumlah siswa dapat bertambah karena menampung anak-anak dari tiga desa, pemahaman apakah pelaksanaan PKR perlu dilanjutkan atau tidak dalam kondisi seperti itu masih berbeda-beda antarguru. Sebagian mengatakan masih perlu diteruskan karena beranggapan bahwa meski jumlah siswa bertambah namun tidak akan jauh berbeda, sementara sebagian lainnya mengatakan tidak bisa lagi dijalankan jika jumlah siswa terus bertambah karena luas ruang kelas yang tidak mencukupi. Respon tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akan keberlanjutan dan kemungkinan perubahan arah PKR untuk lebih didasarkan pada peningkatan kualitas pedagogi masih belum dimiliki semua guru dan kepala sekolah. Pemahaman yang ada masih terbentuk dalam konteks PKR yang dibutuhkan untuk menanggapi kondisi jumlah murid, guru dan juga ruang kelas yang terbatas.

“Kalau di desa-desa yang sudah banyak pendatang seperti itu, Desa Ngepung kan banyak pendatang, bisa, bisa itu nanti muridnya bertambah, enggak *multigrade* lagi. Tapi, kalau di sini kayaknya kemungkinan untuk membludak itu kecil.” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

“Kalau masalah metode *multigrade*-nya cocok sekali ketika muridnya cuma sedikit. Jadi kalau di SD Wonokerto 2 sebenarnya ini sedikit berbeda dengan murid yang ada sekarang. Kalau untuk kelas 3 dan kelas 4 oke, misalnya jumlahnya 23. Nah tahun ajaran berikutnya ini yang mungkin menjadi strategi kami. Misalkan kelas 1 jumlahnya 23. Misalkan tahun ajaran baru itu kelas 2-nya itu naik semua misalkan 34 itu kan jumlah murid kelas 2, jadi ruangnya yang enggak cukup. Kita bisa melaksanakan *multigrade* tapi ruangnya mungkin yang kendalanya di situ.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

Mengacu pada definisi yang disebutkan Djalil (2019) dan juga modul ToT PKR dari Program INOVASI, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman yang ada pada sebagian guru serta kepala sekolah masih terbatas pada mengajar murid dari tingkatan kelas yang berbeda, dan belum didasari pada kemampuan murid yang

berbeda. Idealnya, guru melakukan pemetaan kompetensi siswa masing-masing kelas sebelum mulai mengajar kelas rangkap untuk kemudian siswa dengan kompetensi yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok atau kelas pembelajaran. Meski belum dipisahkan menjadi satu kelas tersendiri, di SDN Ngadisari II dan Sukapura III sudah terlihat adanya pengelompokan tempat duduk siswa berdasarkan kompetensi mereka, misalnya siswa kelas 1 yang terlihat lebih cepat menangkap pelajaran dikelompokkan bersama siswa kelas 2 yang agak lambat menangkap pelajaran.

Keterbatasan pemahaman yang dimiliki para guru dan kepala sekolah tersebut kemudian terkait juga dengan respon terhadap keberadaan anak-anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Sejauh ini belum ada pemahaman bagaimana memanfaatkan metode ini untuk bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Dalam bayangan mereka, keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus akan menambah beban dikarenakan perlunya penanganan yang berbeda dari kelas yang sudah digabungkan. Pelatihan PKR yang diberikan juga belum menyentuh hal-hal tersebut.

Penyebaran informasi mengenai PKR banyak terjadi selama diskusi antarguru dan dengan kepala sekolah atau pengawas di sekolah masing-masing, ataupun selama pelaksanaan KKG *Multigrade*. Kegiatan KKG yang sebelumnya masih terbatas untuk persiapan akademis menjadi lebih aktif setelah diterapkannya PKR. Ada kebutuhan yang kemudian timbul dari masing-masing guru untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan PKR di sekolah masing-masing. Di luar pelatihan yang diberikan oleh Program INOVASI, pertemuan KKG *Multigrade* dengan peserta delapan sekolah *pilot* PKR sudah dilaksanakan secara mandiri selama dua kali untuk membahas persiapan pembelajaran kelas 1-2 dan kemudian kelas 3-4.

Keberadaan wadah semacam KKG ini menjadi dorongan tersendiri bagi para guru dan kepala sekolah untuk terus mengembangkan pelaksanaan PKR. Hal yang berbeda terjadi di kecamatan lain yang tidak mendapatkan pendampingan dari Program INOVASI. Beberapa pengawas, kepala sekolah, dan guru dari sekolah-sekolah kecil di kecamatan lain juga diikutsertakan dalam pelatihan PKR yang diselenggarakan Program INOVASI. Namun demikian, dalam perkembangannya belum ada sekolah yang benar-benar menerapkan PKR dengan konsep yang diajarkan. Menurut pengakuan beberapa informan, kendala yang mereka hadapi di antaranya adalah dimutasinya guru atau kepala sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan ke sekolah lain, belum adanya dukungan dari kepala sekolah atau pengawas untuk mendorong pelaksanaan PKR, serta tidak adanya forum untuk bertanya dan berdiskusi mengenai pelaksanaan PKR.

4.2 IMPLEMENTASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksanaan PKR di Kecamatan Sukapura sebelum diadakannya pelatihan oleh Program INOVASI sama dengan umumnya pelaksanaan PKR di Indonesia yang muncul karena kebutuhan. Dengan kondisi jumlah murid, guru, dan terkadang juga ruang kelas terbatas maka guru dituntut untuk bisa mengajar dua atau lebih tingkatan kelas secara bergantian. Tanpa rencana pembelajaran, seorang guru mengajar di satu kelas tertentu dengan memberikan penjelasan singkat dilanjutkan dengan tugas, sementara kelas lainnya menunggu. Setelah selesai di satu kelas, guru akan berpindah ke kelas lainnya dan melakukan hal yang sama. Tujuan utama pengajaran saat itu adalah materi bisa tersampaikan dan siswa tetap tertib atau tidak berisik dan berkeliraran ke luar ruang kelas. Bagaimana kemudian materi tersebut bisa diserap dengan baik oleh siswa dan juga pendampingan untuk tiap siswa bisa dilaksanakan tidak menjadi perhatian karena waktu dan tenaga guru sangat terbatas.

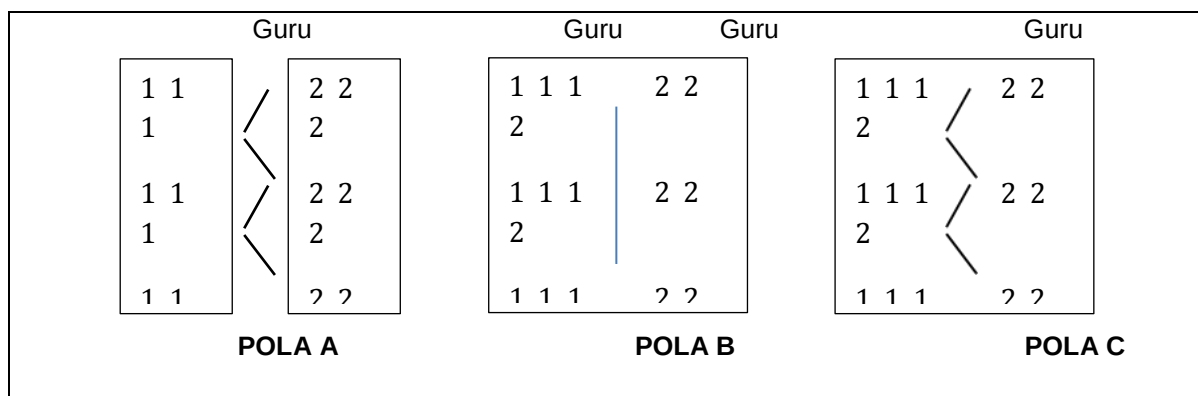
Untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan PKR karena jumlah guru yang terbatas namun jumlah murid dan ruang kelas tercukupi maka metode yang dilaksanakan umumnya adalah guru mengajar dua atau lebih tingkatan dalam ruang kelas yang berbeda-beda (Pola A, Gambar 2). Guru berpindah dari satu ruang kelas ke ruang kelas lainnya dan mengajarkan materi dengan tema yang juga berbeda-beda. Dalam proses tersebut, siswa harus menunggu atau mengerjakan tugas yang diberikan selama guru mengajar di kelas lain. Dalam beberapa kasus, untuk menutupi kekurangan jumlah guru kelas dan guru mata pelajaran yang

sangat minim maka kepala sekolah dan tenaga administratif sekolah juga diminta untuk mengajar. PKR dalam bentuk seperti ini bisa dilaksanakan secara permanen jika kondisi kekurangan guru cenderung stabil, atau dilaksanakan temporer untuk mengatasi masalah ketidakhadiran sementara guru, seperti karena sakit, pelatihan, atau cuaca buruk.

“Kami membuat *multigrade* sendiri. Dari guru sedikit, 2 kelas ini digabungkan. Tapi, tidak seperti yang sekarang, kalau sekarang itu 3 dan 4 itu bisa dijadikan 1 kelompok, kalau yang dulu tidak, kelas 3 sendiri, kelas 4 sendiri, seperti itu. Tapi, gurunya 1. Terus mengenai kelas, karena kelasnya itu sudah lengkap, jadi gurunya itu ada di tengah-tengah, hahaha. Ya, mulang [mengajar] kelas 4, ya mulang [mengajar] kelas 3, kadang-kadang bukan cuma itu kalau lagi kurang gurunya, ya, 3, 4, 5 ya guru 1... Kalau sini karena kelasnya memenuhi syarat, jadi bukan sekatan kelas tapi gurunya yang keliling, gitu, gurunya keliling.” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

Metode yang digunakan oleh PKR yang muncul akibat sedikitnya jumlah murid adalah menggabungkan murid dari dua atau lebih tingkatan dalam satu ruang kelas untuk alasan efisiensi. Metode yang sama juga dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan jumlah ruang kelas terbatas. Di dalam setiap ruang, siswa duduk berkelompok berdasarkan tingkatan kelasnya, misalnya kelompok siswa kelas 1 berkumpul di sisi kiri sementara kelompok kelas 2 berkumpul di sisi kanan. Untuk membatasi tiap kelompok tersebut ada sebagian guru yang kemudian memberi sekatan berupa papan atau kain. Materi yang diberikan antartingkatan berbeda-beda. Jika jumlah guru yang ada mencukupi maka setiap kelompok atau tingkatan kelas diajarkan oleh guru yang berbeda walaupun dalam satu ruang kelas yang sama (Pola B, Gambar 2). Setiap guru harus bisa saling mengontrol suara dan aktivitas sehingga tidak mengganggu kelompok kelas lainnya. Kasus seperti itu ditemui di Kecamatan Krucil namun tidak ditemui di Kecamatan Sukapura. Dengan jumlah guru yang terbatas di Kecamatan Sukapura, maka umumnya satu guru mengajar di satu ruang kelas yang berisi dua atau lebih tingkatan kelas (Pola C, Gambar 2). Walaupun berada di dalam satu ruang kelas namun metode pengajaran yang digunakan hampir sama dengan guru yang mengajar untuk beberapa tingkatan di ruang kelas yang berbeda-beda. Secara bergiliran guru akan menyampaikan materi singkat dan memberi tugas kepada masing-masing kelompok kelas. Belum ada rencana pembelajaran yang dibuat untuk mensinergikan proses belajar mengajar antartingkatan kelas. Pelaksanaan PKR dalam bentuk seperti ini cenderung lebih permanen.

Gambar 2 Ilustrasi Pelaksanaan PKR Sebelum Pelatihan

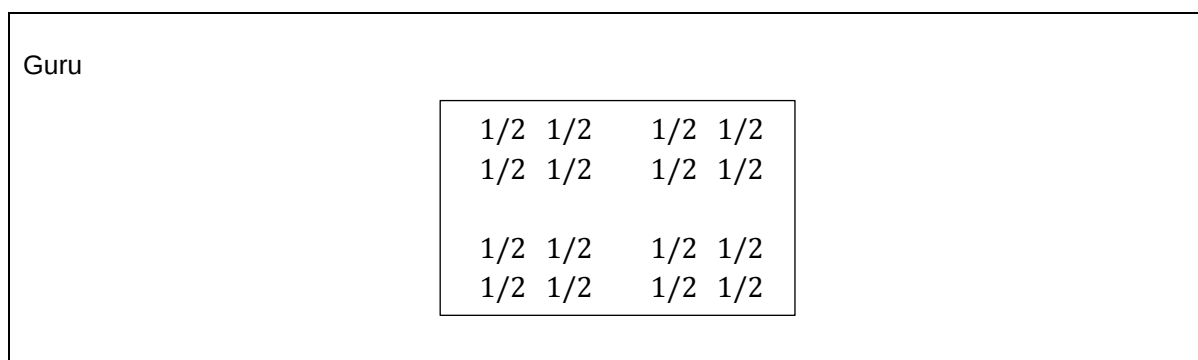


Pelaksanaan PKR selain menjadi salah satu strategi untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah guru, pada beberapa kasus juga digunakan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan GTT untuk hadir setiap hari. Seperti disampaikan sebelumnya, ada beberapa lokasi sekolah dengan jarak jauh dan medan yang sulit sehingga perlu upaya besar untuk mencapainya dan biaya transportasi yang diperlukan juga cukup tinggi, terlebih lagi jika dibandingkan dengan jumlah honor GTT yang diterima. Dilaksanakannya PKR berarti mengurangi kebutuhan akan jumlah guru. Dalam hal ini, untuk mengurangi beban GTT maka jumlah kehadiran mereka bisa dikurangi. Misalnya, satu orang GTT yang sebelumnya mengajar untuk kelas 1 setiap hari dan satu orang GTT lainnya juga mengajar setiap hari untuk kelas 2, setelah kelas 1 dan 2

digabungkan maka kedua orang GTT tersebut bisa membagi waktu dan tidak lagi harus datang setiap hari. Selain GTT, pembagian ini juga bisa dilakukan oleh guru yang memiliki hambatan untuk datang setiap hari ke sekolah karena jarak tempuh yang jauh dari domisili mereka ke sekolah ditambah dengan usia guru yang mendekati pensiun, seperti terjadi di Dusun Ngelosari, Desa Sapikerep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, khusus untuk sekolah-sekolah dengan jumlah GTT yang lebih banyak dan sekolah-sekolah dengan lokasi sulit diharapkan agar pelaksanaan PKR nantinya bisa tetap dilakukan oleh guru secara tandem, dan tidak dikurangi hanya menjadi satu orang guru untuk setiap kelas rangkap.

Praktik pelaksanaan PKR di Kecamatan Sukapura sudah mulai berubah setelah dilaksanakannya pelatihan oleh Program INOVASI. Saat ini dapat dilihat bahwa penggabungan siswa di dalam satu ruang kelas tidak lagi membedakan tingkatan kelas (Gambar 3). Siswa dari tingkatan yang berbeda duduk dalam kelompok yang sama. Guru mengajar dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya dan menggabungkan tema-tema yang sama untuk tingkatan kelas yang berbeda. Materi disampaikan secara bersama untuk kemudian siswa mengerjakan tugas dengan tuntutan kompetensi yang berbeda antartingkatan kelas. Dengan metode seperti ini maka tidak ada waktu terbuang bagi siswa selama menunggu guru selesai mengajar di kelas lain. Guru juga bisa memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada murid-muridnya. Hasil belajar siswa dan beberapa materi pembelajaran terlihat semarak menghias dinding kelas selain adanya pojok-pojok pembelajaran khusus, seperti literasi dan berbagai alat peraga.

Gambar 3 Ilustrasi Pelaksanaan PKR Setelah Pelatihan



Setelah praktik pelaksanaan PKR dijalankan selama beberapa bulan, mulai terlihat adanya respon positif dari para kepala sekolah dan guru, serta orangtua siswa dan siswa itu sendiri.

Kepala sekolah melihat bahwa PKR menuntut guru untuk dapat berinovasi dengan sarana prasarana yang terbatas. Ketergantungan mengajar dengan menggunakan buku teks dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang merupakan suatu tantangan tersendiri untuk ketersediaannya mulai hilang dikarenakan metode PKR memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan tema berdasarkan kondisi yang ada. Guru yang sebelumnya kurang termotivasi karena jumlah murid yang sedikit, saat ini terlihat lebih semangat. Proses pembelajaran terlihat lebih menarik dan hasil belajar siswa juga dapat dipajang sehingga bisa terus menimbulkan motivasi.⁸

Dari sisi guru, mereka umumnya sadar bahwa penerapan PKR masih dalam tahap awal sehingga belum banyak tantangan yang dihadapi. Namun demikian, diakui bahwa pelaksanaan PKR membantu mereka mengatasi masalah kekurangan jumlah dan ketidakhadiran guru. Kelebihan lain dari penerapan PKR yang dirasakan guru adalah timbulnya persaingan sesama guru untuk lebih baik lagi, misalnya dalam hal

⁸ Fokus perhatian INOVASI adalah peningkatan pembelajaran untuk literasi dan numerasi. Namun demikian, PKR adalah metode pembelajaran yang materi pelatihannya bisa memuat berbagai materi pembelajaran, baik meliputi literasi, numerasi maupun materi lainnya. Dalam konteks pelatihan literasi, pembuatan *Big Book* yang dilatihkan melalui modul literasi, juga bisa dilakukan di pelatihan PKR. Hal ini mengingat bahwa beberapa Kemampuan Dasar (KD) di kelas awal bisa diajarkan dengan memanfaatkan *Big Book*.

memberikan materi yang menarik serta menghias ruang kelas. Para guru dalam diskusi terfokus juga mengatakan bahwa dengan diterapkannya PKR maka anak-anak didik mereka terlihat lebih semangat, kreativitas meningkat dan partisipasi di sekolah dalam hal kehadiran dan keaktifan di kelas juga lebih tinggi.

“Lebih senang yang sekarang, karena kelasnya yang sekarang ramai” (Peserta FGD Siswa, Kecamatan Sukapura)

“Kalau untuk orangtua yang penting bisa anak ini tidak terlambat di sekolah. Jadi, gitu, meskipun kelas rangkapnya antara 1 dan 2, dia kan tetap [belajar] berbagai cara, daripada ini gurunya enggak masuk tapi tidak ada yang ngajar. Tapi, kalau ada program [PKR] seperti ini yang penting bisa berjalan, anak-anak pun selama ini yang kita amati juga bisa menerima dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah.” (Peserta FGD Orangtua Siswa, Kecamatan Sukapura)

Respon positif juga datang dari siswa dan orangtua. Para siswa mengatakan bahwa kelas mereka sekarang lebih ramai sehingga mereka menjadi lebih semangat datang ke sekolah. Walaupun terkadang ada teman-teman yang bertengkar dan kelas terasa lebih ribut namun gangguan tersebut tidak menjadi masalah besar. Hal ini dikarenakan murid-murid dari kelas yang digabung tersebut telah membuat kontrak belajar sebelum kelas digabungkan. Kontrak belajar ini dibuat secara bersama oleh peserta didik. Kontrak belajar ini berisi aturan-aturan atau tata tertib yang disepakati bersama. Para murid merasa senang karena bisa bertanya pelajaran yang tidak dimengerti kepada kakak kelas yang ada di kelompok atau ruang kelas bersama.

Diskusi bersama orangtua siswa di Desa Ngadisari menunjukkan bahwa orangtua saat ini senang dengan dilaksanakannya PKR karena jika ada guru yang tidak masuk maka pembelajaran bisa tetap berjalan normal. Selain itu, PKR juga dilihat mampu mengajarkan nilai kebersamaan, hidup harmonis dan rukun sesuai dengan ajaran masyarakat Tengger. PKR juga dapat meningkatkan daya saing anak. Anak-anak yang lebih kecil akan merasa termotivasi dan belajar dari anak-anak yang lebih besar, sementara anak-anak yang lebih besar akan belajar lebih giat karena tidak mau atau malu jika disusul kemampuannya oleh anak-anak yang lebih kecil. Namun demikian, ada sedikit kekhawatiran anak yang lebih kecil juga bisa menjadi minder ketika belajar bersama anak yang lebih besar. Dalam hal ini orangtua berharap guru bisa membaca situasi dan membantu meningkatkan motivasi para siswa.

Implementasi PKR di delapan sekolah pelaksana *pilot* di Kecamatan Sukapura sejauh ini masih dianggap bagian dari proses belajar atau ‘coba-coba’ sehingga belum diterapkan secara rutin. Belum ada pemetaan perangkat pembelajaran yang dibuat secara keseluruhan dalam satu tahun sehingga pelaksanaan PKR dirasa belum terstruktur dengan baik. Jadwal pelajaran antarkelas yang ingin digabungkan terkadang masih berbenturan dengan jadwal mata pelajaran, seperti agama dan olahraga. Pada awalnya, guru dengan didampingi kepala sekolah dan juga pengawas mengidentifikasi tema-tema pembelajaran yang bisa digabungkan antartingkatan kelas. Jika ada tema yang sesuai maka praktik PKR dilaksanakan dengan mengacu pada materi pelatihan yang sudah didapatkan. Dalam tahap praktik ini, setiap kelas diajarkan oleh dua guru yang secara bergantian memegang tanggung jawab memimpin proses pengajaran serta mendampingi murid. Para guru dan kepala sekolah tersebut menargetkan dapat membuat pemetaan perangkat pembelajaran lengkap untuk satu tahun pada tahun ajaran baru berikutnya sehingga PKR bisa dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan terencana. Dalam rangka merintis hal tersebut, beberapa sekolah seperti SDN Sukapura III dan SDN Sariwani II sudah mulai mengadakan KKG Mini di sekolah mereka.

Dukungan pengawas dan kepala sekolah dalam implementasi PKR sangat berpengaruh. Pada awalnya, tidak semua guru merasa siap untuk melaksanakan PKR karena dianggap mengubah hal-hal yang selama ini sudah berjalan. Contohnya dalam pembuatan rencana pembelajaran, sebelumnya tidak semua guru melakukan persiapan tersebut sehingga cukup sulit bagi mereka ketika dalam PKR diharapkan dapat melakukan *scan* kurikulum, menganalisis Kompetensi Dasar (KD), menyiapkan materi dan media pembelajaran, hingga membuat skenario pembelajaran. Selain itu juga ada anggapan di awal bahwa PKR akan menambah beban guru karena harus menggabungkan pembelajaran dua kelas. Tanpa adanya

pemahaman, dukungan dan dorongan dari kepala sekolah maupun pengawas maka motivasi guru bisa menurun.

Rendahnya motivasi kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan PKR terlihat di SDN Sapikerep III. Dengan lokasi geografis yang cukup sulit maka pendampingan dari pengawas tidak bisa diberikan secara intensif. Dari sisi program, hal ini sebenarnya sudah diantisipasi dengan mengangkat kepala sekolah tersebut sebagai fasilitator PKR. Diharapkan segala permasalahan penerapan PKR bisa langsung diatasi oleh kepala sekolah yang sekaligus sebagai fasilitatornya. Solusi lain, permasalahan yang belum bisa terpecahkan bisa dibawa ke forum KKG *Multigrade*. Dalam prakteknya hal tersebut tidak selalu berjalan, semangat kepala sekolah dan guru mengendur tanpa adanya kunjungan intensif pengawas. Kepala sekolah dan guru memiliki keraguan dan juga pertanyaan yang terkadang sulit untuk dicarikan jawabannya, terutama terkait dengan teknis pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap, seperti untuk menentukan media pembelajaran dan penyampaian materi di kelas. Pendampingan jarak jauh melalui telepon atau jaringan internet sulit dilakukan dikarenakan terbatasnya sinyal komunikasi di lokasi sekolah.

Keterbatasan kapasitas dan kreativitas guru dalam membuat rencana pembelajaran sesuai tuntutan PKR masih menjadi beban bagi sebagian besar guru. Pemetaan KD dan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bisa dilaksanakan bersama dalam pertemuan KKG *Multigrade*, namun penerjemahan dalam media pembelajaran dan produk siswa, serta teknis penyampaian materi di kelas tetap menjadi kekhawatiran bagi sebagian guru. Selain itu para guru juga masih mempertanyakan solusi penyampaian materi jika ada KD yang tidak ditemukan pasangannya. Beberapa guru mengaku masih belum memahami proses ujian dan penilaian bagi sekolah-sekolah yang menerapkan PKR dengan waktu penyampaian materi yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umumnya. Hal-hal teknis seperti ini memerlukan penjelasan dan pendampingan dari pengawas sekolah melalui forum KKG *Multigrade* yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Dalam hal ini, fungsi KKG *Multigrade* perlu lebih dioptimalkan dan terus dikawal oleh pengawas maupun fasilitator PKR yang ditunjuk dalam program.

“Ketika pembelajaran *multigrade* ini diterapkan sebenarnya ada beberapa perangkat pembelajaran. Seperti tadi itu memetakan dua KD. Itu membutuhkan pemikiran mungkin yang lebih. Jadi perangkat pembelajaran ini yang belum bisa seluruhnya kita selesaikan gitu. Mungkin mengenai step [langkah] pembelajaran aktif sudah paham. Tapi memetakan dua KD untuk dua atau lebih setelah perangkat, ini masih memetakan. Yang kedua, nanti mungkin promes [program semester]nya bagaimana, prota [program tahunan]nya bagaimana. Ini masih belum kita punya keseluruhan. Hanya beberapa saja yang masih kita selesaikan. Nanti kalau sudah di perangkatnya seperti itu ya mungkin langkahnya nanti kita mengadakan bersama-sama atau bagaimana. Tapi ini membutuhkan tenaga dan pemikiran luar biasa.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

Hal lain yang juga menjadi kekhawatiran para guru dalam implementasi PKR adalah pemberian materi yang tidak berulang di tahun berikutnya. Misalnya ketika di tahun ini kelas 1 dan 2 belajar dengan materi yang sama dan tugas berbeda, maka ketika siswa kelas 1 naik ke kelas 2 dan guru tetap menggunakan materi yang sama untuk pembelajaran kelas rangkap 1 dan 2 di tahun berikutnya, siswa tersebut akan mendapatkan materi yang sama dengan yang diterimanya ketika kelas 1, walaupun dengan tugas yang berbeda. Dengan demikian menjadi tantangan bagi guru untuk bisa mengemas cara penyampaian materi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Materi yang sudah dibuat untuk pengajaran kelas rangkap di satu tahun tidak bisa langsung digunakan begitu saja di tahun berikutnya agar tidak ada pengulangan bagi siswa yang masih dalam kelas rangkap yang sama meskipun sudah naik tingkat. Kekhawatiran tersebut masih menjadi pertanyaan bagi sebagian guru. Hal ini wajar terjadi mengingat pelatihan PKR baru saja selesai dilaksanakan dan pengalaman dalam penerapannya pun masih sangat terbatas. Kreativitas guru dalam membuat ide kegiatan pembelajaran memang akan sangat diperlukan sehingga selalu ada pengembangan ide pembelajaran setiap tahunnya dan siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang bervariasi, inovatif, dan menantang.

Dalam praktiknya sejauh ini, PKR juga sulit dilaksanakan untuk menggabungkan kelas 5 dan 6, khususnya di semester kedua. Walaupun banyak KD yang bersinggungan namun kesibukan kelas 6 untuk mempersiapkan ujian akhir menyebabkan sulit untuk menemukan waktu yang tepat. Di lain sisi, beberapa siswa kelas 6 merasa senang belajar bersama siswa kelas 5 dikarenakan banyak materi pemantapan ujian yang merupakan materi pembelajaran di kelas 5, khususnya matematika, sehingga ketika PKR diterapkan mereka bisa sekaligus belajar bersama siswa kelas 5. Menurut pengawas, penggabungan kelas 5 dan 6 masih sangat mungkin dilakukan. Materi belajar yang diujikan pada kelas 6 terdiri dari materi kelas 4, 5, dan 6. Dengan demikian, penggabungan kelas tersebut sebenarnya sangat membantu kelas 6 untuk mengingat kembali materi kelas 5. Materi yang bisa digabungkan adalah materi yang ada di kisi-kisi ujian sekolah kelas 6 dengan materi KD yang ada di kelas 5. Pengalaman menganalisis materi kisi-kisi ujian sekolah dengan materi KD kelas 5, pada saat studi dilakukan, memang belum pernah dilakukan oleh para guru.

Dalam hal administratif, ada kekhawatiran yang diungkapkan sebagian guru dan juga kepala sekolah terkait dengan pengisian Dapodik. Total jam mengajar guru yang dalam pelaksanaan PKR bertanggung jawab lebih dari satu kelas akan melebihi jam mengajar maksimal yang ditetapkan. Pada saat studi ini dilakukan belum ada permasalahan yang muncul karena PKR masih belum dilaksanakan maksimal sehingga guru memasukkan data sesuai tugasnya selama ini, namun kekhawatiran muncul jika di tahun mendatang PKR diterapkan secara penuh.

Dari sisi kepala sekolah, kekhawatiran muncul untuk dapat memastikan bahwa hasil ujian nasional siswa di tahun mendatang bisa lebih baik, terutama jika dibandingkan dengan sekolah lain yang tidak menerapkan PKR. Setelah mendapat sorotan dari berbagai pihak, ada beban yang muncul pada kepala sekolah untuk menunjukkan bahwa sekolah mereka bisa menjadi lebih baik.

4.3 DUKUNGAN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH

Pemerintah daerah telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan *pilot* PKR di Kecamatan Sukapura dan juga keberlanjutan dari pelaksanaan *pilot* tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menjadi pemangku kepentingan utama yang mempunyai otoritas mulai dari perancangan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan pendidikan, termasuk PKR di wilayahnya. Selain Dinas Pendidikan, pemangku kepentingan yang juga terkait dalam hal ini adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten. Kantor pemerintah di tingkat kabupaten lainnya, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) belum secara khusus memiliki kegiatan terkait pendidikan dasar namun terlihat adanya potensi kegiatan yang bisa disinergikan untuk mendukung keberhasilan PKR. Pemerintah kecamatan dan desa juga memiliki peran penting dalam hal ini, namun kapasitas dan kemauan untuk terlibat perlu dikaji lebih dalam.

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berkeadilan, sejahtera dan berdaya saing. Melalui Dinas Pendidikan, tujuan tersebut akan dicapai dengan cara meningkatkan indeks pendidikan yang mencakup akses dan mutu pendidikan. Penentuan program pendidikan yang tepat dilakukan melalui analisa masalah, salah satunya dengan menggunakan aplikasi SEPAKAT⁹ yang diinisiasi oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebagai contoh, dengan adanya permasalahan jarak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal dan tingkat kehadiran murid yang rendah, solusi yang diberikan melalui aplikasi tersebut adalah menyediakan bantuan transportasi untuk para siswa yang kemudian diterjemahkan menjadi program Ojek untuk Anak Sekolah (OASE). Program OASE mulai dilaksanakan oleh Pemkab Probolinggo sejak awal

⁹ SEPAKAT atau Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasarkan bukti (<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sepakat-mempercepat-penanggulangan-kemiskinan-tepat-sasaran-dan-guna/>)

tahun 2019 dan diberikan kepada 400 tukang ojek siswa yang tersebar di 12 kecamatan. Di luar program tersebut, untuk merespon permasalahan kekurangan jumlah guru dan semakin meningkatnya jumlah GTT, Pemkab Probolinggo memberlakukan aturan pendidikan minimal sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk menjadi GTT. Selanjutnya, GTT yang terpilih diangkat melalui SK Bupati sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, honor untuk GTT juga ditetapkan menjadi Rp 1 juta/bulan ditambah tunjangan tenaga kerja dan kesehatan. Pembayaran honor GTT tersebut dimungkinkan dengan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ditambahkan juga alokasi dana dari Anggaran Pembangunan Daerah (APBD).

Program PKR diterima dengan cukup baik oleh Dinas Pendidikan maupun Bappeda Kabupaten Probolinggo karena dianggap sejalan dengan RPJMD. Program ini juga dianggap mampu menjawab permasalahan kekurangan jumlah guru yang ada di kabupaten serta mampu meningkatkan akses serta mutu pendidikan secara umum. Dengan demikian pelaksanaan PKR akan dapat melengkapi program-program pendidikan yang sudah ada.

“...artinya kebutuhan [guru]nya banyak oleh karena itu maka kemudian, *multigrade* menjadi salah satu saya bilang, *multigrade* menjadi salah satu solusi terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang ada di kabupaten Probolinggo ya. Jadi mulai dari keterbatasan jumlah siswa, setiap rombel itu kurang dari 20 siswa, disamping jumlah gurunya juga terbatas, maka kemudian *multigrade* yang diinisiasi oleh teman-teman INOVASI ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan itu dan kita bersyukur sebenarnya *multigrade* ini bisa bersikap alamiah, ya kan tetapi tidak akan berjalan efektif dan optimal ketika *multigrade* dilaksanakan secara alamiah. Artinya apa? guru tidak memiliki bekal untuk melakukan pemetaan kompetensi dasar, guru tidak memiliki cukup apa, keterampilan untuk melaksanakan metode pembelajaran dengan strategi tertentu misalnya, oleh karena itu maka hadirnya INOVASI bersama pemerintah dalam memberikan pelayanan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa dan ini menjawab salah satu persoalan yang ada di kabupaten Probolinggo.”(Staf Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo)

Sebagai wujud dari penerimaan tersebut, Pemkab telah memberikan dukungan dalam bentuk alokasi pendanaan tahun anggaran 2018 bekerjasama dengan Program INOVASI, dan tahun anggaran 2019 untuk pengembangan di kecamatan-kecamatan lainnya. Selain itu Kepala Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan SK terkait dengan sekolah-sekolah serta Fasda yang terlibat dalam program PKR. Dalam hal ini, mutasi untuk guru dan kepala sekolah yang terlibat bisa diminimalisir selama kegiatan *pilot* berjalan. Kebijakan mengenai tata pelaksanaan PKR diharapkan dapat dikeluarkan juga oleh Bupati sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih besar.¹⁰ Terkait dengan pengembangan PKR di kecamatan lainnya, kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan mencakup pelatihan untuk para guru dengan memanfaatkan Fasda dari Program INOVASI sebagai narasumber dan pengaktifan kembali KKG sebagai wadah untuk berbagi informasi serta pembelajaran baik. Selain itu akan diusahakan juga adanya pemberian insentif atau tunjangan kepada guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah yang dianggap sulit dengan identifikasi wilayah yang akan dilakukan kemudian oleh Dinas Pendidikan.

Di luar itu, baik Bappeda maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan penyesuaian sistem Dapodik bagi guru-guru yang menerapkan PKR. Sistem penghitungan jam mengajar dan peserta didik diharapkan bisa mengakomodir kondisi yang ada sehingga sertifikasi untuk guru-guru tersebut bisa tetap berjalan dan pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka.

Di tingkat kecamatan dan desa, dukungan yang diberikan bisa dilihat dari adanya perhatian besar terhadap masalah pendidikan. Pengawas terlibat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) di tingkat desa dan kemudian juga di kecamatan. Camat berkomunikasi secara aktif kepada pengawas

pendidikan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mendiskusikan bersama satuan tugas pendidikan dan kemudian menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Sebagian pemerintah desa sudah secara aktif memantau kondisi pendidikan didesanya dan juga mengeluarkan peraturan, baik tertulis ataupun tidak, yang mendorong warga untuk memiliki pendidikan tinggi.

Selain fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, keberhasilan PKR juga perlu didukung oleh penerimaan dari orangtua dan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, Dinas PMD mengindikasikan adanya peluang untuk bisa memanfaatkan dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud seharusnya termasuk juga peningkatan keasadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan serta peningkatan kapasitas mereka untuk mendampingi anak belajar di rumah. Peluang tersebut juga disambut baik oleh Dinas PPKB yang memiliki program Kampung KB dan Pusat Pembelajaran Keluarga yang salah satu kegiatannya adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada orangtua terkait dengan hak anak. Pelaksanaan program tersebut saat ini baru bisa menjangkau 50 desa di seluruh Kabupaten Probolinggo dikarenakan terbatasnya anggaran yang ada. Jika dana desa bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesadaran dan kapasitas orangtua maka diharapkan pada akhirnya akan dapat mendukung pemenuhan hak anak. Namun demikian, mengingat ketidakseragaman kapasitas sumber daya manusia di desa, maka perlu adanya fasilitasi dalam penyusunan pengajuan anggaran di desa. Selain itu, menurut Dinas PMD setempat, akan lebih baik jika komponen peningkatan kesadaran dan kapasitas orangtua untuk pendidikan ini bisa dimasukkan dan tertulis secara jelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) sehingga tidak ada keraguan untuk penggunaannya. Untuk itu, komponen harus disesuaikan dengan tujuan dan indikator yang ingin dicapai dari pembangunan desa, sesuai dengan yang dituliskan dalam peraturan yang ada.

5. KONTEKS KEBERLANJUTAN PKR

Tujuan pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) sebaiknya tidak berhenti pada permasalahan kekurangan siswa, guru, atau ruang kelas. Meskipun muncul dalam konteks kebutuhan tersebut, pelaksanaan PKR akan lebih berkelanjutan jika didasari pada kebutuhan akan peningkatan kualitas pedagogi. Dalam hal ini PKR menjadi suatu metode yang dapat ditawarkan untuk menghadapi kondisi dan kemampuan murid yang berbeda-beda sehingga mampu mendukung penyediaan akses pendidikan yang lebih luas. Little (2001) mengatakan bahwa pembelajaran kelas tunggal atau *monograde* pada dasarnya terdiri dari berbagai siswa dengan kemampuan, minat, latar belakang dan usia yang bervariasi, dan karenanya PKR akan menjadi strategi pembelajaran yang diperlukan oleh semua guru di setiap kelas.

Praktik pelaksanaan PKR di Kecamatan Sukapura telah menunjukkan adanya respon yang cukup baik dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Ada beberapa faktor yang memungkinkan PKR dapat berjalan, namun demikian juga masih ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian sehingga PKR dapat berkembang sesuai dengan arah yang tepat. Di luar itu perlu dilihat juga dinamika yang ada pada faktor-faktor pendorong munculnya PKR untuk memahami potensi keberlanjutan dari pelaksanaan Program PKR di Kecamatan Sukapura, dan Kabupaten Probolinggo pada umumnya.

5.1 DINAMIKA FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PKR

Dalam studi ini ditemukan bahwa faktor pendorong munculnya PKR di Kecamatan Sukapura dan Kabupaten Probolinggo pada umumnya adalah kurangnya jumlah murid, guru, dan ruang kelas jika dibandingkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dinamika faktor-faktor tersebut diduga akan mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan PKR yang sudah berlangsung. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana dinamika yang terjadi dan kecenderungannya di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan data dari laporan bulanan pengawas Kecamatan Sukapura, jumlah siswa di sekolah dasar dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun (tabel 10), baik di sekolah negeri maupun swasta, seiring dengan menurunnya jumlah penduduk di desa-desa. Penurunan jumlah siswa juga terjadi di Kecamatan Lumbang dan Krucil. Seperti disebutkan sebelumnya, faktor budaya dengan tuntutan biaya upacara adat yang dianggap beban dan juga kondisi ekonomi lemah yang menyebabkan tingginya biaya hidup dibandingkan dengan pendapatan menjadi alasan bagi para keluarga untuk memiliki sedikit anak. Ketika jumlah penduduk usia sekolah berkurang maka jumlah siswa yang mendaftar di sekolah juga cenderung menurun. Dengan mempertimbangkan data yang ada dalam tiga tahun terakhir dan belum ditemukannya hal-hal yang bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap jumlah anak yang ingin dimiliki maka bisa diprediksi bahwa faktor pendorong PKR dalam hal sedikitnya jumlah siswa di Kecamatan Sukapura akan terus ada.

Tabel 10 Jumlah Siswa dalam Tiga Tahun Terakhir

Kecamatan	Jumlah Siswa		
	2016	2017	2018
Sukapura	1.831	1.799	1.787
Lumbang	NA	2.490	2.437
Krucil	4.117	4.107	3.869

Sumber: Laporan Bulanan Pengawas

Penggabungan dua atau lebih sekolah menjadi satu (*merger*) kerap menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sekolah kecil agar lebih efisien. Namun demikian, jarak dan medan menuju sekolah perlu menjadi pertimbangan khusus dalam konteks Kecamatan Sukapura. Dengan melihat kembali tujuan awal pemerintah membangun sekolah-sekolah di tempat terpencil atau wilayah sulit maka kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan sekolah menjadi sangat kecil.

Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan murid baru turut mempengaruhi kecenderungan stagnannya jumlah siswa dalam sekolah-sekolah kecil. Di Desa Sariwani, keberadaan program PKR telah menjadi sorotan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap sekolah. Dilaksanakannya pembangunan jalan menuju sekolah membuat akses dari dusun-dusun sekitar menjadi lebih terbuka. Jika kondisi ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan jika suatu saat sekolah tersebut mendapatkan tambahan murid secara signifikan. Namun demikian, adanya sistem zonasi yang membatasi penerimaan siswa baru hanya dari wilayah sekitar dengan radius yang ditentukan oleh Pemda setempat diduga akan dapat mencegah hal tersebut terjadi.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada faktor kedua, yaitu terbatasnya jumlah guru yang tersedia. Meskipun tidak menurun, jumlah guru di ketiga kecamatan cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir (tabel 11). Penurunan dan peningkatan jumlah guru hanya berkisar kurang dari 5%. Kekurangan jumlah guru telah menjadi persoalan di tingkat kabupaten maupun nasional.¹¹ Dengan mempertimbangkan jumlah guru yang akan pensiun serta rekrutmen tenaga guru baru yang sangat minim, maka permasalahan kekurangan guru diperkirakan masih akan terus ada dalam beberapa tahun ke depan. Dalam kondisi seperti ini, PKR akan semakin dibutuhkan dan menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah kekurangan guru.

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/04/13021251/mendikbud-sekolah-negeri-kekurangan-guru-pns-988133-orang>

Tabel 11 Jumlah Guru dalam Tiga Tahun Terakhir

Kecamatan	Jumlah Guru (PNS dan GTT)		
	2016	2017	2018
Sukapura	149	27	164
Lumbang	NA	148	140
Krucil	379	369	386

Sumber: Laporan Bulanan Pengawas

“Lima tahun ke depan kita akan kekurangan lebih dari 1.000 guru, lima tahun ke depan ya, lima tahun ke depan. Tahun ini ada 100 lebih guru yang pensiun, jadi lima tahun ke depan 1.000 lebih lah guru kita ini akan pensiun sementara proses rekrutment CPNS begitu terbatas, kuotanya terbatas, kita sempat moratorium selama 10 tahun kurang lebih ya..” (Staf Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo)

Dari ketiga faktor pendorong dilaksanakannya PKR, perubahan yang sepertinya paling mungkin terjadi adalah penambahan ruang kelas. Kekurangan ruang kelas bisa terjadi karena belum pernah dibangun atau sudah dibangun namun mengalami kerusakan. Usulan penambahan atau perbaikan ruang kelas bisa diajukan kepada Dinas Pendidikan setempat untuk kemudian dikaji urgensinya. Namun demikian, menurut Dinas Pendidikan setempat, pembangunan ruang kelas dilakukan dengan mempertimbangkan rasio terhadap jumlah murid, yaitu 1 ruang kelas untuk 20 siswa. Lebih lanjut, dikatakan bahwa akan menjadi sangat tidak efisien jika dibangun misalnya 6 ruang kelas dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang dalam satu sekolah. Dengan demikian penambahan ruang kelas hanya dapat terjadi jika kekurangan ruang kelas menjadi faktor tunggal dilaksanakannya PKR tanpa dibarengi dengan kekurangan jumlah siswa. Dalam praktek PKR, kondisi ini jarang sekali terjadi sehingga kemungkinan penambahan ruang kelas menjadi kecil.

5.2 FAKTOR PENDUKUNG KEBERLANJUTAN PKR

Keberlanjutan PKR dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa faktor pendukung yang ada. Dalam studi ini ditemukan bahwa faktor pendukung tersebut mencakup tersedianya sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik, metodologi pembelajaran yang tepat, kebijakan yang mendukung, serta partisipasi aktif orang tua dan masyarakat setempat.

Sumber daya manusia terpenting dalam pelaksanaan PKR adalah guru. Ketika guru memiliki pemahaman, keterampilan dan kreativitas yang cukup baik dalam menjalankan PKR maka keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan program akan dapat terlihat. Kapasitas guru tersebut dapat dibangun melalui pemberian pelatihan yang intensif diikuti dengan praktek lapangan. Pelatihan PKR yang diberikan oleh Program INOVASI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat terbukti telah membuka wawasan para guru terhadap alternatif pembelajaran kelas rangkap, serta secara umum mengubah paradigma mengajar guru dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mempersiapkan serta melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan *pilot* PKR, pelatihan diberikan kepada semua guru dalam satu sekolah, kepala sekolah dan pengawas sehingga tercipta pemahaman yang sama. Adanya kesamaan pemahaman ini penting untuk dapat terciptanya sistem dukungan yang diperlukan dalam implementasi PKR di sekolah masing-masing. Tanpa adanya sistem dukungan tersebut PKR akan sulit terlaksana, seperti yang terjadi di Kecamatan Krucil.

“Belum ada sosialisasinya ke teman-teman lain.. Ya, sudah, sudah lapor ke korwil [kordinator wilayah] tapi belum ada tindak lanjut. Ya enggak bisa.. Enggak ada perintah juga, jadi enggak bisa mulai itu [PKR]...” (Pengawas Kecamatan Krucil)

Tidak berhenti pada pelatihan, pendampingan secara intensif kepada guru dan sekolah pelaksana PKR juga perlu dilakukan untuk dapat terus mengembangkan kapasitas guru. Dalam pelaksanaan PKR di Kecamatan Sukapura, pendamping memiliki peran penting bagi para guru dan kepala sekolah untuk dapat berkonsultasi

mengenai berbagai permasalahan yang ditemukan seiring dengan dilaksanakannya PKR. Pendampingan tidak terbatas dalam bentuk kesiapan materi dan teknis pembelajaran, contohnya pengawas atau Fasda menjadi narasumber dalam pelatihan dan diskusi, namun juga dorongan serta fasilitasi teknis, misalnya menggerakkan guru untuk mengaktifkan KKG sebagai wadah berdiskusi. Pendampingan juga terlihat mampu menjaga dan meningkatkan motivasi guru untuk menerapkan PKR terlepas dari berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Upaya peningkatan kapasitas guru di Kecamatan Sukapura tidak berhenti pada pelatihan namun juga terjadi seiring dengan dijalankannya praktik PKR. Dalam proses tersebut mulai terlihat adanya beberapa orang yang bisa dianggap cepat belajar dan menonjol di antara rekan-rekan guru lainnya. Keberadaan mereka dan kelebihan kemampuan yang dimiliki telah mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan sekaligus peningkatan motivasi bagi guru-guru lainnya maupun kepala sekolah untuk terus menjadi lebih baik dalam melaksanakan PKR.

“Dulu saya enggak semangat, rasanya enggak mungkin mengubah mengajar tanpa buku, tanpa LKS. Saya panggil guru-guru, mereka bilang bisa. Ada [salah seorang guru] yang bagus, mempengaruhi yang lain jadi semangat juga... Dibawa ke KKG, cerita dengan yang lain jadi lebih semangat lagi... Saya juga lihat hasilnya nampak, jadi saya juga ikut semangat.” (Kepala Sekolah, Desa Sukapura)

Pertemuan rutin KKG *Multigrade* selain menjadi wadah pelatihan di awal juga telah menjadi wadah untuk saling belajar dan berbagi dalam pelaksanaan PKR di masing-masing sekolah. Guru-guru yang cukup menonjol biasanya ikut berbagi pengetahuan dalam pertemuan tersebut. Di sisi lain, pertemuan KKG yang mendiskusikan capaian masing-masing guru dan sekolah dalam pelaksanaan PKR juga telah menimbulkan daya saing antarguru dan sekolah untuk bisa lebih baik lagi. Namun demikian, pertemuan KKG yang dilaksanakan dalam kerangka *pilot* PKR ini, dengan sepengetahuan Dinas Pendidikan, masih menggunakan waktu kegiatan belajar mengajar. Untuk keberlanjutan nantinya perlu dipikirkan waktu yang lebih tepat sehingga tidak mengganggu waktu belajar mengajar.

Selain sumber daya manusia, faktor pendukung keberlangsungan PKR lainnya adalah metode yang ditawarkan dalam PKR itu sendiri. Metode PKR dianggap mampu menjawab permasalahan yang ada selama ini. Walaupun diperlukan upaya untuk bisa memahami dan mempraktekannya, namun diakui oleh para guru dan kepala sekolah bahwa metode yang digunakan melalui PKR saat ini mampu membuat guru lebih semangat dan membawa perubahan pada cara serta hasil belajar siswa. Metode PKR yang didasarkan pada pemahaman mengenai Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) melibatkan siswa dengan lebih aktif dan menggunakan alat peraga yang lebih variatif. Proses pembelajaran tidak lagi terpaku pada satu kurikulum tertentu dan bergantung pada keberadaan buku teks. Latihan siswa juga tidak lagi harus menggunakan LKS yang juga seperti buku teks, ketersediannya seringkali terbatas. Tidak seperti LKS, hasil belajar siswa saat ini ditempel di dinding sehingga bisa dilihat langsung, memberikan semangat sekaligus mempercantik dekor ruang kelas. Dari sisi anak, metode PKR juga memberikan semangat tambahan karena bisa belajar dengan lebih banyak teman, saling bertanya dan meningkatkan kompetisi untuk lebih baik dalam belajar.

Kebijakan yang mendukung juga memungkinkan PKR dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam hal ini, adanya pemahaman yang cukup baik mengenai PKR oleh Pemda tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan dan alokasi dana yang diberikan. SK Dinas Pendidikan untuk Fasda dan juga sekolah pelaksana *pilot* PKR telah membantu melindungi keberadaan pengawas, kepala sekolah dan guru untuk tidak dimutasi. Dengan demikian pengetahuan dapat bertahan dan penerapan bisa berlangsung secara penuh. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung tersebut, seperti terjadi di beberapa sekolah di Kecamatan Lumbang dan Tritis, pengetahuan yang didapat guru dan kepala sekolah yang sudah dilatih kemudian dimutasi atau pensiun akan cenderung terlupakan karena tidak diterapkan atau bahkan mungkin tidak dianggap diperlukan di sekolah baru mereka, sementara guru atau kepala sekolah pengganti tidak memiliki pemahaman mengenai PKR. SK Dinas Pendidikan juga memungkinkan guru untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan KKG walaupun masih mengambil jam mengajar mereka.

Dari dalam masyarakat, kesadaran akan pentingnya pendidikan serta partisipasi yang besar dari orang tua untuk mengirim anak ke sekolah maupun mendampingi anak belajar di rumah secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pelaksanaan PKR. Para orang tua ada yang sudah mendengar tentang PKR, terutama yang sudah mengikuti pertemuan orang tua yang dilaksanakan Program INOVASI, namun banyak juga yang belum mengetahuinya. Namun demikian, pada prinsipnya mereka menyerahkan kepercayaan kepada sekolah agar anak bisa mendapatkan pendidikan. Bagi orangtua yang sudah mengetahui pelaksanaan PKR maka mereka bisa melihat peningkatan semangat dan juga daya saing anak dalam belajar sehingga sangat menyambut baik pelaksanaan PKR. Dengan pandangan dan sikap tersebut maka pada dasarnya orang tua siap membantu sekiranya diperlukan dalam pelaksanaan dan pengembangan PKR, misalnya di SDN Ngadisari II di mana orang tua ikut membantu menghias ruang kelas. Hal ini merupakan aset penting bagi sekolah.

Dukungan pemerintah desa juga ikut mendorong partisipasi anak dan orang tua di sekolah. Peraturan yang dikeluarkan terkait pendidikan serta koordinasi pelaksanaan upacara adat terhadap kalender akademik, khususnya di Desa Ngadisari, merupakan contoh bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.¹² Begitu juga halnya koordinasi yang dilakukan oleh camat bersama satgas pendidikan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan tercukupi.

5.3 TANTANGAN BAGI KEBERLANJUTAN PKR

Studi ini juga melihat bahwa dalam pelaksanaan PKR terlihat masih adanya beberapa tantangan yang harus disikapi, terutama untuk menuju PKR yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan akan peningkatan kualitas pedagogi. Tantangan tersebut dapat dilihat dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, ketersediaan sumber daya manusia, kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung, serta partisipasi orang tua yang masih rendah di beberapa wilayah.

Tantangan utama terkait dengan sumber daya manusia adalah kapasitas guru yang belum merata. PKR yang berbasis PAKEM dengan penyediaan ruang bagi para guru untuk dapat berkesplorasi lebih dalam menuntut keaktifan dan kreativitas guru yang cukup tinggi. Namun demikian, tidak semua guru memiliki kapasitas yang sama, bahkan disinyalir bahwa guru-guru yang mengajar di wilayah terpencil adalah guru-guru dengan kapasitas yang rendah.¹³ Di satu sisi, PKR terbukti telah menjadi dorongan bagi para guru untuk terus berkembang dan memberikan peluang untuk mendapatkan guru-guru dengan kapasitas yang cukup menonjol. Di lain sisi, bagi guru-guru dengan kapasitas terbatas dan kemauan belajar rendah, PKR dapat dianggap sebagai hambatan besar, terlebih lagi jika tidak ada sistem dukungan di sekitarnya. Keaktifan dan kreativitas harus terus diasah jika tidak ingin berkembang menjadi suatu hambatan.

“Ketika *multigrade* itu memang yang dipikirkan oleh guru salah satunya adalah strategi. Itu strategi untuk dua kelas. Yang kedua, media. Media ini memang dipikirkan untuk dua kelas. Jadi memang dituntut sekali untuk kreatif di *multigrade* itu. Seorang guru harus bisa untuk memadukan itu bukan hanya memadukan KD tapi dia harus juga bisa menemukan strategi, juga harus menemukan media.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

Sebagai kelanjutan dari permasalahan kapasitas guru, pasca pelatihan PKR yang diberikan oleh Program INOVASI, masih terlihat banyaknya guru yang mengalami kesulitan dalam membedah dan menganalisis KD secara mandiri serta menurunkannya dalam rencana pembelajaran masing-masing. Sebagian guru yang merasakan kesulitan untuk melakukan hal tersebut, umumnya karena memang mereka selama ini tidak terbiasa melakukan persiapan pembelajaran, mengatakan bahwa seharusnya ada panduan khusus yang

¹² Sebagai contoh, pemerintah desa berkoordinasi dengan sekolah agar anak diliburkan selama 2-3 hari pada dua hari raya besar, yaitu Karo dan Kasodo.

¹³ <https://www.jpnn.com/news/kompetensi-guru-di-wilayah-terpencil-masih-rendah>

bisa mereka pergunakan untuk melaksanakan PKR atau yang kemudian disebut sebagai 'kurikulum PKR'. Panduan tersebut diharapkan sudah memuat KD-KD yang menggabungkan dua tingkatan kelas sehingga proses pengajaran bisa langsung dilaksanakan. Panduan yang dimaksud tentu berbeda dengan tujuan dari PKR itu sendiri yang sebenarnya lebih bersifat fleksibel berdasarkan kebutuhan. 'Kurikulum PKR' yang dimaksud akan membagi materi dan metode pengajaran secara baku, misal menggabungkan kelas 1 dan kelas 2 saja, sementara dalam praktiknya ada kemungkinan untuk menggabungkan kelas 1, 2, dan 3 terkait dengan ketersediaan ruang kelas atau jumlah murid. Lebih jauh lagi, panduan yang baku akan menutup ruang untuk pelaksanaan PKR berbasis kualitas pedagogi karena sifatnya yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

Bagi guru-guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai PKR, seperti di Kecamatan Krucil, ada kekhawatiran bahwa dengan menggabungkan materi antara dua tingkatan kelas akan membuat penyampaian materi tidak fokus. Dengan materi yang tercampur tersebut nantinya siswa dikhawatirkan menjadi sulit untuk memahami dan menguasai pelajaran.

Tantangan lainnya terkait sumber daya manusia ada pada ketersediaan guru dan kepala sekolah yang sudah dilatih. Pensiun dan mutasi yang cukup sering dapat menjadi kendala pelaksanaan PKR ketika terjadi pada guru atau kepala sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan atau memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan cukup baik untuk menerapkan PKR. Masalahnya kemudian adalah tidak semua guru dan kepala sekolah di Kabupaten Probolinggo sudah mendapatkan pelatihan mengenai PKR sehingga besar kemungkinan guru atau kepala sekolah pengganti nantinya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk meneruskan metode PKR yang sudah diterapkan selama ini. Dalam pelaksanaan *pilot* di Program INOVASI, mutasi guru dan kepala sekolah bisa diminimalisir dengan adanya SK Kepala Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan. Ke depannya, dikatakan perwakilan Dinas Pendidikan bahwa mereka akan berusaha untuk memetakan guru-guru yang sudah dilatih PKR dan ditempatkan sesuai dengan lokasi dan waktu yang dibutuhkan. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan PKR.

Selain mutasi, dengan diterapkannya PKR yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan guru maka ada pemahaman yang berkembang bahwa jumlah guru yang dibutuhkan dalam satu sekolah bisa menjadi berkurang. Dengan demikian dikhawatirkan akan ada pengurangan jumlah guru, khususnya GTT. Anggapan ini terutama berkembang di kalangan guru-guru yang belum mendapatkan pelatihan sehingga belum sepenuhnya memahami PKR dan cenderung memberikan resistensi atau penolakan terhadap pelaksanaan PKR. Namun demikian, dengan mempertimbangkan jumlah guru yang masih kurang dan di lain sisi pengangkatan guru PNS yang berjalan sangat lambat dibandingkan dengan jumlah guru yang pensiun maka kekhawatiran seperti itu seharusnya tidak terjadi. Pemahaman akan hal ini harus menjadi perhatian dalam materi pelatihan PKR sehingga peserta tidak menjadi skeptis.

"... Apakah dengan kelas rangkap ini berarti tidak ada penambahan guru, tidak bisa melengkapi guru seluruh Indonesia. Saya lihat guru kelas 4 dan kelas 3 diganti jadi satu guru, apa seperti itu... Guru empat, ada, kita masuk semua. Kita melaksanakan *multigrade*. Berarti ada yang nganggur karena itu, ya?" (Peserta FGD Guru, Kecamatan Lumbang)

Tantangan lainnya ada dalam hal kebijakan yang komprehensif. Di luar dari kebijakan yang sudah dikeluarkan, masih diperlukan adanya kebijakan dari tingkat pusat dan daerah yang bisa mengakomodir keunikan dari pelaksanaan PKR. Dari pemerintah pusat diharapkan agar sistem pengisian Dapodik memungkinkan para guru untuk mengajar kelas secara rangkap dengan total jumlah jam mengajar yang secara otomatis lebih banyak namun dengan jumlah murid yang sedikit. Kepastian adanya pengecualian bagi guru dan sekolah yang menerapkan PKR tersebut akan memberikan ketenangan bagi para guru dan motivasi untuk tetap melaksanakan PKR. Dari pemerintah daerah diharapkan ada insentif atau tunjangan khusus bagi guru pelaksana PKR. Dari hasil wawancara diketahui bahwa motivasi guru dapat menurun ketika mereka menyadari beban mengajar guru PKR yang lebih besar dibandingkan guru-guru pada kelas tunggal dikarenakan mereka harus bertanggung jawab untuk dua kelas. Walaupun secara jumlah siswa

lebih sedikit namun materi dan persiapan pembelajaran yang harus dilakukan mencakup dua tingkatan sehingga hampir sama bebannya dengan mengajar dua kelas sekaligus.

“Kayaknya kalau di *multigrade* itu kan kayak tambahan kita semakin tambah beban kerja kita yang seharusnya hanya mulang [mengajar] kelas 1, sekarang jadi kelas 1, 2 kan tambah berarti. Ya, ada semacam insentif, mungkin untuk teman-teman guru paling enggak memberikan motivasi, semangat, apa lagi yang kebanyakan kita itu dari GTT.” (Peserta FGD Kepala Sekolah, Kecamatan Sukapura)

Terkait dengan pendanaan, beberapa informan mengatakan bahwa dana BOS yang ada belum bisa mencukupi kebutuhan operasional sekolah, terlebih lagi dengan tuntutan untuk penyediaan alat peraga yang variatif dalam menerapkan metode PAKEM sekaligus PKR. Besaran dana BOS selama ini dihitung berdasarkan jumlah murid sehingga sekolah-sekolah kecil otomatis menerima dana dengan jumlah sedikit.

“Nah di media itu kan kita butuh bahan, bahan dan alat. Itu yang nantinya yang akan membutuhkan banyak dana di situ. Sementara BOS kita di Sukapura 3 juga sangat minim. SD kecil.” (Peserta FGD Guru, Kecamatan Sukapura)

Kebijakan yang ada sejauh ini masih terbatas pada SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dengan wewenang yang terbatas. Dirintisnya Perbup terkait pelaksanaan PKR diharapkan akan dapat memberikan kemudahan bagi pelaksanaan PKR ke depannya, terlebih lagi dengan adanya rencana pelaksanaan PKR di kecamatan-kecamatan lainnya. Selain itu, pengalokasian anggaran diharapkan juga bisa lebih disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang ada.

Dari sisi orangtua, tantangan terhadap PKR secara khusus tidak terlihat, namun dukungan terhadap pendidikan anak di beberapa kelompok masyarakat masih cenderung rendah. Kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak, terutama orangtua dengan latar belakang pendidikan dan kondisi ekonomi yang lemah, cenderung rendah. Pertemuan orang tua yang dilakukan oleh Program INOVASI menunjukkan adanya perubahan pandangan dan sikap orang tua untuk mendukung pendidikan anak. Pertemuan semacam ini perlu terus dilakukan untuk mengurangi tantangan pendidikan yang ada. Se jauh ini peran desa melalui pemanfaatan dana desa masih terbatas pada infrastruktur, yaitu pembangunan jalan desa termasuk menuju sekolah di wilayah-wilayah sulit. Sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah desa belum berani memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pendidikan selain PAUD dan perpustakaan desa.¹⁴

Intervensi terhadap orangtua masih sangat terbatas. Partisipasi orangtua dalam hal mendampingi anak belajar hanya terlihat di kalangan orang tua yang umumnya cukup mampu, terutama di Desa Ngadisari. Untuk dapat mendukung pelaksanaan PKR maka diperlukan adanya dukungan orang tua dari rumah. Dalam diskusi bersama orang tua, terlihat belum semua orang tua memahami PKR sehingga muncul sedikit kekhawatiran bahwa pelaksanaan PKR dapat menurunkan tingkat kelas anak mereka. Memberikan pemahaman kepada orang tua menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah mengingat pertemuan orang tua tidak dilakukan secara rutin. Peran komite sekolah menjadi penting walaupun pada kenyataannya tidak semua sekolah memiliki komite yang aktif.

¹⁴ Desa Sukapura sudah membangun perpustakaan desa, namun menurut kepala desa, minat baca yang rendah dari warga desa menyebabkan perpustakaan tersebut tidak dapat berjalan

6. PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN LAIN

6.1 ALOKASI APBD DI KABUPATEN PASURUAN

Seperti halnya Kabupaten Probolinggo dan Blitar, Kabupaten Pasuruan sudah sejak lama memiliki alokasi dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi insentif guru-guru yang mengajar di lokasi terpencil. Tujuan dari pemberian insentif tersebut adalah untuk membantu sekaligus memotivasi para guru agar tetap bisa melaksanakan tugas mengajar mereka dengan baik. Dengan medan yang sulit maka biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk mencapai sekolah di wilayah-wilayah terpencil menjadi mahal, terlebih lagi jika dibandingkan dengan honor yang diterima para guru. Namun, sejak diberlakukan kebijakan mengenai wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) sekitar tahun 2015 maka insentif untuk guru tersebut tidak bisa lagi diberikan tanpa adanya SK guru di wilayah 3T yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Di lain sisi, pemerintah daerah juga tidak ingin mengajukan wilayahnya sebagai wilayah 3T karena berbagai pertimbangan, seperti tidak ingin wilayahnya dianggap tertinggal.

Sebagai penggantinya, melalui SK Bupati Pasuruan tahun 2019 kemudian ditetapkan adanya pemberian honorarium kepada pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara *multigrade* di daerah terpencil. Dalam SK tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa *multigrade* yang dimaksud adalah seorang guru yang mengajar dua atau lebih mata pelajaran yang berbeda. Dengan dasar penuntasan wajib belajar 9 tahun maka *multigrade* yang dimaksud seharusnya mencakup pengajaran di sekolah dasar dan menengah pertama. Dalam praktiknya, yang dimaksud dengan guru tersebut adalah guru-guru SMP yang mengajar di sekolah satu atap, sementara guru SD yang masuk sebagai penerima honorarium adalah guru-guru yang mengajar di wilayah terpencil tanpa memperhatikan metode pengajaran yang dilakukan. Kategori wilayah terpencil yang menjadi pertimbangan adalah akses transportasi terkait dengan medan yang sulit dan rawan kejahatan, misalnya begal. Honorarium sebesar Rp 200.000/bulan untuk guru SD ini dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Menurut staf Dinas Pendidikan setempat, dalam praktiknya selama ini sebenarnya banyak guru sekolah dasar yang mengajar rangkap dikarenakan kurangnya jumlah guru yang ada. Sayangnya, kondisi tersebut tidak tercermin dalam sistem pelaporan yang diterima Dinas Pendidikan dikarenakan para guru mengisi data dalam Dapodik sesuai dengan kondisi ideal agar pembayaran tunjangan tetap bisa berjalan lancar. Terkait dengan hal tersebut maka meskipun disadari bahwa pelaksanaan *multigrade* atau PKR akan diperlukan juga di Kabupaten Pasuruan, selama belum ada penyesuaian sistem Dapodik untuk guru dan sekolah PKR maka pelaksanaannya dirasa akan sulit dilakukan.

Dalam kasus di Kabupaten Pasuruan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai PKR juga perlu dimiliki oleh pengambil keputusan sehingga alokasi dana bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal sesuai dengan konsep yang diajukan. Sejauh ini konsep PKR yang sebenarnya belum dipahami. Belum ada sosialisasi ataupun pelatihan yang diberikan kepada pemerintah dan juga tenaga pengajar di Kabupaten Pasuruan.

6.2 KEBERLANJUTAN PROGRAM DI KABUPATEN BLITAR

Program PKR atau yang lebih dikenal dengan istilah *multigrade* diselenggarakan di Kabupaten Blitar sebagai bagian dari Program PRIORITAS yang didanai oleh USAID sejak tahun ajaran 2012/2013 dan berakhir pada tahun ajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, latar belakang dilaksanakannya program ini adalah adanya kekurangan jumlah guru dan juga distribusi guru yang tidak merata, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil. Selain itu Blitar juga memiliki lebih dari 50 sekolah dasar kecil dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang dalam satu sekolah. Secara spesifik, tujuan dilaksanakannya program *multigrade* adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya di sekolah-sekolah kecil serta meningkatkan mutu pembelajaran.

Selama sekitar 2 tahun pelaksanaan program, telah dipilih 4 SD sebagai sekolah *pilot* dengan 5 Fasda yang terdiri dari 4 pengawas dan 1 kepala sekolah yang ada, namun bukan kepala sekolah atau pengawas dari keempat sekolah pelaksana tersebut. Seluruh guru kelas dan kepala sekolah dari sekolah *pilot* mendapatkan pelatihan dari narasumber *multigrade*. Fasilitator juga mendapatkan pelatihan secara terpisah kemudian bertugas untuk mendampingi pelaksanaan di keempat sekolah tersebut secara bersama-sama.

KKG *multigrade* dibentuk di tingkat kabupaten untuk keempat sekolah *pilot*. Dengan mempertimbangkan lokasi sekolah yang saling berjauhan maka KKG diputuskan untuk dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten. KKG yang dihadiri oleh keempat sekolah *pilot* dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali. Dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sekitar 3 pertemuan KKG untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *multigrade*.

Untuk mendukung pelaksanaan *multigrade* ini sudah dikeluarkan Peraturan Bupati dan juga anggaran yang diperlukan. Salah satu hal yang diangkat dalam kebijakan ini adalah pemberian insentif kepada guru-guru pelaksana *multigrade* dalam bentuk pemberian prioritas mengikuti proses seleksi CPNS serta prioritas untuk mendapatkan berbagai pelatihan yang diselenggarakan atau dikordinir oleh Dinas Pendidikan setempat.

Pelaksanaan *pilot* dilanjutkan dengan pemberian pelatihan kembali kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas dari sekitar 50 SD di Kabupaten Blitar yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 orang dalam satu sekolah. Namun demikian, pemberian pelatihan tersebut tidak diikuti oleh pendampingan dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan dan juga kebijakan di Dinas Pendidikan setempat. Saat pengumpulan data dilakukan sudah tidak ada lagi sekolah yang masih melaksanakan *multigrade* sesuai dengan metode yang diberikan dalam pelatihan. Sekolah-sekolah *pilot* yang sebelumnya sudah menerapkan *multigrade* kembali lagi pada metode lama dalam melaksanakan kelas rangkap, yaitu mengajar dua kelas atau lebih dalam satu kelas yang sama namun dengan waktu yang berbeda (bergilir) dan materi yang juga berbeda.

Tantangan utama yang disampaikan oleh informan dalam pelaksanaan *multigrade* di Kabupaten Blitar adalah adanya mutasi dan pensiun di tingkat sekolah maupun pengambil kebijakan. Mutasi dan pensiun di tingkat pengambil kebijakan dilakukan dengan proses transfer pengetahuan yang sangat minim menyebabkan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola program dan anggaran. Sementara mutasi dan pensiun di tingkat sekolah terjadi pada kepala sekolah maupun guru yang sudah dilatih sehingga pelaksanaan *multigrade* menjadi terhambat. Kepala sekolah dan guru pengganti tidak pernah mendapatkan pelatihan dan tidak memahami *multigrade*. Kondisi tersebut juga disertai dengan tidak pahamnya pengawas di sekolah setempat terhadap *multigrade* sehingga tidak bisa memberikan pembinaan. Fasda yang diangkat bukanlah pengawas dari sekolah terkait sehingga pembinaan tidak bisa dilakukan secara intensif karena keterbatasan waktu dan jarak yang cukup jauh, serta masa kontrak Fasda yang kemudian terhenti setelah program selesai.

“Responnya sebetulnya juga memang berat gitu. Tapi kalau didampingi seberat apapun kan dengan pelatihan kita mendampingi kan dia juga... Kalau dilepas ya memang kesulitan. Awal-awal kesulitan dan merasa berat gitu. Tapi setelah ada pendampingan dan sebagainya, merasa enak... Pendampingan itu penting. Kalau pendampingan berhenti ya mereka berhenti, kan gitu. Karena ya sulit memang, harus didampingi.” (Mantan Fasda *Multigrade*, Kab. Blitar)

Tidak adanya pendampingan yang intensif juga berpengaruh terhadap kapasitas dan motivasi guru untuk dapat melaksanakan *multigrade* secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dari keempat sekolah *pilot*, menurut informan, kepala sekolah atau guru yang mendekati masa pensiun umumnya memiliki motivasi yang rendah untuk mulai belajar dan memahami *multigrade*. Pelaksanaan *multigrade* dianggap ideal dan mampu menjawab permasalahan sekolah kecil, namun diperlukan kreativitas tinggi dari para guru. Dari sisi guru, selain kesulitan untuk memetakan KD serta menurunkannya dalam RPP, adanya perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 yang tidak serentak menambah beban dan kebingungan dalam pelaksanaan *multigrade*. Minimnya pendampingan yang bisa diberikan Fasda serta ketidaktahuan dari sisi pengawas dan kepala sekolah setempat menyebabkan guru tidak

memiliki ruang untuk berkonsultasi. Momen ini kemudian menjadi titik dimana *multigrade* pada akhirnya diputuskan untuk dihentikan.

Pertemuan KKG *multigrade* yang diharapkan menjadi wadah berbagi dan konsultasi sulit dilaksanakan karena lokasi sekolah yang berjauhan serta kesibukan pengawas di wilayahnya masing-masing. Selain itu juga diperlukan biaya yang cukup banyak untuk dapat melangsungkan pertemuan KKG di tingkat kabupaten tersebut.

Di dalam sekolah, keterbatasan dana BOS yang didasari pada jumlah murid dianggap sebagai permasalahan tersendiri bagi sekolah kecil, terlebih lagi dengan keterbatasan jumlah guru PNS yang pada akhirnya memaksa sekolah untuk mengambil GTT dengan memotong dana BOS. Terkait dengan *multigrade*, keterbatasan dana BOS tersebut juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan bahan untuk membuat alat peraga serta penyediaan buku pendukung. Di lain sisi, metode *multigrade* mendorong guru maupun siswa untuk aktif mencari dan membuat bahan belajar. Kondisi geografis sekolah *multigrade* yang menyebabkan sarana informasi dan teknologi terbatas, serta kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya lemah menyebabkan dukungan dari lingkungan maupun orangtua untuk penyediaan bahan ataupun buku pendukung menjadi rendah.

Masalah pendanaan diperburuk dengan adanya kekhawatiran akan gagalnya mengisi sistem Dapodik yang sesuai sehingga menyebabkan terhambatnya pembayaran sertifikasi guru dan BOS untuk sekolah. Kekhawatiran ini kemudian menjadi resistensi dari pihak guru dan juga sekolah untuk meneruskan pelaksanaan *multigrade*. Di lain pihak, salah seorang Fasda mengatakan bahwa pengisian Dapodik untuk guru *multigrade* tersebut sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mengosongkan jumlah jam mengajar di salah satu kelas. Misalnya, guru yang mengajar rangkap di kelas 1 dan 2 bisa mengisi jumlah jam mengajar di kelas 1 menjadi 24 jam sementara jumlah jam mengajar di kelas 2 menjadi 0 jam, sehingga total jam mengajar adalah 24 jam dan tidak menyalahi peraturan. Untuk menyiasati jam mengajar di kelas 2 yang kosong maka digunakan nama tenaga pendidik lainnya atau bahkan staf sekolah yang ada dan belum mengisi jam mengajar dalam sistem Dapodik. Menurut informan, hal itulah yang selama ini dilakukan oleh beberapa sekolah *pilot multigrade*. Tidak semua operator dan guru di sekolah *multigrade* mengetahui tentang praktek seperti ini. Selain itu, praktek ini juga bisa menimbulkan permasalahan terkait akurasi data di Dapodik, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa pengisian Dapodik untuk pengajaran kelas rangkap perlu diperjelas dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait.

Dari berbagai tantangan yang ada tersebut kemudian dapat diambil beberapa pembelajaran untuk keberlanjutan program *multigrade*, yaitu:

- Pendampingan yang intensif dalam pelaksanaan *multigrade* adalah mutlak untuk dilakukan di awal. Selanjutnya perlu dibuat suatu sistem pendampingan yang dapat tetap berjalan setelah program selesai. Peran pengawas sebagai mentor sekaligus pengendali mutu sekolah dianggap penting untuk mendampingi pelaksanaan *multigrade*.
- Antisipasi terhadap mutasi dan pensiun guru maupun kepala sekolah yang sudah memahami dan menjalankan *multigrade* merupakan tantangan terbesar, begitu juga terjadinya mutasi di tingkat pemerintah daerah. Menjadikan pengawas sebagai ujung tombak pelaksanaan *multigrade* bisa menjadi pilihan dengan mempertimbangkan mutasi pengawas yang dianggap cukup rendah dan dilakukan masih dalam kabupaten yang sama.
- Perlu adanya suatu wadah diskusi dan konsultasi mengenai pelaksanaan *multigrade* di tingkat yang lebih dekat, misalnya KKG di tingkat gugus dan kecamatan.
- Ketersediaan dana BOS untuk sekolah terutama untuk menunjang pengadaan bahan pembuatan media pembelajaran serta buku bacaan sangat minim, perlu ada alokasi dana khusus yang tidak tergantung pada jumlah murid, baik dari pemerintah, orangtua, dan lainnya. Namun perlu dipertimbangkan kondisi sekolah *multigrade* yang umumnya berada di wilayah terpencil dengan kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya lemah.

- Insentif untuk guru pelaksana *multigrade* dirasa sangat diperlukan untuk menunjang kehadiran serta dan meningkatkan motivasi guru. Bentuk insentif perlu dipikirkan kembali sehingga tidak mendorong perpindahan atau mutasi guru.
- Ketidaktahuan cara pengisian sistem Dapodik menyebabkan motivasi guru dan sekolah menurun walaupun sebenarnya ada cara-cara pengisian yang bisa dilakukan. Untuk itu dirasa perlu adanya sosialisasi dan keseragaman cara pengisian tersebut kepada operator sekolah.

7. PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan pendidikan bisa berbeda-beda antarsatu wilayah dengan lainnya. Dalam hal ini, kondisi geografi, demografi, ekonomi, dan sosial budaya yang ada di Kecamatan Sukapura menunjukkan adanya kebutuhan yang spesifik. Dari sisi geografi, banyak sekolah yang berada dalam wilayah dengan akses transportasi dan medan yang sulit. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap faktor demografi di mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut menjadi sedikit. Ditambah lagi dengan kondisi budaya dan ekonomi masyarakat Tengger dan Kecamatan Sukapura pada umumnya yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk tidak memiliki banyak anak. Di lain sisi, pendidikan telah menjadi kebutuhan sebagian besar warga dengan didorong oleh berbagai nilai budaya masyarakat Tengger yang mendukung serta peran pemerintah desa yang secara aktif berusaha meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Berbagai kondisi tersebut menuntut adanya layanan pendidikan dengan lokasi yang terjangkau bagi anak-anak di wilayah sulit namun dengan jumlah siswa yang terbatas.

Secara umum masyarakat Tengger dan masyarakat di Kecamatan Sukapura memiliki persepsi yang positif terhadap pendidikan, namun demikian tingkat partisipasi orang tua berbeda-beda dikarenakan kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikan mereka. Selain itu lokasi desa dan khususnya dusun juga ikut menentukan keterbukaan pandangan masyarakat. Dalam beberapa hal masih terlihat adanya benturan yang terjadi antara kondisi budaya dan ekonomi masyarakat dengan partisipasi dalam pendidikan, misalnya waktu perayaan upacara adat yang menyebabkan anak tidak dapat hadir di sekolah dan adanya kebutuhan ekonomi keluarga yang menyebabkan anak lebih memilih untuk bekerja, baik secara temporer ataupun permanen. Namun demikian kedua hal tersebut mulai berkurang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Nilai-nilai budaya Tengger tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, begitu juga halnya dalam penyediaan akses terhadap pendidikan. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Secara khusus untuk anak penyandang disabilitas, belum ada layanan pendidikan yang tersedia. Dengan alasan jarak dan juga biaya yang tinggi untuk mengirim anak penyandang disabilitas bersekolah di kecamatan lain maka sebagian besar orangtua memilih untuk tidak menyekolahkan mereka.

Selain jumlah siswa yang sedikit, kondisi geografi sekolah juga menyebabkan tingkat kehadiran guru menjadi terbatas. Jarak yang jauh dan medan yang berat, serta pengaruh cuaca buruk menjadi tantangan besar bagi para guru yang mengajar di sekolah-sekolah kecil. Masalah ini kemudian diperuncing dengan adanya kekurangan jumlah guru, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Dengan kehadiran dan jumlah guru yang terbatas maka pembelajaran seringkali dilakukan secara rangkap antarkelas. Pembelajaran rangkap kelas ini juga dilakukan ketika sekolah-sekolah memiliki ruang kelas yang terbatas.

Metode Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) atau *multigrade* dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Kecamatan Sukapura. Jika sebelumnya guru

mengajar dua atau lebih tingkat kelas secara bergantian tanpa rencana pembelajaran dan hanya bertujuan agar siswa memiliki kegiatan, melalui PKR guru dapat mengajar dua atau lebih tingkatan kelas dalam waktu yang sama dengan persiapan pembelajaran dan materi sesuai dengan kompetensi yang dituntut.

Pelatihan dan pendampingan sudah diberikan oleh INOVASI dalam rangka peningkatan kapasitas guru terkait dengan PKR di Kecamatan Sukapura, termasuk juga mengaktifkan kembali KKG sebagai wadah untuk berbagi dan berkonsultasi mengenai pelaksanaan PKR. Pemahaman yang relatif sama mengenai PKR sudah dimiliki oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru sehingga tercipta sistem yang saling mendukung dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pemahaman yang berkembang pada guru dan kepala sekolah masih terbatas pada tujuan PKR untuk mengatasi permasalahan kekurangan siswa, guru dan ruang kelas, dan belum didasari pada tujuan untuk peningkatan kualitas pedagogi. Perangkapan siswa masih lebih banyak didasarkan pada tingkatan kelas dan belum seluruh guru atau sekolah melakukan identifikasi kompetensi siswa sebagai dasar perangkapan tersebut. PKR yang dipahami oleh para guru dan kepala sekolah juga belum mampu menjawab atau mengakomodir anak-anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

PKR atau *multigrade* tepat untuk dilakukan di wilayah-wilayah dengan kondisi geografi dan demografi serupa dengan Kecamatan Sukapura yang menyebabkan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Kondisi ini diperkuat dengan ketersediaan ruang kelas dan/atau jumlah guru yang juga rendah. Dengan melihat dinamika faktor-faktor penyebab utama pelaksanaan PKR tersebut di Kecamatan Sukapura yang cenderung stabil, maka kebutuhan akan pelaksanaan PKR di wilayah ini diperkirakan akan terus ada.

Keberlanjutan PKR perlu dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa faktor pendukung yang ada. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas yang sesuai. Kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam *pilot* PKR di Kecamatan Sukapura dibangun melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, serta didukung dengan pertemuan KKG. Selain itu sekolah juga secara rutin melaksanakan kegiatan KKG Mini di lembaga sekolahnya. Kedua, PKR diyakini sebagai metodologi pembelajaran yang tepat. Keterlibatan siswa secara aktif dan hasil pembelajaran yang bisa dilihat langsung telah memberikan motivasi tersendiri bagi kepala sekolah, guru, siswa dan juga orangtua. Ketiga, kebijakan yang mendukung terutama untuk memberi kesempatan kepada guru dan kepala sekolah menerapkan hasil pelatihan PKR secara maksimal. Keempat, kesadaran serta partisipasi aktif orang tua dan masyarakat setempat yang menjadi aset bagi sekolah.

Di lain sisi, masih ada beberapa tantangan yang harus disikapi untuk keberlangsungan dan keberlanjutan PKR. Tantangan tersebut dapat dilihat dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, ketersediaan sumber daya manusia, kebijakan yang belum mencakup seluruh aspek, serta partisipasi orang tua yang masih rendah di beberapa wilayah. Pergantian pejabat, mutasi guru atau kepala sekolah juga bisa menghambat pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap.

Penerimaan pemerintah daerah terhadap program ini sangat baik, terlihat dari adanya kebijakan dan alokasi dana yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan PKR saat ini maupun untuk keberlanjutannya. SK Kepala Dinas Pendidikan akan diikuti dengan Peraturan Bupati. Kebijakan yang ada telah memberikan ruang bagi pelaksanaan PKR namun masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat lebih komprehensif, misalnya penyediaan insentif untuk guru pelaksana PKR, distribusi guru dan kepala sekolah yang disesuaikan dengan penyediaan pelatihan PKR, serta alokasi tambahan dana BOS untuk penyediaan bahan-bahan media pembelajaran. Di luar PKR, penyediaan tambahan honor untuk GTT dan juga dana untuk ojek anak sekolah diharapkan dapat berperan dalam mengatasi masalah di sekolah-sekolah terpencil, serta pendidikan secara umum di Kabupaten Probolinggo.

7.2 REKOMENDASI

Pelaksanaan PKR tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah namun harus didukung juga oleh pemerintah, dari pusat hingga desa, dan orangtua siswa atau masyarakat secara umum. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk dapat mewujudkan PKR dengan baik dan berkelanjutan.

Dari sisi sekolah, motivasi dan kapasitas guru menjadi kunci dalam pelaksanaan PKR. Hal ini harus diiringi dengan dukungan dari kepala sekolah dan juga pengawas yang memiliki pemahaman cukup baik mengenai PKR. Untuk itu perlu dilakukan:

- Peningkatan kapasitas guru
 - Dalam rangka merespon kondisi geografis dan kemajemukan masyarakat Indonesia, serta untuk menyikapi kemungkinan mutasi yang cukup tinggi pada guru maka sebaiknya seluruh guru memiliki pemahaman awal mengenai PKR. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memasukkan materi PKR ke dalam pendidikan guru.
 - Selanjutnya, prioritas diberikan kepada guru-guru yang akan atau sedang bertugas di sekolah kecil untuk mendapatkan pelatihan mengenai teknis pelaksanaan PKR yang lebih mendalam dan intensif. Dalam jangka panjang, pelatihan tersebut juga bisa diberikan ke semua guru sehingga perubahan praktek PKR menuju pada pilihan pedagogi lebih dimungkinkan terjadi.
 - Pelatihan intensif tersebut harus diberikan kepada guru, dan juga kepala sekolah serta pengawas terkait agar tercipta pemahaman yang sama dan sistem yang saling mendukung.
 - Pelatihan intensif bisa diadakan melalui fasilitasi dari Dinas Pendidikan setempat ataupun dengan menggunakan wadah KKG di mana pengawas, kepala sekolah, dan guru yang sudah dilatih sebelumnya menjadi narasumber.
 - *Lesson study* dapat dilakukan dengan melibatkan secara khusus guru-guru yang dianggap menonjol dalam pelaksanaan PKR untuk menjadi mentor bagi guru-guru lainnya. Namun demikian pelaksanaan tersebut sebaiknya tidak mengganggu jadwal mengajar guru yang ditunjuk.
- Optimalisasi fungsi KKG
 - Fungsi KKG menjadi sangat penting dalam pelaksanaan PKR. Selain sebagai wadah pelatihan, KKG juga diharapkan dapat menjadi wadah berbagi informasi dan berkonsultasi dalam penerapan hasil pelatihan PKR, serta pengembangan kapasitas dan kreativitas guru secara umum. Untuk itu, kondisi KKG yang selama ini tidak aktif perlu mendapatkan perhatian khusus.
 - KKG *Multigrade* dapat dibuat secara terpisah dengan anggota hanya sekolah-sekolah pelaksana PKR ataupun tetap berdasarkan gugus yang melibatkan sekolah-sekolah dengan pengajaran tunggal sebagai bahan pembelajaran bagi guru-guru lain yang tidak atau belum menerapkan PKR.
 - Mengacu pada studi KKG yang telah dilaksanakan INOVASI sebelumnya, maka pelaksanaan KKG *Multigrade* tersebut harus memiliki rencana kegiatan dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas sehingga ketercapaian tujuan dapat diukur. Selain itu perlu ditetapkan pengurus dan mekanisme pembiayaan kegiatan KKG yang disepakati bersama agar kegiatan bisa berlangsung secara berkelanjutan.
 - KKG *Multigrade* sebaiknya dilaksanakan di tingkat gugus, kecamatan atau berdasarkan klaster wilayah terdekat untuk meminimalisir perbedaan jarak antarsekolah dan waktu tempuhnya sehingga pertemuan bisa dilaksanakan di luar jam belajar.
 - Di luar itu, untuk menguatkan proses belajar bersama maka dapat juga diadakan pertemuan KKG *Multigrade* secara berjenjang dan berkala ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya kabupaten.
- Pendampingan mutlak dilakukan di awal hingga sekolah merasa siap menjalani PKR secara mandiri. Dalam hal ini, peran pengawas setempat sangatlah penting.
- Pengawas sebagai fasilitator dan mentor dengan kemungkinan mutasi yang kecil dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan PKR. Besarnya jumlah sekolah kecil yang berpotensi melaksanakan PKR di Kabupaten Probolinggo mendorong adanya kebutuhan bagi seluruh pengawas untuk memahami PKR. Pemetaan keberadaan Fasda dan ToT PKR bagi seluruh pengawas di kabupaten dalam hal ini menjadi penting untuk dilakukan.

- Melalui pendampingan, perangkapan kelas yang dilakukan sebaiknya lebih didasarkan pada perbedaan kapasitas siswa dan tidak terbatas pada perbedaan tingkat kelas.
- Secara teknis, perlu dipikirkan kembali metode agar materi pembelajaran tidak berulang di tahun berikutnya, serta sejauhmana perangkapan untuk siswa kelas 6 bisa dilakukan dengan pertimbangan materi pelajaran serta waktu pelaksanaan ujian.
- Wadah komunikasi antarpelaksana PKR perlu dibentuk sebagai sarana untuk mencari dan berbagi informasi, bisa dalam bentuk sederhana seperti grup *WhatssApp* ataupun yang lebih komprehensi seperti portal atau situs khusus terkait PKR.

Dari sisi pemerintah, perlu adanya dukungan dalam hal pembuatan kebijakan serta mekanisme atau aturan pelaksanaan yang sesuai dengan keunikan dari metode PKR. Dukungan tersebut mencakup:

- Pemberian pemahaman mengenai PKR kepada para pengambil kebijakan perlu dilakukan sehingga kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan konsep yang ada dan tujuan yang ingin dicapai.
- Di dalam RPJM Nasional 2015-2019 telah disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan dan strategi di bidang pendidikan adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar, termasuk melalui *multigrade*. Dengan demikian penting untuk melakukan pengkajian kembali mengenai kebijakan satu guru untuk satu kelas.
- Sejalan dengan memasukkan PKR dalam materi pendidikan guru, maka perlu adanya advokasi agar PKR juga dapat dimasukkan ke dalam tupoksi Dinas Pendidikan sehingga menjadi perhatian dalam pengembangan program di tingkat daerah.
- Perlu dibuat kebijakan khusus terkait dengan PKR di tingkat lokal, khususnya Peraturan Bupati, yang dapat menjadi payung hukum dari pelaksanaan kegiatan PKR secara umum di Kabupaten Probolinggo.
- Kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan adanya penetapan sekolah serta guru pelaksana PKR sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lokasi terkait.
- Perlu adanya pengaturan mekanisme distribusi guru yang mengacu pada pelaksanaan pelatihan sehingga guru serta kepala sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan PKR dapat ditempatkan di sekolah-sekolah kecil yang membutuhkan dan kemungkinan mutasi guru serta kepala sekolah tersebut bisa diperkecil. Distribusi guru juga perlu memperhatikan domisili atau wilayah tempat tinggal guru sehingga bisa meminimalisir tantangan dalam hal jarak dan waktu tempuh yang berpengaruh terhadap kehadiran guru.
- Adanya alokasi dana khusus untuk pemberian insentif kepada guru perlu dipertimbangkan, tidak terbatas pada guru yang mengajar di wilayah terpencil namun kepada guru yang melaksanakan PKR dengan mempertimbangkan beban tugas mengajar yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang mengajar kelas tunggal. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi atau penarik bagi guru untuk mau mengikuti pelatihan serta ditempatkan di sekolah-sekolah kecil. Selain dalam bentuk honor, insentif juga dapat diberikan dalam bentuk lainnya, seperti prioritas untuk mendapatkan pelatihan serta kenaikan pangkat. Namun demikian perlu diperhatikan dalam kasus pemberian insentif semacam ini di Kabupaten Blitar, banyak guru yang kemudian diangkat menjadi CPNS justru dipindahtugaskan ke sekolah lain yang tidak melaksanakan PKR.
- Sementara itu, tunjangan bagi guru-guru di wilayah sulit bisa tetap diadakan misalnya dengan memperluas target dan cakupan program Ojek Anak Sekolah (OASE) sehingga selain menyediakan transportasi tambahan kepada siswa juga bisa dimanfaatkan oleh guru terkait, khususnya GTT. Penyediaan tunjangan seperti ini juga bisa bersumber dari dana desa. Untuk itu, perlu sinergitas antara organisasi perangkat daerah.
- Penambahan dana operasional kelas dan sekolah cukup penting mengingat sekolah yang melaksanakan pembelajaran kelas rangkap pada umumnya memiliki jumlah murid relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada penerimaan dana BOS, padahal beban biaya operasional kelas dalam pembelajaran dan sekolah yang lebih kondusif juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Alokasi dana tambahan bagi sekolah-sekolah kecil untuk penyediaan bahan pembuatan media pembelajaran dan bahan bacaan akan sangat mendukung pelaksanaan PKR. Meskipun guru

didorong untuk dapat memanfaatkan bahan baku dari lingkungan setempat namun kondisi ini dibatasi oleh kreativitas yang dimiliki masing-masing guru. Dengan kondisi tersebut maka perlu adanya analisa ulang terkait biaya operasional di sekolah-sekolah kecil. Selain itu, perlu diijazahi pemanfaatan BOS Afirmasi, khususnya oleh sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah 3T.

- Keseragaman pengisian data Dapodik perlu dipastikan dan cara pengisian perlu disosialisasikan kepada seluruh operator sekolah kecil. Pengisian ini sebaiknya tidak hanya semata untuk memenuhi syarat dikeluarkannya SK tunjangan namun dirancang secara khusus oleh pemerintah pusat untuk dapat dimanfaatkan sebagai identifikasi dan pendataan PKR yang selama ini belum dilakukan. Dengan adanya data tersebut maka diharapkan akan dapat membantu pembuatan kebijakan yang lebih sesuai.

Dari sisi komunitas, perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Dalam konteks PKR, partisipasi orang tua dan masyarakat secara umum diperlukan mengingat lokasi sekolah yang umumnya berada di dalam komunitas kecil. Peran pemerintah desa yang sudah ada selama ini dapat dioptimalkan dan dilengkapi dengan peran dari pihak lain untuk mendukung pendidikan, antara lain dengan cara:

- Peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas orang tua, misalnya kemampuan untuk mendampingi anak belajar di rumah. Penggunaan alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan memiliki peluang bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan semacam ini namun demikian perlu fasilitasi khusus dalam pembuatan proposal pelaksanaan mengingat hal tersebut tidak tertulis secara langsung dalam peraturan yang ada.
- Pertemuan orang tua murid yang dikemas dalam bentuk pelatihan atau '*parents meeting*' terbukti sangat membantu dan bahkan bisa mempercepat progres pencapaian program PKR. Sepulang dari sekolah, dalam kesehariannya anak lebih banyak bersama dengan orang tua. Jika trik pendampingan orang tua terhadap anaknya dilakukan secara sengaja dan tepat, maka hasilnya akan mendukung program sekolah.
- Prioritas pembangunan jalan desa yang melewati sekolah perlu diangkat dalam Musrembang sehingga akses menuju sekolah bisa menjadi lebih mudah, baik untuk siswa maupun guru, kepala sekolah, serta pengawas sekolah.
- Peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di dusun-dusun terpencil. Hal ini perlu dilakukan di luar program pendidikan namun diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
- Pelibatan masyarakat dan/atau lembaga lain yang berada di desa dan sekitarnya untuk membuka akses informasi bagi anak-anak, misalnya melalui penyediaan bahan bacaan di tingkat dusun atau sekolah. Ketersediaan perpustakaan desa belum terlihat aktif antara lain karena letak kantor desa yang jauh dan sulit dicapai oleh anak-anak yang tinggal di dusun terpencil.

Selanjutnya, ada beberapa kajian yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hasil studi ini, yaitu:

- Kajian mengenai dampak terhadap hasil belajar siswa sehingga terlihat perbedaan yang terukur dari praktek PKR. Pemetaan elemen inklusi perlu diperhatikan dalam pengukuran hasil belajar tersebut, seperti bahasa ibu mengingat bahasa sehari-hari yang digunakan mayoritas adalah Jawa Tengger.
- Kajian mengenai peluang pengembangan PKR ke arah peningkatan pedagogi dan bukan sebatas solusi atau respon akibat keterbatasan seperti yang terjadi selama ini. Termasuk dalam hal ini adalah keterkaitan antara PKR dengan inklusi yang memungkinkan dilakukannya pemetaan kemampuan individual siswa serta pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia (2011). *Naskah Kebijakan: Pengembangan Pengajaran Kelas Rangkap di Indonesia*. Jakarta, Januari 2011.
- Cannon, R (2006). *Book Review: Indonesian Education: Teachers Schools and Central Bureaucracy by Christopher Bjork*. New York: Routledge, 2005.
- Djalil, A. (2019). *Modul Pembelajaran Kelas Rangkap*. <http://repository.ut.ac.id/4073/1/PDGK4302-M1.pdf> diakses 23 Maret 2019.
- Hadi, N. (2014). *Pengembangan Bahan Bacaan Berbasis Pendidikan Multikultural, Religi Komunitas Pegunungan: Studi Kasus pada Masyarakat Terunyan di Gunung Batus, Tengger di Gunung Bromo dan Kinahrejo di Lereng Merapi*. Sejarah dan Budaya, Th. 8, No. 1, Juni 2014.
- INOVASI (2019). *Laporan Kegiatan Pertemuan Orang tua di SDN Wonokerto 2 Sukapura*. Jakarta.
- INOVASI (2019). *Laporan Kegiatan Pertemuan Orang Tua SDN Sariwani II, SDN Ngadisari II dan SDN Sukapura III*. Jakarta.
- INOVASI (2019). *Laporan Kegiatan Program INOVASI di Kabupaten Probolinggo Tahun 2018*. Jakarta.
- INOVASI (2019). *Laporan Studi KKG/KKM/KKKS/KKPS Sebagai Wadah Jejaring Pendukung Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta.
- INOVASI (2019). *Modul Pembelajaran Kelas Rangkap*. Jakarta.
- Khoiriyah, S. & Maghfiroh, W. (2018). *Pendidikan Berbasis Local Wisdom Tengger: Studi Kasus SD Negeri Argosari 01, Senduro, Lumajang*. Fenomena, Vol. 17, No. 1, April 2018.
- Little, A.W. (2001). *Multigrade Teaching: Towards an international research and policy agenda*. *International Journal of Educational Development*, Vol. 21.
- Little, A.W. (2004). *Learning and Teaching in Multigrade Settings*. Paper prepared for the UNESCO 2005 EFA Monitoring Report.
- Little, A.W. (2006.) *Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and Opportunities*. Springer, The Netherlands.
- Luschei, T. & Zubaidah, I. (2012). *Teacher Training and Transitions in Rural Indonesian Schools: A Case Study of Bogor, West Java*. *Asia Pacific Journal of Education*, Vol. 32, No.3, September 2012.
- Nurchayono, H. & Astutik, D. (2018). *Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger: Analisis Keberadaan Modal Sosial pada Proses Harmonisasi pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur*. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi* Vol. 2, No. 1, Mei 2018.
- Pertiwi, E.A., Ruja, I.N. & Budijanto. (2019). *Karakteristik Keluarga Anak Putus Sekolah Dasar Suku Tengger, Studi Kasus Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang*. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel8D753578FE47EEACCA64FE4255034538.pdf> diakses 26 April 2019.
- Rahim, R. (2012). *Signifikansi Pendidikan Multikultural terhadap Kelompok Minoritas*. Analisis, Vol. XII, No. 1, Juni 2012.

Rochana, T. (2012). *Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis*. Humanus Vol. XI, No.1, 2012.

Rosser, A. & Fahmi, M. (2016). *The Political Economy of Teacher Management in Decentralized Indonesia*. Working Paper in Economics and Development Studies, Department of Economics Padjadjaran University.

Setiawan, I. (2008). *Perempuan di Balik Kabut Bromo: Membaca Peran Aktif Perempuan Tengger dalam Kehidupan Rumahtangga dan Masyarakat*. Humaniora, Vol. 20, No. 2, Juni 2008.

Skovdal, M. & Cornish, F. (2015). *Qualitative Research for Development*. Rugby, UK: Practical Action Publishing.

SMERU (2000). *Remote Area Allowances and Absentee Levels for Teachers in Remote Areas*. Jakarta, Januari 2000.

Subagiarta, I. (2015). *Viruous Circle Economic Adat Suku Tengger di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur*. Jurnal ISEI Jember Vol. 5, No. 3, April 2015.

Suhartono, E. & Hadi, N. (2016). *Multicultural Education of Tengger Community in Parenting Tradition at Bromo-Tengger-Semeru National Park*. Research on Humanities and Social Sciences Vol. 6, No. 16, 2016.

Suputera, I. *Perbedaan Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur*. https://www.academia.edu/10466407/Perbedaan_Pelaksanaan_Pendidikan_di_Indonesia_Bagian_Barat_dan_Bagian_Timur diakses 24 April 2019.

Sutarto, A. (2006). *Sekilas tentang Masyarakat Tengger*. Makalah disampaikan pada acara Pembekalan Jelajah Budaya 2006, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 7-10 Agustus 2006.

Suyitno & Sapari, A. (1999). *Mengenal Masyarakat Tengger*. Media Alas Dayu, Surabaya.

Artikel online:

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sepakat-mempercepat-penanggulangan-kemiskinan-tepat-sasaran-dan-guna/> diakses 22 April 2019

<https://www.jpnn.com/news/kompetensi-guru-di-wilayah-terpencil-masih-rendah> diakses 24 April 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/04/13021251/mendikbud-sekolah-negeri-kekurangan-guru-pns-988133-orang> diakses 24 April 2019

Data statistik:

Kecamatan Sukapura dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

Kecamatan Lumbang dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

Kecamatan Krucil dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

Laporan Bulanan Pengawas Kecamatan Lumbang Tahun 2016-2018.

Laporan Bulanan Pengawas Kecamatan Krucil Tahun 2016-2018.

Laporan Bulanan Pengawas Kecamatan Sukapura Tahun 2016-2018.